

Katalog : 4102004.34

# Indikator Kesejahteraan Rakyat *Daerah Istimewa Yogyakarta*



<https://yogya.bps.go.id>  
**2017-2018**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Indikator**  
**Kesejahteraan Rakyat**  
*Daerah Istimewa Yogyakarta*



**2017-2018**

**INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2017-2018**

ISSN : 2654-6655  
No. Publikasi : 34550.18.06  
Katalog : 4102004.34  
Ukuran Buku : 17,6 cm X 25 cm  
Jumlah halaman : xiv + 106 halaman

Naskah :  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting :  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kover :  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :  
© Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dicetak oleh :  
CV Magna Raharja Tama (Mahata)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2017-2018**

Tim Penyusun :

Penanggung Jawab/Pengarah : Johanes De Britto Priyono  
Mainil Asni

Editor : Mutijo

Penulis Naskah : Waluyo

Pengolah Data/Tabel : Waluyo

*Design Kover dan Layout* : Waluyo



# Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2018 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini yang menyajikan data mengenai capaian dan perkembangan indikator kesejahteraan rakyat di wilayah DIY dari waktu ke waktu. Selain itu, juga disajikan perbandingan capaian dan perkembangan antarwilayah. Data indikator yang disajikan diolah dari data primer hasil survei BPS, khususnya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), hasil Sensus Penduduk dan Supas, serta data sekunder yang terkait dari dinas/instansi lain di luar BPS.

Konten publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan kesejahteraan yang telah dilaksanakan maupun bahan perencanaan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di masa mendatang. Indikator statistik yang disajikan mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan pemukiman, kemiskinan dan ketimpangan, serta indikator sosial lainnya. Mudah-mudahan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2017-2018 ini mampu menjembatani dan memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan data.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah aktif berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyajian publikasi di masa mendatang.

Yogyakarta, November 2018

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

  
Johanes De Britto Priyono



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>xi</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
Latar Belakang	3
Tujuan Penyusunan	4
Ruang Lingkup dan Cakupan	5
Sumber Data	5
Sistematika Penyajian	6
<b>Bab II Penjelasan Teknis Indikator</b>	<b>7</b>
<b>Bab III Indikator Kependudukan</b>	<b>13</b>
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	15
Persebaran Penduduk dan Kepadatan	17
Komposisi Penduduk Menurut Usia	18
Rasio Jenis Kelamin	19
Rasio Beban Ketergantungan	20
Status Perkawinan	21
Usia Perkawinan Pertama	21
<b>Bab IV Indikator Kesehatan</b>	<b>23</b>
Derajat Kesehatan Penduduk	26
Penolong Persalinan	27
Pemberian Air Susu Ibu	28
Imunisasi	29
Keluhan Kesehatan	30
Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	32
<b>Bab V Indikator Pendidikan</b>	<b>35</b>
Angka Melek Huruf (AMH)	36
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	39
Angka Partisipasi Sekolah	41
Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) dan Murni (APM)	42
Rata-rata Lama Sekolah	44
Infrastruktur Pendidikan	45
<b>Bab VI Indikator Angkatan Kerja</b>	<b>47</b>
Komposisi Penduduk Usia Kerja	49
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	50



Komposisi Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	52
Komposisi Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama	53
Komposisi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan	54
Komposisi Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu	54
Komposisi Pekerja Paruh Waktu dan Setengah Pengangguran	55
Tingkat Pengangguran Terbuka	56
<b>Bab VII Indikator Konsumsi Penduduk</b>	<b>59</b>
Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk	61
Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga	61
Komposisi Pengeluaran Perkapita Kelompok Makanan dan non Makanan	64
Konsumsi Energi dan Protein	65
<b>Bab VIII Indikator Perumahan dan Pemukiman</b>	<b>69</b>
Status Kepemilikan Rumah Tinggal	72
Jenis Lantai Terluas dan Luas Lantai	73
Jenis Dinding Bangunan Terluas	75
Jenis Atap Terluas	76
Rata-rata Jumlah Ruang Tidur	76
Sumber Penerangan	77
Sumber Air Minum Rumah Tangga	79
Tempat Pembuangan Air Besar	81
Bahan Bakar Utama untuk Memasak	82
<b>Bab IX Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan</b>	<b>83</b>
Pengukuran Kemiskinan Dan Perkembangan Garis Kemiskinan	85
Perkembangan Penduduk Miskin	86
Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan	87
Sebaran Penduduk Miskin menurut Kabupaten/ Kota	88
Perkembangan Distribusi Pendapatan	89
<b>Bab X Indikator Sosial Lainnya</b>	<b>91</b>
Pariwisata dan Perjalanan	93
Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi	95
Tindak Kejahatan	98
Perkembangan Jumlah Jemaah Haji	99
<b>Bab XI Penutup</b>	<b>101</b>
Kesimpulan	103
Saran	103
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>105</b>

# Daftar Tabel

Tabel 3.1.	Jumah Penduduk DIY (Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen), 2011-2020 .....	16
Tabel 3.2.	Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2018 (jiwa/km <sup>2</sup> ) .....	17
Tabel 3.3.	Komposisi Penduduk menurut Usia dan Rasio Beban Tanggungan di DIY, 2013-2018 (Persen) .....	20
Tabel 3.4.	Komposisi Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan di DIY, 2013-2018 (Persen) .....	21
Tabel 3.5.	Persentase Wanita Pernah Kawin 10 Tahun ke atas di DIY menurut Umur Perkawinan Pertama, 2013-2018 .....	22
Tabel 4.1.	Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di DIY, 2013-2018 .....	28
Tabel 4.2.	Persentase Anak Usia di Bawah 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI di DIY, 2014-2017 .....	28
Tabel 4.3.	Distribusi Balita Berusia 2-4 Tahun di DIY menurut Lamanya Disusui, 2012-2014 .....	29
Tabel 4.4.	Persentase Penduduk DIY yang Mempunyai Keluhan Kesehatan (Persen), Aktivitas Terganggu (Persen), dan Lamannya Terganggu (Hari) Selama Sebulan yang Lalu, 2015-2018 .....	31
Tabel 4.5.	Penduduk DIY yang Melakukan Pengobatan Sendiri dan Berobat Jalan Selama Sebulan yang Lalu, Serta Rawat Inap Selama Setahun yang Lalu menurut Wilayah dan Jenis kelamin, 2015-2018 (%) .....	32
Tabel 4.6.	Penduduk DIY yang Berobat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Fasilitas/Tempat, 2015-2018 (%) .....	33
Tabel 4.7.	Penduduk DIY yang Rawat Inap Selama Setahun yang Lalu menurut Fasilitas/Tempat Dirawat, 2015-2018 (%) .....	33
Tabel 5.1.	Angka Melek Huruf (AMH) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia DIY, 2013-2018 (Persen) .....	39
Tabel 5.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Wilayah di DIY, 2018 (Persen) .....	42
Tabel 5.3.	Perkembangan Rasio Murid-Kelas dan Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan di DIY, 2011/2012-2017/2018 ....	46
Tabel 6.1.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di DIY menurut Aktivitas, 2010-2018 (000 jiwa) .....	50
Tabel 6.2.	Perkembangan TPAK DIY menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2010-2018 (Persen) .....	50
Tabel 6.3.	Perkembangan TPT DIY menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2010-2018 (Persen) .....	56

Tabel 7.1.	Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Desil dan Kelompok di DIY, 2010-2018 .....	64
Tabel 7.2.	Komposisi Konsumsi Perkapita menurut Komoditas di DIY, 2014-2018 (%) .....	65
Tabel 7.3.	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Sehari menurut Wilayah di DIY, 2012-2018 (Persen) .....	65
Tabel 7.4.	Konsumsi Energi Perkapita Sehari (kkal) menurut Kelompok di DIY, 2016-2018 .....	67
Tabel 7.5.	Konsumsi Protein Perkapita Sehari (Gram) menurut Kelompok di DIY, 2016-2018 .....	67
Tabel 8.1.	Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di DIY, 2013-2018 (Persen) .....	72
Tabel 8.2.	Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Dinding Terluas, 2016-2018 (Persen) .....	75
Tabel 8.3.	Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Penerangan, 2013-2018 (Persen) .....	77
Tabel 8.4.	Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Air Minum Utama, 2013-2018 (%) .....	79
Tabel 8.5.	Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Fasilitas Buang Air Besar, 2016-2018 (%) .....	81
Tabel 8.6.	Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Fasilitas Buang Air Besar, 2016-2018 (%) .....	81
Tabel 9.1.	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah di DIY, 2010-2018 .....	87
Tabel 9.2.	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2010-2018 .....	88
Tabel 9.3.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Wilayah di DIY, 2016-2017 .....	89
Tabel 10.1.	Pertumbuhan Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2011-2017 (Persen) .....	94
Tabel 10.2.	Persentase Penduduk yang Memiliki dan Menggunakan Sarana Informasi Komunikasi serta Mengakses Internet Tiga Bulan Terakhir menurut Wilayah/Jenis Kelamin/Usia di DIY, 2017-2018 .....	96
Tabel 10.3.	Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di DIY (Persen) .....	97

# Daftar Gambar

Gambar 3.1.	Jumlah Penduduk DIY (Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen) Hasil SP 1971-2010, SUPAS 2015, dan Proyeksi 2020 .....	16
Gambar 3.2.	Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2018 (Persen) .....	17
Gambar 3.3.	Piramida Penduduk DIY Hasil SP 2010 dan SUPAS 2015 .....	19
Gambar 3.4.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk DIY menurut Kelompok Usia .....	19
Gambar 3.5.	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berstatus Pernah Kawin, 2017-2018 .....	22
Gambar 4.1.	Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2017 .....	26
Gambar 4.2.	Perkembangan Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir di DIY, 2000-2017 (Tahun) .....	27
Gambar 4.3.	Persentase Penolong Persalinan Balita Terakhir oleh Tenaga Medis, 2010-2018 .....	27
Gambar 4.4.	Rata-rata Lama Bulan Balita di Bawah 2 Tahun Mendapat Asupan ASI, 2017 .....	29
Gambar 4.5.	Persentase Anak berusia 12-59 Bulan yang Diberi Imunisasi di DIY, 2016-2017 .....	30
Gambar 4.6.	Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Berobat jalan dan Rawat Inap di DIY, 2017-2018 (Persen) .....	34
Gambar 5.1.	Distribusi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi, Jenis Kelamin, dan Wilayah, 2018 (Persen) .....	40
Gambar 5.2.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia di DIY, 2010-2018 (Persen) .....	41
Gambar 5.3.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) menurut Jenjang di DIY, 2010-2018 (Persen) .....	43
Gambar 5.4.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) menurut Jenjang di DIY, 2010-2018 (Persen) .....	43
Gambar 5.5.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk DIY, 2010-2018 (Tahun) .....	45
Gambar 6.1.	Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Lapangan Usaha, 2010-2017 (Persen) .....	52
Gambar 6.2.	Distribusi Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di DIY, 2018 (%) .....	53
Gambar 6.3.	Distribusi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi di DIY, 2018 (%) .....	54
Gambar 6.4.	Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu, Februari 2011-Agustus 2017 (Persen) .....	54

Gambar 6.5. Perkembangan Proporsi Pekerja Tak Penuh di DIY, 2014-2018 (Persen) .....	55
Gambar 6.6. Proporsi Setengah Penganggur dan Pekerja Paruh Waktu di DIY, 2015-2018 .....	55
Gambar 7.1. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Penduduk DIY, 2010-2018 (000 Rp).....	62
Gambar 7.2. Pengeluaran Perkapita menurut Wilayah di DIY, 2010-2018 (000 Rp)	62
Gambar 7.3. Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan menurut Wilayah di DIY , 2010-1018 (Persen) .....	63
Gambar 8.1. Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal dan Wilayah di DIY, 2018 (Persen) .....	72
Gambar 8.2. Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Bangunan Terluas di DIY, 2013-2018 (Persen) .....	73
Gambar 8.3. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal di DIY, 2018 (Persen) .....	74
Gambar 8.4. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal dan Desil Pengeluaran di DIY, 2018 (Persen) .....	74
Gambar 8.5. Rata-rata Luas Lantai Perkapita Menurut Wilayah di DIY, 2018 (m <sup>2</sup> ) ..	75
Gambar 8.6. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Dinding dan Desil, 2018 (Persen) .....	75
Gambar 8.7. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Atap Terluas dan Wilayah, 2018 .....	76
Gambar 8.8. Rata-rata Jumlah Ruang Tidur menurut Wilayah di DIY, 2017-2018 (unit) .....	77
Gambar 8.9. Distribusi Rumah Tangga menurut Wilayah dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2018 (%) .....	78
Gambar 8.10. Distribusi Rumah Tangga menurut Desil Pengeluaran dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2018 (%) .....	78
Gambar 8.11. Distribusi Rumah Tangga menurut Wilayah dan Jenis Sumber Air di DIY, 2018 (%) .....	80
Gambar 8.12. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Air untuk Memasak, Mandi, Cuci, dan Lainnya, 2018 (%) .....	80
Gambar 8.13. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2018 (%) .....	82
Gambar 9.1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah di DIY, 2010-2018 .....	86

Gambar 9.2. Perkembangan Distribusi Pengeluaran menurut Kelompok Pendapatan Penduduk di DIY, 2007-2018 (Persen) .....	90
Gambar 9.3. Perkembangan Indeks Gini menurut Wilayah di DIY, 2010-2018 (Persen) .....	90
Gambar 10.1. Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2010-2017 (Orang) .....	94
Gambar 10.2. Proporsi Penduduk DIY yang Melakukan Kegiatan Perjalanan Selama 6 Bulan Terakhir, 2013-2017 .....	95
Gambar 10.3. Proporsi Penduduk yang Mengakses Internet menurut Jenis Media di DIY .....	97
Gambar 10.4. Proporsi Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin di DIY, 2013-2018 (%) .....	98
Gambar 10.5. Sebaran Kasus Kejahatan menurut Jenis dan Wilayah di DIY, 2018 (%) ...	99
Gambar 10.6. Jumlah Jamaah Haji Asal DIY menurut Jenis Kelamin, 2012-2017 (orang) .....	100
Gambar 10.7. Sebaran Jamaah Haji DIY menurut Kabupaten/Kota Asal, 2017 (Persen) .....	100

## SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
AHH	Angka Harapan Hidup
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
AMH	Angka Melek Huruf
BPS	Badan Pusat Statistik
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
KB	Keluarga Berencana
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional	
SD	Sekolah Dasar
SDKI	Survei Demografi Kesehatan Indonesia
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional	
TFR	<i>Total Fertility Rate</i> (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

**Bab**

**I**



<https://yogyakarta.bps.go.id>

# Pendahuluan





# Pendahuluan

## Latar Belakang

Proses pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara simultan di level nasional maupun memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas kehidupan penduduk. Kesejahteraan yang dimaksud tidak semata-mata direpresentasikan oleh aspek peningkatan pendapatan perkapita yang diterima atau jumlah aset yang dimiliki penduduk. Namun, kesejahteraan yang dimaksud juga menyangkut aspek yang sangat luas yang mencakup pemerataan pendapatan, kemudahan dalam mengakses pasar tenaga kerja, kemudahan dalam mengakses sarana pendidikan serta layanan kesehatan, kebebasan individu untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, dan lainnya.

Makna pembangunan senantiasa berkembang dan mengalami perluasan secara dinamis sesuai dengan dimensi dan kompleksitas persoalan yang melingkupinya. Pandangan tradisional memaknai pembangunan sebagai proses peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah atau negara. Kesejahteraan diidentikkan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Alat yang sering digunakan untuk mengukurnya adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional atau regional bruto atau pertumbuhan pendapatan nasional/regional perkapita (*income percapita*). Sampai dengan era 1970-an, konsep pembangunan semata-mata dipandang sebagai sebuah fenomena ekonomi dan ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari tinggi atau rendahnya level pendapatan perkapita dan pertumbuhannya. Wilayah atau negara yang memiliki tingkat pendapatan perkapita dan pertumbuhan yang tinggi dianggap berhasil dalam mengelola proses pembangunan. Sebaliknya, jika level pendapatan perkapita dan pertumbuhannya rendah maka wilayah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang kurang berkembang, belum sejahtera, atau bahkan terbelakang. Pada masa itu, pertumbuhan yang tinggi diyakini akan membawa manfaat bagi terciptanya kesempatan kerja di banyak sektor dan mampu mendorong kepada perbaikan kondisi sosial ekonomi ke arah yang lebih merata. Mekanisme ini dikenal luas dengan istilah “efek penetesan ke bawah” atau *trickle down effect*.

Pandangan ekonomi baru memaknai pembangunan secara lebih komprehensif sebagai proses perbaikan yang sifatnya

Pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara simultan di semua wilayah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dan kualitas kehidupan penduduk.

multidimensional dan berkesinambungan dari suatu sistem tatanan sosial atau masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan tidak sekedar merepresentasikan aspek ekonomi dalam mengejar akselerasi pertumbuhan, namun juga menyangkut perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur atau tatanan sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Bank Dunia dalam salah satu publikasi yang dirilis menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan manusia, terutama di negara-negara miskin dan terbelakang. Perbaikan kualitas kehidupan memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Namun, masih ada syarat-syarat lainnya yang harus diperjuangkan yaitu kualitas pendidikan yang lebih baik, peningkatan nutrisi dan kesehatan, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individu serta pelestarian aneka ragam budaya (Bank Dunia, 2001).

Seberapa besar dampak atau hasil dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat diukur menggunakan pendekatan beberapa indikator. Indikator menjadi sebuah petunjuk adanya kecenderungan yang sistematis berupa capaian hasil dari sebuah kebijakan yang telah dijalankan di suatu wilayah. Dalam konteks ini, indikator berfungsi sebagai alat evaluasi yang bisa bermakna positif maupun negatif. Indikator juga menjadi sinyal yang cukup efektif untuk menginformasikan keputusan-keputusan terkait dengan perencanaan pembangunan pada masa mendatang yang akan atau

harus dilakukan di suatu wilayah. Terkait dengan tema “kesejahteraan rakyat”, maka materi yang disajikan dalam publikasi ini merupakan informasi strategis yang fokus pada aspek yang mencirikan capaian hasil beserta perkembangan standar kehidupan/kesejahteraan penduduk khususnya di wilayah DIY.

Indikator merupakan suatu besaran nilai yang diturunkan dari parameter yang dapat memberikan informasi tentang karakteristik atau keadaan dari suatu fenomena/lingkungan/wilayah. Sebagai alat ukur untuk mengetahui perubahan kondisi sosial maupun ekonomi antarwaktu dalam suatu wilayah maupun perbandingan antarwilayah pada suatu titik waktu, maka sebuah indikator harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, indikator harus relevan terhadap kebijakan yang ada. Kedua, indikator bersifat simpleks atau mudah dimengerti oleh pengguna. Artinya, meskipun penghitungannya rumit, hasilnya mudah dipahami oleh pengguna. Ketiga, indikator harus valid atau merefleksikan kenyataan yang ingin digambarkan dengan cara yang semestinya. Keempat, ketersediaan data untuk mengukur indikator harus tersedia secara kualitas maupun deret waktu dan menggambarkan perkembangan terkini. Kelima, indikator harus reliabel dan mudah diukur secara obyektif. Keenam, indikator harus sensitif dan mampu mengukur seberapa besar perubahan yang terjadi.

### **Tujuan Penyusunan**

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2018 ini merupakan publikasi berkala yang diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh BPS Provinsi DIY. Penyusunan publikasi ini secara umum memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi dan gambaran umum mengenai capaian indikator yang berhubungan dengan aspek kesejahteraan rakyat di wilayah DIY sampai tahun 2018.
2. Mengkaji perkembangan capaian kesejahteraan rakyat selama beberapa tahun terakhir.
3. Mengkaji perbandingan capaian indikator antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara kabupaten/kota di wilayah DIY.

Manfaat yang diharapkan dari penerbitan publikasi ini adalah data dan informasi yang disajikan bisa berguna bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi atau ukuran kinerja pembangunan maupun sebagai bahan perencanaan pembangunan di wilayah DIY pada masa yang akan datang. Sementara bagi peneliti atau pengguna yang lain, penerbitan publikasi ini diharapkan mampu melengkapi kebutuhan data indikator bidang sosial dan ekonomi.

### Ruang Lingkup dan Cakupan

Lingkup atau cakupan yang menjadi obyek analisis adalah wilayah administrasi DIY beserta semua kabupaten/kota yang berada di dalamnya. Selain itu, juga dianalisis perbandingan indikator menurut wilayah perkotaan atau urban dan wilayah perdesaan atau rural. Referensi waktu penyajian indikator adalah selama tahun 2017-2018 dan beberapa tahun sebelumnya disesuaikan dengan ketersediaan data pembandingan maupun data pendukung.

Dimensi Kesejahteraan Rakyat disadari sangat luas dan kompleks. Artinya, taraf kesejahteraan rakyat tidak bisa terlihat dari aspek-aspek tertentu saja. Dalam pengertian yang lebih luas sangat tidak mungkin untuk menyajikan statistik atau indikator tertentu yang mampu

mengukur kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, indikator yang disajikan dalam terbitan ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*). Dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari beberapa aspek yang spesifik, seperti aspek kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan ketimpangan, serta aspek sosial yang lainnya.

### Sumber Data

Sumber utama data Indikator Kesejahteraan Rakyat 2017-2018 diolah dari data primer hasil pengumpulan data dari berbagai survei dan sensus yang dilakukan oleh BPS. Beberapa diantaranya adalah Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lainnya. Jenis data primer ini cukup baik untuk membandingkan capaian hasil pembangunan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, jenis data ini mempunyai keterbatasan sebagai sumber informasi publikasi tahunan jika disajikan secara berkala. Salah satu kelemahannya adalah sering kali series datanya berfluktuasi. Upaya untuk menyediakan sumber data yang tetap bagi publikasi Inkesra telah dilakukan melalui perluasan cakupan pertanyaan pokok (data kor) Susenas yang diadakan setiap tahun. Dengan demikian publikasi Inkesra mempunyai sumber data yang pasti dan berkesinambungan sehingga selalu dapat menyajikan data yang relatif terkini (*up to date*). Selain menggunakan data primer, publikasi ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa instansi-instansi pemerintah terkait, seperti

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, dan sebagainya.

### Sistematika Penyajian

Penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan manfaat penyusunan, ruang lingkup dan cakupan, serta sumber data.
- Bab II Penjelasan Teknis, berisi penjelasan mengenai konsep variabel dan indikator yang disajikan beserta proses penghitungannya.
- Bab III Kependudukan, berisi penjelasan mengenai perkembangan capaian indikator kependudukan seperti jumlah penduduk dan pertumbuhan, karakteristik kependudukan, kepadatan dan persebaran, angka beban ketergantungan, dan perkawinan.
- Bab IV Kesehatan dan gizi, menyajikan data perkembangan indikator bidang kesehatan seperti persalinan, ASI, imunisasi, angka kesakitan, fasilitas berobat, dan pemanfaatan jaminan kesehatan.
- Bab V Pendidikan, menyajikan data perkembangan indikator bidang pendidikan seperti fasilitas pendidikan, partisipasi sekolah, melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi.
- Bab VI Angkatan kerja, menyajikan data perkembangan indikator angkatan kerja seperti TPAK, pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan karakteristik penduduk bekerja.
- Bab VII Pola konsumsi penduduk, menyajikan data perkembangan indikator pola konsumsi penduduk, konsumsi kalori dan protein.
- Bab VIII Perumahan dan pemukiman, menyajikan data perkembangan indikator bidang perumahan dan pemukiman seperti penggunaan listrik, air bersih, kondisi rumah, dan sanitasi.
- Bab IX Kemiskinan dan ketimpangan, menyajikan data perkembangan indikator kemiskinan dan ketimpangan.
- Bab X Sosial lainnya, menyajikan data perkembangan indikator sosial lainnya seperti perjalanan, pariwisata, teknologi informasi, kejahatan, dan ibadah haji.
- Bab XI Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

Bab



<https://yogyakarta.bps.go.id>

# Penjelasan Teknis Indikator



# Penjelasan Teknis Indikator

Konsep penduduk yang digunakan oleh BPS mencakup semua orang yang tinggal/mendiami suatu wilayah tertentu selama enam bulan atau lebih atau kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk menurut kelompok umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, dan biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok interval 5 tahunan yang dimulai dari usia 0 tahun.

Kepadatan penduduk/km<sup>2</sup> adalah rata-rata jumlah penduduk yang mendiami setiap 1 km<sup>2</sup> luas wilayah.

Laju pertumbuhan penduduk adalah ukuran rata-rata kecepatan penambahan penduduk per tahun. Ada dua metode untuk menghitung pertumbuhan penduduk, yaitu geometris dan eksponensial. Pertumbuhan penduduk geometris atau secara bertahap dihitung dari formula sebagai:  $P_t = P_0(1+r)^t$ . Pertumbuhan penduduk eksponensial berlangsung terus menerus dan dihitung menggunakan formula:  $P_t = P_0 e^{rt}$ .  $P_0$  adalah jumlah penduduk pada awal periode penghitungan,  $P_t$  adalah jumlah penduduk pada akhir periode penghitungan,  $r$  adalah rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun,  $t$  adalah jumlah tahun dari 0 ke  $t$  dan  $e$  adalah bilangan eksponensial (2,718282).

Angka beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk yang termasuk dalam usia yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 tahun ke atas) dengan penduduk berusia produktif (usia 15-64 tahun).

Umur perkawinan pertama menunjukkan umur seseorang pada saat melangsungkan upacara perkawinan yang pertama.

Rumah sakit adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang biasanya di bawah pengawasan dokter/tenaga medis.

Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

AMH (Angka Melek Huruf) dihitung dari besarnya proporsi

Bagian ini berisi penjelasan teknis mengenai konsep/definisi variabel dan indikator kesejahteraan rakyat beserta jenis data dan metode penghitungan.



penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis apabila ia dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu huruf.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah murid (tanpa melihat usia) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang bersesuaian dengan jenjang tersebut (dalam satuan persen).

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah murid SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun (dalam persentase).

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan rasio atau perbandingan antara murid atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah pada jenjang SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk kelompok usia yang bersesuaian dengan jenjang sekolah tersebut (dalam persentase).

Angka putus sekolah merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah penduduk usia 7 tahun/13 tahun/16 tahun ke atas yang putus sekolah di SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7 tahun/13 tahun/16 tahun ke atas (dalam satuan persen).

Masih bersekolah adalah status mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdiknas, Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

Rasio murid terhadap guru adalah perbandingan antara jumlah murid yang berstatus sekolah pada jenjang pendidikan

tertentu dengan jumlah guru yang mengajar pada jenjang pendidikan yang bersesuaian.

Rasio murid per kelas adalah perbandingan antara jumlah murid yang berstatus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah kelas yang tersedia pada jenjang pendidikan yang bersesuaian.

Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan rata-rata lama bersekolah seseorang mulai dari masuk sekolah dasar sampai kelas/jenjang pendidikan terakhir yang diduduki. Rata-rata lama sekolah bisa dihitung menggunakan referensi penduduk berusia 15 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Bekerja adalah mereka yang selama seminggu yang lalu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam seminggu yang lalu.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio atau perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang berstatus pengangguran dengan jumlah angkatan kerja (dalam satuan persen).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) dalam satuan persen.

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja (*manpower*) yang tidak bekerja ataupun bukan pengangguran, seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau tua dan cacat.

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur (mulai tahun 2010 termasuk non formal).

Mengurus rumah tangga adalah penduduk 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa

mendapatkan upah/gaji.

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.

Pekerja penuh adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja 35 jam atau lebih dalam seminggu.

Pekerja tak penuh adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Setengah pengangguran adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau mau menerima pekerjaan lain/tambahan.

Pekerja paruh waktu adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan tidak mau menerima pekerjaan lain.

**Bagan Ketenagakerjaan:**



Konsumsi Rumah Tangga adalah pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Kelompok makanan mencakup pengeluaran konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan kelompok bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Indeks Gini adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Pengeluaran rata rata perkapita sebulan adalah rata rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

Bab



<https://yogyakarta.bps.go.id>

# Indikator Kependudukan



# Indikator Kependudukan

Penduduk memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses pembangunan suatu wilayah. Penduduk merupakan subyek pelaksana utama sekaligus obyek penerima manfaat terbesar dari proses pembangunan. Dinamika kependudukan senantiasa berkembang dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar yang diikuti oleh peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia akan menjadi modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk besar yang tidak diikuti oleh peningkatan kualitas modal manusia hanya akan menjadi beban dalam pembangunan.

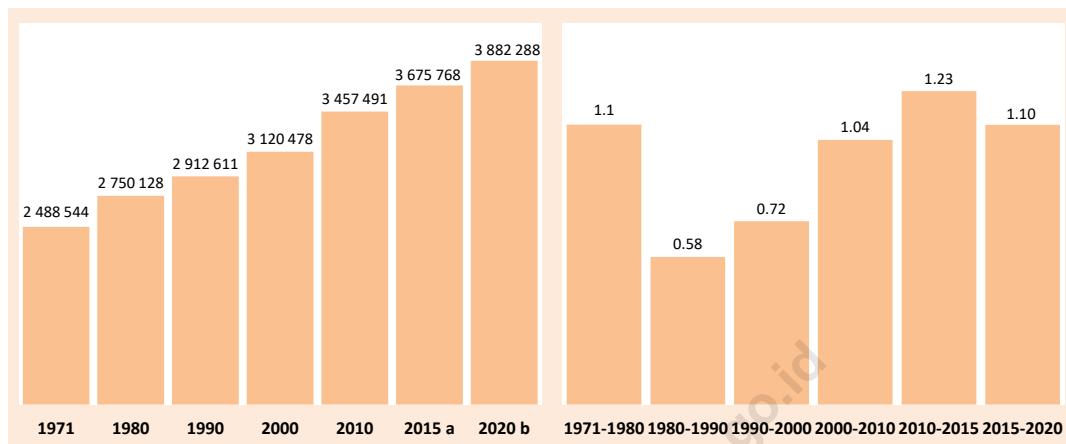
Karakteristik kependudukan seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, kepadatan dan persebaran penduduk, komposisi penduduk menurut usia, jenis kelamin, pendidikan, status, dan lainnya menjadi indikator penting yang sangat bermanfaat dalam proses evaluasi dan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk secara umum. Dengan kata lain, hasil pembangunan harus bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan juga ditunjang dengan penanganan permasalahan penduduk, seperti kebijakan pembangunan kependudukan yang terarah dan terencana sebagai upaya pengendalian jumlah dan perkembangan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Dengan demikian diharapkan tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar secara merata di seluruh wilayah sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

## Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Populasi penduduk DIY berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 mencapai 3.457.491 jiwa. Populasi penduduk DIY diperkirakan meningkat menjadi 3,80 juta jiwa pada tahun 2018 dan 3,88 juta jiwa pada tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2020 (BPS dan UNFPA, 2015). Jumlah penduduk DIY memberi kontribusi sebesar 1,4 persen terhadap total populasi

“Populasi penduduk DIY tumbuh 1,2 persen per tahun selama periode 2010-2015 dan memberi kontribusi sebesar 1,4 persen terhadap total populasi penduduk nasional ”

**Gambar 3.1. Jumlah Penduduk DIY (Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen) Hasil Sensus Penduduk 1971-2010, SUPAS 2015, dan Proyeksi 2020**



Sumber: SP 1971-2010, SUPAS 2015, dan Proyeksi Penduduk DIY 2010-2020, BPS

Catatan: <sup>a</sup>SUPAS 2015 <sup>b</sup>Proyeksi

penduduk nasional.

Secara bertahap, jumlah penduduk yang tinggal di wilayah DIY semakin meningkat dengan pola pertumbuhan yang cukup bervariasi. Pertumbuhan penduduk per tahun selama periode 1971-1980 tercatat mencapai 1,1 persen yang didorong oleh tingginya fertilitas selama periode tersebut. Kebijakan pengendalian populasi melalui Program Keluarga Berencana (KB) terlihat cukup berhasil menurunkan fertilitas. Sementara, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan sarana kesehatan mampu menurunkan kasus kematian penduduk secara umum maupun kematian bayi dan balita secara khusus. Imbasnya adalah laju pertumbuhan penduduk selama periode 1980-1990 dan 1990-2000 mampu terkoreksi dengan laju pertumbuhan per tahun mencapai 0,58 persen dan 0,72 persen. Laju pertumbuhan populasi tercatat kembali meningkat selama periode 2000-2010 dan 2010-2015, meskipun akan kembali menurun berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2020.

Perkembangan jumlah penduduk DIY secara tahunan berdasarkan hasil proyeksi

2010-2020 secara bertahap semakin meningkat (Tabel 3.1). Setiap tahun rata-rata terjadi kenaikan sebanyak 41,37 ribu jiwa penduduk di DIY. Laju pertumbuhan penduduk tahunan tercatat selalu positif dengan kecenderungan semakin melambat. Melambatnya laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tingkat kelahiran atau fertilitas yang diasumsikan menurun.

**Tabel 3.1. Jumlah Penduduk DIY (Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen), 2011-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan (%)
	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	1 732 620	1 777 377	3 509 997	1,23
2012	1 754 278	1 798 184	3 552 462	1.21
2013	1 775 872	1 818 982	3 594 854	1.19
2014	1 797 389	1 839 727	3 637 116	1.18
2015	1 818 765	1 860 411	3 679 176	1.16
2016	1 839 951	1 880 961	3 720 912	1.13
2017	1 860 869	1 901 298	3 762 167	1.11
2018	1 881 478	1 921 394	3 802 872	1.08
2019	1 901 735	1 941 197	3 842 932	1.05
2020	1 921 605	1 960 683	3 882 288	1.02

Sumber: Proyeksi Penduduk DIY 2010-2020, BPS

**Persebaran Penduduk dan Kepadatan**

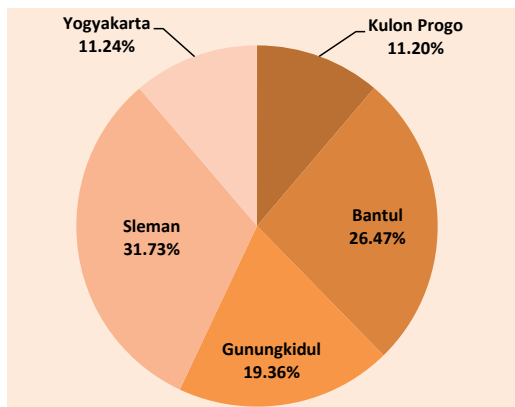
Tingkat persebaran dan kepadatan penduduk (*population density*) menjadi indikator yang mencerminkan tingkat pemerataan dan pemusatan penduduk dalam suatu wilayah. Isu persebaran dan kepadatan penduduk memiliki persinggungan yang cukup besar terkait dengan faktor pendorong maupun dampak yang ditimbulkan. Tinggi atau rendahnya kepadatan penduduk dan merata atau tidaknya persebaran penduduk bisa membawa dampak positif maupun negatif.

Kepadatan yang sudah mencapai titik jenuh, mungkin akan lebih banyak memberi dampak negatif dan menciptakan banyak persoalan terkait dengan ketimpangan sumber daya manusia. Permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kriminalitas, berkurangnya lahan pertanian, kerusakan lingkungan akan semakin meningkat jika tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti penyediaan sarana dan fasilitas sosial dan ekonomi serta penciptaan kesempatan bekerja yang berkelanjutan. Persebaran penduduk yang tidak merata perlu

mendapat perhatian terkait dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar wilayah kabupaten/kota. Beberapa pemicu tingkat persebaran penduduk yang tidak merata adalah faktor geografis wilayah, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan kesempatan kerja dan kemudahan mengakses tenaga kerja, dan kebijakan pembangunan antar wilayah yang tidak merata.

Pemerataan dan keseimbangan penduduk dapat dilakukan melalui kebijakan relokasi penduduk dalam bentuk migrasi untuk menciptakan kondisi ideal dan seimbang antara penduduk dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, kebijakan pembangunan berbasis pinggiran atau perdesaan harus lebih ditingkatkan untuk mengurangi laju migrasi penduduk ke wilayah perkotaan dan mengurangi konsentrasi penduduk di kawasan pusat-pusat perekonomian. Kondisi umum yang terjadi adalah bahwa konsentrasi dan kepadatan penduduk cenderung tinggi di daerah-daerah perkotaan. Ketersediaan fasilitas kehidupan yang lebih lengkap dan beragam serta bervariasi lapangan pekerjaan merupakan daya tarik tersendiri

**Gambar 3.2. Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018 (Persen)**



Sumber: Proyeksi Penduduk DIY 2010-2020, BPS

**Tabel 3.2. Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2018 (jiwa/km<sup>2</sup>)**

Kabupaten/ Kota	Kepadatan Penduduk/Km <sup>2</sup>				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	696	703	711	719	727
Bantul	1 892	1 916	1 940	1 963	1 986
Gunungkidul	476	481	486	491	495
Sleman	2 008	2 030	2 053	2 076	2 099
Yogyakarta	12 740	12 897	13 055	13 210	13 359
<b>DIY</b>	<b>1 142</b>	<b>1 155</b>	<b>1 168</b>	<b>1 181</b>	<b>1 194</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk DIY 2010-2020, BPS



yang mendorong penduduk untuk melakukan perpindahan atau migrasi ke pusat-pusat ekonomi di daerah perkotaan.

Persebaran atau konsentrasi penduduk DIY sampai saat ini masih terpusat di Kabupaten Sleman dan Bantul. Kedua kabupaten memiliki kontribusi jumlah penduduk terbesar dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Secara proporsional, sekitar 31,7 persen penduduk DIY pada tahun 2018 tinggal di wilayah Kabupaten Sleman dan 26,5 persen tinggal di Bantul. Sementara, jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta proporsinya hanya sekitar 11 persen. Proporsi penduduk yang tinggal di Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat semakin menurun meskipun laju pertumbuhan penduduknya positif. Penyebabnya adalah level pertumbuhan penduduk per tahun di kedua wilayah yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Sleman dan Bantul.

Kepadatan penduduk DIY pada tahun 2010 mencapai 1.085 jiwa per km<sup>2</sup>. Perkembangan angka kepadatan penduduk DIY dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk, sementara dari sisi luas wilayah administrasi tidak mengalami perluasan. Pada tahun 2018, kepadatan penduduk DIY diproyeksikan mencapai 1.194 jiwa per km<sup>2</sup>. Artinya, setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah DIY dihuni oleh 1.194 jiwa penduduk. Perkembangan angka kepadatan penduduk di semua kabupaten/kota menunjukkan peningkatan. Wilayah dengan kepadatan tertinggi sampai tahun 2018 tercatat di Kota Yogyakarta. Setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah Kota Yogyakarta dihuni oleh 13.359 jiwa penduduk. Berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Sleman (2.099 jiwa per km<sup>2</sup>) dan Bantul (1.986 jiwa per km<sup>2</sup>). Kedua kabupaten

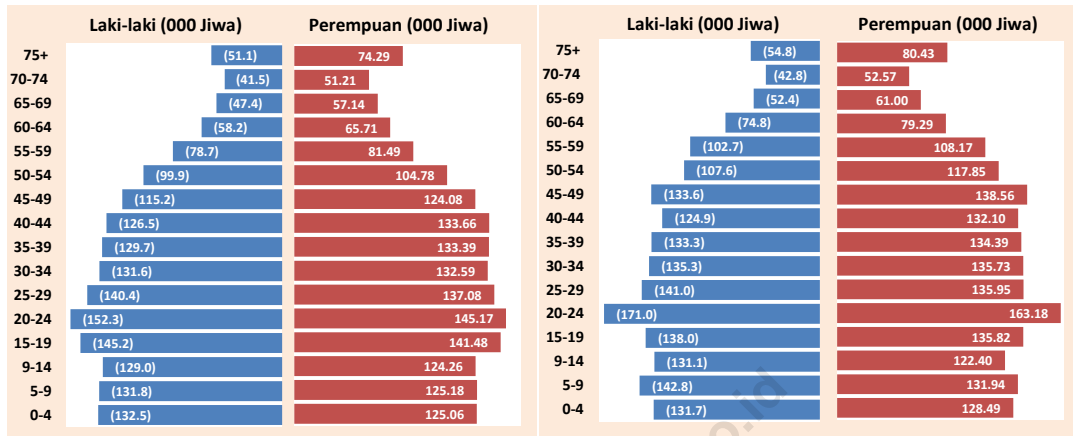
tercatat memiliki kenaikan kepadatan penduduk tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk yang relatif lebih tinggi, terutama di wilayah kecamatan yang menjadi penyangga perkembangan (kawasan aglomerasi) Kota Yogyakarta. Sementara, Kabupaten Gunungkidul tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 495 jiwa per km<sup>2</sup>. Rendahnya kepadatan ini disebabkan oleh luas wilayah administrasi Gunungkidul yang paling besar, yakni mencakup 46,6 persen wilayah DIY.

#### Komposisi Penduduk Menurut Usia

Komposisi penduduk DIY menurut kelompok usia mengalami pergeseran yang sangat nyata. Komposisi penduduk hasil SP 1971 didominasi oleh kelompok penduduk muda atau kurang dari 20 tahun. Penyebabnya adalah tingginya tingkat kelahiran selama periode 1960-1970 dan kualitas layanan kesehatan yang belum begitu baik yang berpengaruh pada usia harapan hidup yang masih rendah. Penyebab lainnya adalah rendahnya proporsi penduduk tua akibat dampak perang dan konflik sosial selama masa sebelum dan setelah kemerdekaan RI.

Seiring dengan perkembangan waktu dan perbaikan kualitas hidup, komposisi penduduk semakin bergerak ke atas. Hasil SP 2010 dan Supas 2015 menggambarkan komposisi penduduk DIY semakin didominasi oleh kelompok penduduk berusia 20-49 tahun. Artinya, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja produktif secara signifikan. Seandainya momentum ini bisa dimanfaatkan secara optimal yang didukung oleh peningkatan kualitas modal manusia maka bonus demografi ini akan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam

Gambar 3.3. Piramida Penduduk DIY Hasil SP 2010 dan SUPAS 2015



Sumber: SP 2010 dan SUPAS 2015, BPS DIY

satu dekade ke depan. Demikian pula dengan komposisi pada kelompok penduduk tua. Secara proporsional jumlah penduduk berusia tua semakin meningkat. Bahkan, berdasarkan hasil proyeksi penduduk komposisi penduduk tua meningkat secara nyata pada akhir periode 2030. Hal ini membutuhkan pemikiran terkait penyediaan fasilitas dan layanan untuk para lansia di masa mendatang.

**Rasio Jenis Kelamin**

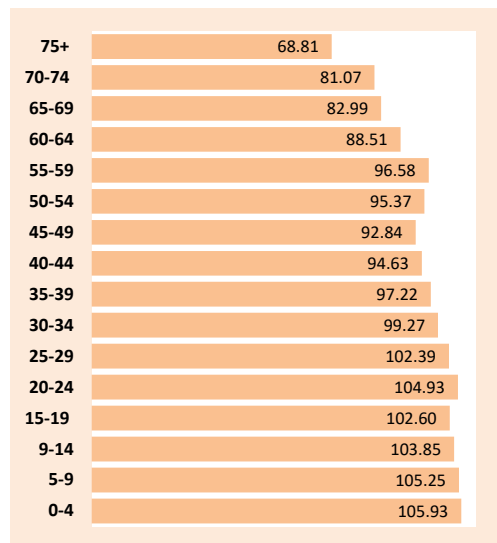
Komposisi penduduk DIY menurut jenis kelamin berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1971-2010 didominasi oleh penduduk perempuan. Nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) selama periode tersebut berkisar antara 94-98 persen. Demikian pula dengan hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2020 juga menunjukkan populasi penduduk perempuan lebih dominan dengan nilai rasio rata-rata sebesar 98 persen. Angka ini menggambarkan terdapat 98 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Pola rasio jenis kelamin menurut kelompok usia menunjukkan bahwa pada saat lahir sampai usia 29 tahun populasi penduduk laki-laki lebih dominan dari

perempuan dengan nilai rasio di atas 102. Pada kelompok usia 30 tahun ke atas populasi penduduk perempuan terlihat mulai mendominasi. Bahkan, pada kelompok usia 60 tahun ke atas, nilai rasio jenis kelamin tercatat berada di bawah 90 dan mencapai level terendah sebesar 69 pada kelompok usia 75 tahun ke atas.

Secara umum, nilai rasio jenis kelamin yang kurang dari 100 dipengaruhi oleh

Gambar 3.4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk DIY menurut Kelompok Usia (Persen)



Sumber: SP 2010, BPS DIY

angka harapan hidup perempuan yang cenderung lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini terkait dengan jenis aktivitas baik pekerjaan maupun aktivitas lain sehari-hari yang dilakukan penduduk laki-laki yang cenderung memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dari penduduk perempuan. Sektor-sektor dan jenis pekerjaan yang beresiko cenderung diisi oleh kaum laki-laki. Tingkat mobilitas dan lama jam kerja penduduk laki-laki pada umumnya juga lebih tinggi dari penduduk perempuan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas daya tahan, kesehatan tubuh, dan kerentanan terhadap penyakit.

### Rasio Beban Ketergantungan

Indikator kependudukan yang cukup penting adalah rasio beban ketergantungan. Indikator ini diukur dari proporsi penduduk yang tidak produktif secara ekonomi yaitu penduduk berumur muda (di bawah 15 tahun) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) terhadap penduduk yang produktif secara ekonomi (15-64 tahun). Pada umumnya, penduduk berusia di bawah 15 tahun secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi.

Dengan rasio beban ketergantungan ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Semakin tinggi rasio beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini menggambarkan semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum/tidak produktif.

**Tabel 3.3. Komposisi Penduduk menurut Usia dan Rasio Beban Tanggungan di DIY, 2013-2018 (Persen)**

Tahun	Umur			Jumlah	Rasio Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	21,63	69,15	9,22	100	45
2014	21,68	69,47	8,85	100	44
2015	21,64	69,14	9,22	100	45
2016	21,48	69,33	9,19	100	44
2017	21,57	69,12	9,31	100	44
2018	21,72	68,93	9,34	100	45

Sumber: Susenas Maret 2013-2018, BPS DIY

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa rasio beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) di DIY selama periode 2013-2018 cukup stabil pada kisaran 44-45 persen. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk berusia produktif pada memiliki beban untuk menanggung sekitar 44-45 penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif. Secara series, rasio beban ketergantungan di DIY berdasarkan hasil sensus cenderung menurun dari 82 persen di tahun 1971 menjadi 69 persen (SP 1980) dan 46 persen (SP 2010). Perubahan ini terjadi seiring dengan pergeseran komposisi penduduk antar sensus.

Secara ekonomi, besarnya komposisi penduduk berusia produktif menjadi peluang dari bonus demografi yang bisa dioptimalkan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan. Tentu saja hal ini terjadi dengan asumsi bahwa setiap usia produktif betul-betul produktif. Jika tidak, tentu akan lebih berat lagi karena beban tanggungan usia produktif yang juga harus menanggung usia produktif menjadi bertambah karena harus menanggung usia produktif lainnya. Bahkan, usia produktif yang secara nyata tidak dapat diberdayakan secara ekonomi (pengangguran) akan menimbulkan

masalah yang cukup serius dalam kehidupan sosial.

**Status Perkawinan**

Status perkawinan secara demografi menjadi variabel antara dalam analisis fertilitas, khususnya status perkawinan penduduk perempuan. Status kawin menggambarkan kestabilan status penduduk dalam membentuk dan membina rumah tangga. Untuk melihat stabil atau tidaknya ketahanan rumah tangga, dapat dicermati dari komposisi penduduk yang berstatus cerai hidup. Makin tinggi proporsinya, maka kualitas ketahanan rumah tangga relatif makin rendah.

Komposisi penduduk DIY berusia 10 tahun ke atas berdasarkan status perkawinan sampai tahun 2018 didominasi oleh penduduk yang berstatus kawin. Proporsinya mencapai 60 persen. Sementara, sisanya terdiri dari penduduk yang berstatus belum kawin sebanyak 30 persen, cerai hidup 1,93 persen, dan cerai mati 7,57 persen. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup atau cerai mati tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dari perkembangan data selama empat tahun terakhir (2013-2018).

Secara umum perbandingan tersebut mencerminkan bahwa penduduk perempuan lebih dapat bertahan untuk tidak kawin/menikah lagi setelah ditinggal mati oleh pasangannya (janda cerai mati) atau setelah cerai hidup. Penduduk laki-laki ketika ditinggal mati oleh pasangannya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menikah atau mencari pasangan lagi dibandingkan perempuan. Demikian pula ketika bercerai hidup dengan pasangannya, laki-laki juga memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menikah lagi dibanding

**Tabel 3.4. Komposisi Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan di DIY, 2013-2018 (Persen)**

Tahun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan				Jumlah
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	L	35,93	60,50	0,74	2,83	100
	P	26,54	59,82	2,17	11,47	100
	L+P	31,15	60,16	1,47	7,23	100
2014	L	35,88	60,18	0,70	3,25	100
	P	26,90	59,24	2,06	11,80	100
	L+P	31,31	59,70	1,39	7,60	100
2015	L	35,87	60,10	1,01	3,02	100
	P	26,57	59,29	2,21	11,93	100
	L+P	31,14	59,69	1,62	7,55	100
2016	L	35,70	59,87	1,05	3,39	100
	P	26,45	59,53	2,41	11,60	100
	L+P	31,00	59,70	1,74	7,57	100
2017	L	35,40	60,16	1,34	3,10	100
	P	25,77	59,71	2,60	11,92	100
	L+P	30,51	59,94	1,98	7,57	100
2018	L	35,11	60,40	1,24	3,25	100
	P	25,88	59,80	2,58	11,74	100
	L+P	30,41	60,09	1,93	7,57	100

Sumber: Susenas Maret 2013-2018, BPS DIY

perempuan. Fenomena ini secara tidak langsung juga ditunjukkan oleh persentase laki-laki dengan status kawin yang tercatat lebih tinggi dibanding perempuan selama empat tahun terakhir. Lebih tingginya proporsi perempuan yang berstatus cerai mati atau cerai hidup dibandingkan dengan laki-laki juga bisa dipengaruhi oleh usia harapan hidup penduduk perempuan yang lebih panjang dari penduduk laki-laki.

**Usia Perkawinan Pertama**

Usia perkawinan pertama terutama wanita sangat mempengaruhi tingkat fertilitas dan perkembangan jumlah penduduk. Makin muda usia perkawinan semakin panjang masa reproduksi, sehingga

peluang fertilitasnya semakin tinggi. Di sisi yang lain, usia perkawinan yang terlalu dini memiliki pengaruh terhadap tingkat resiko ketika masa kehamilan dan persalinan. Semakin tinggi usia perkawinan pertama akan mempersingkat masa reproduksi wanita dan itu berarti peluang tingkat kelahiran akan rendah.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan usia menikah untuk perempuan minimal 16 tahun. Sementara, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal perempuan untuk menikah adalah berumur 18 tahun. Sementara, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang yang ideal adalah 21-25 tahun.

Rata-rata usia perkawinan pertama baik laki-laki maupun perempuan di DIY tercatat semakin meningkat. Pada posisi Maret 2018 rata-rata usia perkawinan pertama laki-laki sebesar 26 tahun, sementara perempuan sebesar 22 tahun. Jika dikaji berdasarkan distribusinya, maka mayoritas wanita berusia 10 tahun ke atas yang berstatus pernah kawin melakukan perkawinan pertama pada usia 19-24 tahun. Proporsi pada tahun 2018 mencapai

52,4 persen. Angka ini menggambarkan kesadaran wanita untuk melakukan perkawinan pada usia ideal yang semakin meningkat. Komposisi terbesar berikutnya pada usia 25 tahun ke atas dengan proporsi 26,7 persen. Sementara, proporsi wanita yang pernah kawin dengan usia 18 tahun ke bawah masih cukup besar yakni 20,9 persen. Jika lebih dirinci, maka masih terdapat 6,2 persen yang kawin pada usia 16 tahun ke bawah. Proporsi ini masih cukup besar dan membutuhkan perhatian yang lebih serius. Sebagian besar kasus perkawinan dengan usia di bawah 16 tahun terjadi pada masa lampau. Namun, tidak sedikit kasus yang terjadi pada masa sekarang, terutama para pelajar yang salah dalam pergaulan dan terpaksa menikah pada usia yang dini.

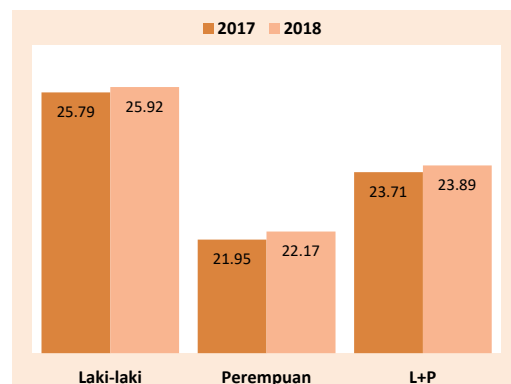
Secara prinsip, pada usia kurang dari 18 tahun seorang wanita belum siap untuk membina sebuah rumah tangga. Seharusnya mereka masih bersekolah di jenjang pendidikan menengah. Upaya meningkatkan usai perkawinan dapat ditempuh dengan memberi kesempatan pada wanita untuk bersekolah lebih tinggi, memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, dan memperluas kesempatan kerja.

**Tabel 3.5. Persentase Wanita Pernah Kawin 10 Tahun ke atas di DIY menurut Umur Perkawinan Pertama, 2013-2018**

Tahun	Umur Perkawinan Pertama				Jumlah
	≤16	17-18	19-24	25+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	7,26	18,30	51,99	22,44	100
2014	7,61	17,66	53,06	21,67	100
2015	2,09	6,76	75,85	15,30	100
2016	7,34	14,28	54,16	24,23	100
2017	4,55	13,59	55,10	26,76	100
2018	6,21	14,66	52,43	26,70	100

Sumber: Susenas Maret 2013-2018, BPS DIY

**Gambar 3.5. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berstatus Pernah Kawin, 2017-2018**



Sumber: Susenas Maret 2017-2018, BPS DIY

Bab **IV**



Indikator  
Kesehatan



# Indikator Kesehatan

Investasi di bidang kesehatan memiliki andil strategis dalam meningkatkan kualitas modal manusia dan mendorong peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Investasi sektor kesehatan mempunyai *multiplier effect* yang cukup tinggi terhadap pembangunan di sektor lainnya. Pada tingkat mikro, kualitas kesehatan penduduk atau lebih spesifik angkatan kerja adalah penentu produktivitas dalam aktivitas produksi barang dan jasa. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan cenderung lebih produktif dibandingkan dengan tenaga kerja yang kurang sehat. Konsekuensinya pekerja yang sehat akan mendapatkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik menjadi masukan atau input penting untuk menurunkan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Karenanya, kesehatan menjadi salah satu aspek yang mencirikan kesejahteraan dan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan manusia.

Komitmen global untuk meningkatkan status kesehatan penduduk secara jelas dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*-MDGs) yang dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs). Tujuan ketiga dari SDG's adalah kehidupan yang sehat dan sejahtera, yakni memastikan hidup yang sehat dan mendukung kesejahteraan semua usia. Beberapa butir target atau sasaran yang ingin dicapai adalah mengurangi rasio kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dan balita, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya, melakukan pencegahan dan pengobatan dari zat berbahaya (narkotika dan alkohol), meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi, dan lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah pada level pusat sampai level regional sudah menggalakkan berbagai program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Sasaran utama yang ingin dicapai memiliki irisan yang kuat dengan SDG'S seperti meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta menurunkan prevalensi gizi kurang. Beberapa upaya yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yaitu dengan memberikan



pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; penyediaan sumber daya kesehatan yang kompeten; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, posyandu, dan rumah sakit; penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat, dan pendistribusian tenaga kesehatan secara merata.

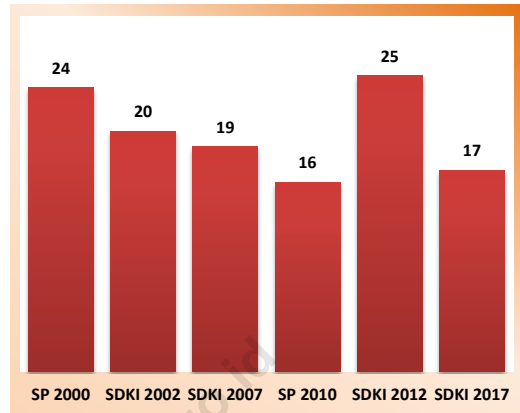
Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

### Derajat Kesehatan Penduduk

Aspek kesejahteraan penduduk DIY dari dimensi kesehatan secara umum semakin meningkat atau membaik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dua indikator yang menggambarkan derajat kesehatan penduduk secara umum, yakni angka kematian bayi dan angka harapan hidup pada saat lahir. Angka kematian bayi tercatat semakin menurun dan angka harapan hidup penduduk pada saat lahir tercatat semakin meningkat.

Berdasarkan data hasil pendataan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan hasil Sensus Penduduk dalam dua dekade terakhir, Angka Kematian Bayi di DIY menunjukkan perkembangan yang semakin menurun secara berfluktuasi. Angka kematian bayi pada tahun 2000 tercatat sebesar 24, artinya ada 24 kasus

Gambar 4.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2017



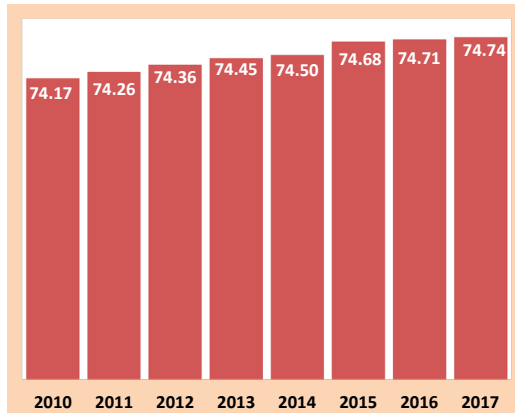
Sumber : BPS DIY, Beberapa Terbitan

kematian bayi untuk 1000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami sedikit penurunan secara bertahap menjadi 20 (hasil SDKI 2002) dan 19 (hasil SDKI 2007) dan 16 (hasil SP 2010). Hasil SDKI 2012 menunjukkan jumlah kasus kematian bayi meningkat menjadi 25 kasus per 1000 kelahiran hidup, meskipun kembali menurun menjadi 17 kasus per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil SDKI 2017.

Secara umum, kasus kematian bayi sebagian besar terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran bayi (kematian *neonatal*). Hasil SDKI 2017 mencatat angka kematian neonatal mencapai 15 kasus per seribu kelahiran hidup. Sementara angka kematian *postneonatal* tercatat sebanyak 2 kasus per seribu kelahiran hidup. Hal ini membawa implikasi terkait pentingnya penanganan persalinan oleh tenaga penolong terdidik (tenaga medis) dan pentingnya upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang tata cara perawatan bayi pasca kelahiran maupun selama masa kehamilan.

Meningkatnya derajat kesehatan juga akan ditandai oleh bertambahnya usia harapan hidup penduduk pada saat lahir. Angka harapan hidup penduduk DIY

Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir di DIY, 2000-2017



Sumber : IPM DIY, 2010-2017

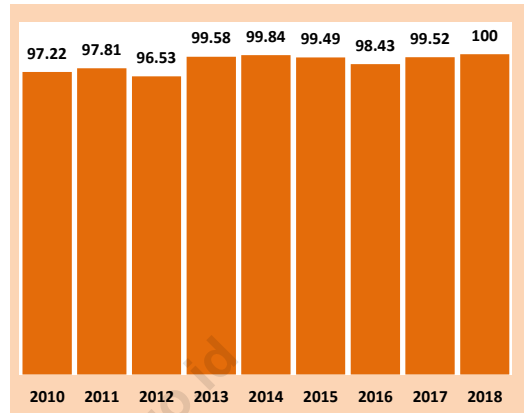
menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010, angka harapan hidup tercatat sebesar 74,17. Angka ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2010 hingga akhir hayatnya.

Secara bertahap usia harapan hidup semakin meningkat hingga mencapai level 74,74 tahun pada tahun 2017. Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, angka harapan hidup penduduk DIY tercatat berada pada level yang tertinggi. Tingginya usia harapan hidup DIY didorong oleh gaya hidup penduduk yang *low profile* serta perbaikan kualitas kesehatan penduduk secara umum. Perbaikan kualitas kesehatan ini ditandai oleh tingkat kemudahan penduduk dalam mengakses sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, dan berkurangnya angka kesakitan.

### Penolong Persalinan

Kualitas kesehatan dan kasus kematian balita tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu dan janin semasa kehamilan. Kesehatan dan kasus kematian balita juga

Gambar 4.3. Persentase Penolong Persalinan Balita Terakhir oleh Tenaga Medis, 2010-2018



Sumber : Susenas 2000-2018, BPS

dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti proses kelahiran/persalinan serta kondisi lingkungan tempat tinggal. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan atau medis, seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik dan lebih aman dibandingkan dengan proses yang ditolong oleh tenaga tradisional seperti dukun atau lainnya. Secara tidak langsung, hal ini juga menggambarkan tingkat kemajuan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran. Perkembangan data proporsi balita menurut penolong persalinan terakhir dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan bahwa mayoritas persalinan telah ditangani oleh tenaga kesehatan atau medis. Proporsinya sudah mendekati 100 persen.

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa pada 2018 proses persalinan di DIY yang ditolong oleh dokter mencapai 53,31 persen. Proporsi terbesar berikutnya adalah persalinan yang ditangani oleh

Tabel 4.1. Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di DIY, 2013-2018

Tahun	Tenaga Medis			Tenaga Tradisional	
	Dokter	Bidan	Medis lain	Dukun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	42,74	56,35	0,49	0,35	0,08
2014	40,07	59,70	0,07	0,10	0,06
2015	57,00	41,06	1,43	0,51	0,00
2016	52,97	44,78	0,67	1,57	0,00
2017	48,39	50,23	0,79	0,48	0,00
2018	53,31	45,23	1,46	0,00	0,00

Sumber: Susenas, 2013-2017, BPS

bidang sebesar 45,23 persen dan 1,46 persen persalinan dilangani oleh oleh tenaga medis lainnya seperti perawat. Berdasarkan sampel, sudah tidak ada kasus persalinan selama dua tahun terakhir referensi pencacahan yang ditangani oleh tenaga tradisional atau non kesehatan. Artinya, persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 100 persen dari jumlah seluruh persalinan.

Berdasarkan data Susenas pada bulan Maret 2018, sebagian besar proses persalinan bayi dilakukan di RS/RS bersalin dengan proporsi 76,5 persen. Proporsi terbesar berikutnya adalah persalinan di klinik/bidan/praktek dokter dan diikuti oleh Puskesmas/Polindes/Pustu. Fenomena ini menggambarkan sebagian besar rumah tangga sudah memiliki kemudahan dalam mengakses sarana kesehatan yang tersedia, terutama sarana untuk melakukan proses persalinan.

### Pemberian Air Susu Ibu

Peran ibu dalam menunjang kesehatan balita dapat dikaji menggunakan indikator lamanya menyusui anak berusia 2-4 tahun.

Tabel 4.2. Persentase Anak Usia di Bawah 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI di DIY, 2014-2017

Tahun	Wilayah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	98,83	98,34	98,67
2015	97,28	100	98,07
2016	99,10	96,99	98,52
2017	96,95	99,05	97,56

Sumber: Susenas, 2014-2017, BPS

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi, karena mengandung gizi yang tinggi dan zat pembentuk kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit. Manfaat lain yang diperoleh dari pemberian ASI antara lain dapat menumbuhkan ikatan batin dan kasih sayang antara ibu dan anak. Semakin lama pemberian ASI cenderung membuat daya tahan tubuh anak balitanya semakin baik.

Tabel 4.2 menyajikan data proporsi anak berusia di bawah dua tahun yang pernah diberi asupan ASI berdasarkan hasil Susenas. Secara umum, mayoritas anak berusia di bawah dua tahun telah menerima asupan ASI. Proporsi selama empat tahun terakhir sudah berada di atas 97 persen. Artinya, masih ada sekitar 1-3 persen anak yang belum pernah menerima pemberian ASI. Proporsi ini yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar untuk sosialisasi pentingnya ASI dan perlu digali lebih dalam alasan tidak memberi asupan ASI kepada bayi dan balitanya. Sementara, proporsi anak di bawah dua tahun yang masih menerima asupan ASI pada saat periode pendataan jumlahnya lebih dari 85 persen.

Tabel 2.3 menunjukkan distribusi balita berumur 2-4 tahun menurut lamanya

**Tabel 4.3. Distribusi Balita Berusia 2-4 Tahun di DIY menurut Lamanya Disusui, 2012-2014**

Tahun	Lama Disusui (Bulan)				
	≤5	6-11	12-17	18-23	≥24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	7,08	5,19	12,32	20,51	54,90
2013	5,33	4,92	7,62	20,30	61,84
2014	6,04	3,24	7,69	14,30	68,73

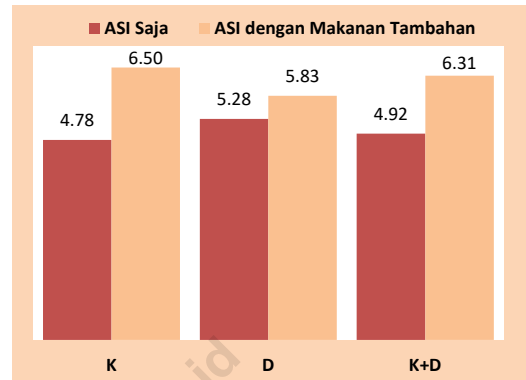
Sumber: Susenas, 2012-2014, BPS

disusui dalam satuan bulan selama periode 2012-2014. Secara Rata-rata, lama pemberian ASI kepada balita di DIY sudah cukup tinggi. Balita berusia 2-4 tahun yang disusui lebih dari 24 bulan persentasenya mengalami peningkatan dari 61,84 persen di tahun 2013 menjadi 68,73 persen di tahun 2014. Secara rata-rata, lamanya periode pemberian ASI mencapai 18 bulan. Hal ini menjadi gambaran yang cukup baik yang merepresentasikan peningkatan pemahaman ibu terkait manfaat pemberian ASI.

Periode pemberian ASI bagi bayi dapat dibagi menjadi dua, yakni ASI saja tanpa makanan tambahan (ASI Eksklusif) dan ASI dengan makanan tambahan. Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Kesehatan lama pemberian ASI eksklusif adalah enam bulan pertama pasca kelahiran. Semakin besar proporsi bayi yang memperoleh ASI eksklusif menggambarkan pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan bayi yang semakin meningkat. Pada akhirnya pengetahuan ini akan memberi pengaruh terhadap kekebalan bayi terhadap penyakit dan mengurangi kasus kematian bayi.

Berdasarkan data Susenas Maret 2016, anak berusia 6-24 bulan sebagian besar telah menerima asupan ASI eksklusif dengan periode yang bervariasi. Secara

**Gambar 4.4. Rata-rata Lama Bulan Balita di Bawah 2 Tahun Mendapat Asupan ASI, 2017**



Sumber : Susenas Maret 2017, BPS

rata-rata, periode pemberian ASI eksklusif tercatat sebesar 4,92 bulan. Artinya sudah mendekati ketentuan Kementerian Kesehatan yakni enam bulan. Rata-rata di daerah perdesaan (4,78 bulan) tercatat lebih rendah dari daerah perkotaan (5,28 bulan). Perbedaan ini disebabkan oleh faktor pendidikan perempuan di perkotaan yang cenderung lebih tinggi dari daerah perdesaan. Mereka memiliki waktu lebih panjang untuk merawat bayi dibandingkan dengan penduduk perdesaan.

Proporsi anak berusia 6-24 bulan di DIY yang diberi ASI eksklusif lebih selama enam bulan atau lebih mencapai 67,01 persen. Sisanya, sebanyak 32,99 persen diberi ASI eksklusif dengan periode pemberian kurang dari 6 bulan. Proporsi anak yang diberi ASI eksklusif selama 6 bulan atau lebih di daerah perdesaan terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan.

### Imunisasi

Selain pemberian ASI, pemberian imunisasi juga berperan dalam membentuk ketahanan tubuh anak dari serangan berbagai penyakit. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap.

Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DTP, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

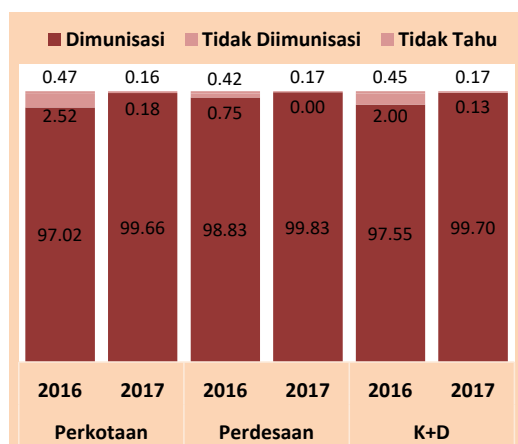
Dalam Susenas pertanyaan mengenai imunisasi ditanyakan kepada anggota rumah tangga berusia 0-59 bulan. Mekanisme penggalan data ditanyakan kepada orang tua atau anggota rumah tangga yang mengetahui riwayat imunisasi berdasarkan catatan dalam kartu imunisasi atau wawancara jika tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan kartu imunisasi. Namun demikian, data yang disajikan dalam publikasi ini dipilih dari anggota rumah tangga yang berusia 12-59 bulan. Pertimbangannya adalah imunisasi dasar tersebut diberikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga proses pemberian imunisasi kepada balita yang berusia kurang dari satu tahun belum bisa dievaluasi.

Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2017, proporsi balita berusia 12-59

bulan yang mendapat imunisasi tercatat mencapai 99,7 persen. Angka ini meningkat cukup nyata dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan sisanya, sebanyak 0,13 persen berstatus belum/tidak diimunisasi dan 0,17 persen responden menjawab tidak tahu mengenai riwayat imunisasi anak usia 12-59 tahun yang ada dalam rumah tangganya. Secara umum, tidak ada perbedaan yang mencolok terkait proporsi balita yang diberi imunisasi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Sayangnya, belum ada informasi tambahan dalam Susenas mengenai alasan balita yang tidak diimunisasi.

Proporsi balita usia 0-59 bulan yang memiliki kartu imunisasi dan mampu menunjukkannya tercatat sebesar 67,41 persen. Sisanya, sebanyak 29,43 persen mengaku memiliki kartu tetapi tidak bisa menunjukkannya dan 3,16 persen tidak memiliki kartu imunisasi. Berdasarkan data dari balita yang memiliki kartu imunisasi, tercatat sebanyak 77,91 persen balita sudah menerima imunisasi dasar secara lengkap (13 jenis imunisasi). Sementara, 23,77 persen sisanya belum menerima imunisasi dasar secara lengkap. Imunisasi dasar dianggap tidak lengkap jika ada salah satu dari 13 jenis imunisasi yang belum diberikan.

**Gambar 4.5. Persentase Anak berusia 12-59 Bulan yang Diberi Imunisasi di DIY, 2016-2017**



Sumber : Susenas Maret 2016-2017, BPS

### Keluhan Kesehatan

Derajat kesehatan penduduk dapat dilihat dari tingkat morbiditas (angka kesakitan) yang menunjukkan ada tidaknya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Keluhan dimaksud mengindikasikan adanya suatu penyakit tertentu.

Tabel 4.4. Persentase Penduduk DIY yang Mempunyai Keluhan Kesehatan (Persen), Aktivitas Terganggu (Persen), dan Lamannya Terganggu (Hari) Selama Sebulan yang Lalu, 2015-2018

Wilayah/ Jenis Kelamin	2015			2016			2017			2018		
	Mengalami Keluhan (%)	Aktivitas Terganggu (%)	Lama Terganggu (Hari)	Mengalami Keluhan (%)	Aktivitas Terganggu (%)	Lama Terganggu (Hari)	Mengalami Keluhan (%)	Aktivitas Terganggu (%)	Lama Terganggu (Hari)	Mengalami Keluhan (%)	Aktivitas Terganggu (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Wilayah	K	38.48	45.92	5.3	35.32	45.75	5.5	31.70	43.11	6.2	35.18	36.63
	D	41.77	52.25	5.4	37.38	51.83	5.3	35.75	52.71	5.0	35.68	50.33
	<b>K+D</b>	<b>39.58</b>	<b>48.16</b>	<b>5.4</b>	<b>35.98</b>	<b>47.77</b>	<b>5.4</b>	<b>32.90</b>	<b>46.21</b>	<b>5.8</b>	<b>35.32</b>	<b>40.37</b>
Jenis Kelamin	L	38.93	50.28	5.4	34.50	47.84	5.2	30.82	46.54	5.7	34.11	40.32
	P	40.22	46.16	5.3	37.42	47.70	5.6	34.95	45.92	5.8	36.50	40.41
	<b>L+P</b>	<b>39.58</b>	<b>48.16</b>	<b>5.4</b>	<b>35.98</b>	<b>47.77</b>	<b>5.4</b>	<b>32.90</b>	<b>46.21</b>	<b>5.8</b>	<b>35.32</b>	<b>40.37</b>

Sumber: Susenas Maret 2015-2018, BPS

Morbiditas atau angka kesakitan diukur menggunakan proporsi penduduk yang mengeluh sakit pada selang waktu tertentu. Dalam Susenas yang dilaksanakan oleh BPS, keluhan kesehatan yang dimaksud mencakup: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare/buang-buang air, sakit kepala, sakit gigi, campak, dan lain-lain. Referensi yang digunakan dalam Susenas adalah sebulan sebelum pencacahan. Semakin tinggi angka morbiditas menunjukkan semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.

Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh penduduk adalah batuk, pilek dan panas. Secara umum tingkat morbiditas penduduk selama 2015-2018 cenderung menurun, meskipun ada sedikit peningkatan pada kondisi Maret 2018. Besarnya proporsi penduduk DIY yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir referensi pencacahan pada bulan Maret 2018 mencapai 35,32 persen. Dibandingkan dengan kondisi Maret 2017, keluhan kesehatan yang dialami penduduk

sedikit meningkat. Namun jika diukur dari proporsi penduduk mengalami keluhan sakit sampai terganggu aktivitasnya terlihat semakin menurun. Proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai terganggu aktivitas sehari-harinya (pekerjaan, sekolah, dan lainnya) pada kondisi Maret 2017 tercatat sebesar 40,37 persen. Artinya, ada penurunan morbiditas secara umum atau kualitas kesehatan penduduk semakin meningkat.

Berdasarkan wilayah, keluhan kesehatan yang dialami penduduk perkotaan cenderung lebih rendah dari penduduk perdesaan. Demikian pula dengan proporsi penduduk yang terganggu aktivitasnya. Di wilayah perkotaan juga lebih rendah dari perdesaan. Secara umum, hal ini menggambarkan kualitas kesehatan penduduk perkotaan relatif lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Secara umum, angka keluhan kesehatan di kedua wilayah baik perkotaan maupun perdesaan selama periode 2015-2018 terlihat semakin menurun.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan yang cenderung lebih tinggi dari laki-laki. Pada kondisi Maret 2018, tingkat morbiditas perempuan mencapai 36,5 persen dan laki-laki sebesar 34,11 persen.

Rata-rata jumlah hari penduduk yang terganggu kesehatannya terlihat semakin meningkat hingga 5,8 hari pada kondisi Maret 2018. Secara umum, lama hari terganggu penduduk perkotaan lebih tinggi dari perdesaan. Sementara, lama hari terganggu penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

### Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dasar yang representatif, murah, dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. Upaya ini juga ditopang oleh pembentukan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta didukung oleh peran pihak swasta. Penyediaan fasilitas kesehatan juga disertai dengan distribusi tenaga kesehatan yang memadai, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Penduduk DIY yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik mengobati sendiri, rawat jalan, maupun rawat inap. Pada kondisi Maret 2018, 55,68 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan melakukan pengobatan sendiri menggunakan obat tradisional, obat pabrikan yang dijual eceran maupun di apotik. Proporsi penduduk yang mengobati sendiri terlihat meningkat dibandingkan dengan tahun 2017. Secara umum, proporsi penduduk perkotaan yang melakukan pengobatan sendiri lebih tinggi dari penduduk perdesaan dan penduduk laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Proporsi penduduk yang mengalami keluhan sakit dan berobat jalan pada kondisi Maret 2018 sebesar 50,34 persen. Proporsi ini cenderung menurun dalam empat tahun terakhir, karena semakin

**Tabel 4.5. Penduduk DIY yang Melakukan Pengobatan Sendiri dan Berobat Jalan Selama Sebulan yang Lalu, Serta Rawat Inap Selama Setahun yang Lalu menurut Wilayah dan Jenis kelamin, 2015-2018 (%)**

Wilayah/ Jenis Kelamin	Mengobati Sendiri		Berobat Jalan Sebulan Terakhir				Rawat Inap Setahun Terakhir				
	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Wilayah	K	58.25	68.76	51.35	50.80	51.97	47.80	5.63	6.09	6.01	6.46
	D	57.55	50.88	63.60	61.65	54.36	57.11	4.81	5.22	6.51	6.25
	<b>K+D</b>	<b>58.02</b>	<b>63.88</b>	<b>55.68</b>	<b>54.40</b>	<b>52.74</b>	<b>50.34</b>	<b>5.36</b>	<b>5.81</b>	<b>6.16</b>	<b>6.41</b>
Jenis Kelamin	L	60.15	64.88	54.79	52.00	49.54	48.69	5.04	4.79	5.52	5.34
	P	56.18	62.97	56.53	56.57	55.52	51.85	5.67	6.81	6.78	7.45
	<b>L+P</b>	<b>58.02</b>	<b>63.88</b>	<b>55.68</b>	<b>54.40</b>	<b>52.74</b>	<b>50.34</b>	<b>5.36</b>	<b>5.81</b>	<b>6.16</b>	<b>6.41</b>

Sumber: Susenas Maret 2015-2018, BPS

meningkatnya proporsi penduduk yang melakukan pengobatan sendiri. Alasan utama mereka yang tidak berobat jalan adalah melakukan mengobati sendiri (73,7 persen) dan merasa tidak perlu berobat (23,6 persen). Alasan yang lainnya adalah tidak punya biaya berobat, tidak ada biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi, dan alasan waktu tunggu pelayanan yang lama. Namun, proporsinya sangat kecil yakni dibawah satu persen dari keseluruhan penduduk yang mengalami keluhan sakit.

Penduduk yang berobat jalan pada umumnya memanfaatkan fasilitas berobat ke puskesmas dan praktik dokter/ bidan. Proporsi masing-masing tercatat sebesar 34,18persen dan 29,20 persen. Proporsi penduduk yang berobat jalan ke puskesmas/pustu tercatat semakin meningkat. Sementara, proporsi yang berobat jalan ke praktik dokter/bidan relatif menurun dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi penduduk yang berobat jalan rumah sakit dan klinik/praktik bersama

juga terlihat semakin meningkat. Secara umum, ada perubahan orientasi tempat berobat secara jalan dari praktek dokter/ klinik menuju puskesmas dan rumah sakit. Implementasi sistem jaminan kesehatan melalui BPJS yang semakin masif menjadi salah satu penyebab perpindahan orientasi penduduk DIY dalam berobat jalan.

Selain melakukan pengobatan jalan, upaya yang dilakukan oleh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan adalah melakukan pengobatan secara rawat inap. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, proporsi penduduk yang melakukan rawat inap selama setahun terakhir referensi pencacahan tercatat mencapai 6,4 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara demografis, proporsi penduduk yang berobat rawat inap didominasi oleh penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan penduduk perempuan. Secara rata-rata, lama perawatan secara inap tercatat selama 5-6 hari.

**Tabel 4.6. Penduduk DIY yang Berobat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Fasilitas/ Tempat, 2015-2018 (%)**

Fasilitas/Tempat Berobat Jalan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RS Pemerintah	7.35	9.13	8.97	7.85
RS Swasta	13.68	14.36	17.11	17.57
Praktik Dokter/Bidan	<b>42.07</b>	<b>38.39</b>	<b>36.22</b>	<b>29.20</b>
Klinik/Praktik Bersama	13.47	11.37	12.71	14.19
Puskesmas	27.18	30.75	30.27	34.18
UKBM	<b>0.84</b>	<b>0.50</b>	<b>1.05</b>	<b>1.93</b>
Tradisional	<b>1.16</b>	<b>1.20</b>	<b>1.17</b>	<b>1.29</b>
Lainnya	<b>0.82</b>	<b>0.68</b>	<b>0.25</b>	<b>0.83</b>

Sumber: Susenas, 2015-2018, BPS

**Tabel 4.7. Penduduk DIY yang Rawat Inap Selama Setahun yang Lalu menurut Fasilitas/ Tempat Dirawat, 2015-2018 (%)**

Fasilitas/Tempat Rawat Inap	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RS Pemerintah	35.59	31.13	27.83	33.61
RS Swasta	50.43	58.98	60.35	54.07
Praktik Dokter/Bidan	<b>3.66</b>	<b>3.24</b>	<b>4.26</b>	<b>4.26</b>
Klinik/Praktik Bersama	4.24	3.41	3.68	2.38
Puskesmas	6.96	6.10	5.41	7.42
UKBM	na	na	na	na
Tradisional	<b>0.23</b>	<b>0.31</b>	<b>0.32</b>	<b>0.56</b>
Lainnya	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>

Sumber: Susenas Maret 2015-2018, BPS



Fasilitas yang paling banyak digunakan penduduk DIY untuk rawat inap sampai tahun 2018 adalah rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Proporsi penduduk yang melakukan rawat inap di RS pemerintah selama setahun yang lalu mencapai 33,61 persen dan RS swasta sebesar 54,07 persen.

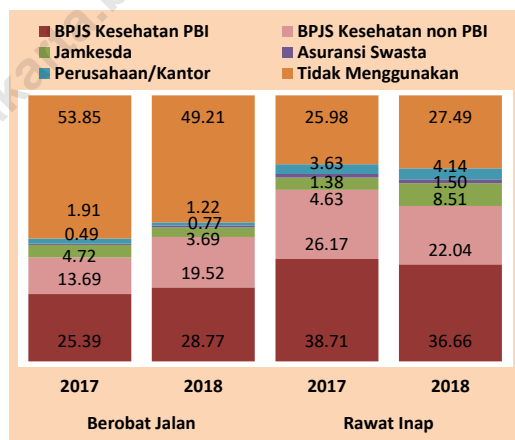
Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, sebagian besar penduduk yang berobat jalan memanfaatkan jaminan BPJS kesehatan baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non PBI. Tercatat sebanyak 28,77 persen penduduk yang berobat jalan telah memanfaatkan BPJS PBI dan 19,52 persen BPJS non PBI yang dimiliki. Pemanfaatan kedua jenis jaminan ini meningkat secara nyata dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara, penduduk yang berobat jalan tanpa jaminan program proporsinya masih sangat besar, yakni 49,21 persen di tahun 2018.

Pemanfaatan jaminan kesehatan untuk pengobatan rawat inap tercatat lebih tinggi daripada berobat jalan. Proporsi penduduk yang memanfaatkan BPJS kesehatan PBI untuk rawat inap mencapai 36,66 persen dan BPJS non PBI sebesar 22,04 persen. Secara proporsi, pemanfaatan kedua jenis jaminan ini terlihat sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terkait dengan perubahan kebijakan pemanfaatan jaminan terkait cakupan jenis penyakit, tingkat kedaruratan, dan sistem rujukan berjenjang dalam pemanfaatan BPJS kesehatan. Proporsi terbesar berikutnya adalah penduduk yang melakukan rawat inap menggunakan jamkesda.

Fenomena yang cukup menarik adalah masih cukup banyak penduduk yang belum tercakup atau belum memiliki jaminan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

Hal ini terlihat dari penduduk yang berobat maupun rawat inap tanpa menggunakan jaminan kesehatan apapun dengan proporsi mencapai 27,49 persen. Perlu digali secara lebih dalam alasan mereka tidak memanfaatkan jaminan yang dimiliki atau alasan tidak mengikuti program jaminan kesehatan. Proporsi ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah melalui BPJS agar visi untuk menjamin kesehatan penduduk secara berkualitas, mudah, dan murah bisa benar-benar terlaksana dengan baik.

Gambar 4.6. Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Berobat jalan dan Rawat Inap di DIY, 2017-2018 (Persen)



Sumber : Susenas Maret 2017-2018, BPS

Bab **V**



Indikator  
Pendidikan



# Indikator Pendidikan

Tantangan terbesar pembangunan pendidikan di Indonesia adalah aspek pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing, tata kelola dan pembiayaan.

Salah satu tujuan negara yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah yang ditempuh untuk mewujudkannya melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non formal. Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang sama pentingnya dengan investasi modal fisik untuk mencapai tujuan ekonomi jangka panjang suatu negara (Mankiw, 2007). Output dari proses pendidikan adalah untuk menambah dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemandirian dan kepribadian yang merupakan modal dasar yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Menurut Todaro (2004), pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan bukan sekedar hak azasi manusia, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya.

Pendidikan merupakan bentuk aktivitas penyediaan barang/jasa publik, sehingga membutuhkan campur tangan pemerintah. Kebijakan fiskal diyakini merupakan intervensi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah untuk pemenuhan pelayanan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi kewajiban pemerintah melalui penyediaan infrastruktur pendidikan, tenaga pengajar, kegiatan belajar mengajar, maupun pembiayaannya. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan waktu pihak swasta juga bisa ikut berpartisipasi dalam aktivitas penyediaan pendidikan mulai pra sekolah sampai pendidikan tinggi. Pengeluaran pemerintah dalam pelayanan kebutuhan dasar terutama pendidikan, merupakan bentuk investasi terhadap sumber daya manusia karena dapat meningkatkan produktivitas masyarakat di masa mendatang. Harapannya dengan produktivitas yang semakin tinggi maka tingkat pendapatan yang diterima masyarakat akan meningkat dan kesejahteraannya juga akan terangkat.

Dalam beberapa tahun mendatang pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan, tantangan tersebut mencakup: (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (c) penataan tata

kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ada beberapa sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ingin dicapai melalui Program Indonesia Pintar dengan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Sasaran tersebut antara lain ditandai oleh meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah; meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan; meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sasaran yang lain adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif; serta meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Beberapa indikator output yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kualitas pendidikan SDM antara lain adalah Angka Melek Huruf (AMH), tingkat pendidikan tertinggi penduduk, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Sementara, indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

### Angka Melek Huruf (AMH)

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut

peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (Literacy Rate). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis (BPS, 2011). Angka Melek Huruf (AMH) adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan pada masa lampau.

Dalam Susenas, kemampuan baca tulis dibedakan menjadi huruf latin dan lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, huruf latin masih merupakan satu-satunya huruf yang dominan digunakan, sehingga dalam uraian ini ditekankan pada kemampuan baca tulis huruf latin.

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis. Dalam kenyataannya, sampai dengan tahun 2018 masih ada sekitar 5,17 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di DIY yang tidak dapat membaca dan atau menulis. Hal ini berarti capaian angka melek huruf di DIY adalah sebesar 94,83 persen. Dari 100 penduduk usia 15 tahun

**Tabel 5.1. Angka Melek Huruf (AMH) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia DIY, 2013-2018 (Persen)**

Jenis Kelamin/Kelompok Usia		2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin	Laki-laki	96.74	96.99	97.35	97.21	97.34	97.09
	Perempuan	89.06	91.98	91.78	92.07	92.05	92.66
	Laki-laki+Perempuan	92.82	94.44	94.50	94.59	94.64	94.83
Kelompok Usia	15+ Tahun	92.82	94.44	94.50	94.59	94.64	94.83
	15-44 Tahun	99.80	99.91	99.81	99.87	99.80	99.91
	45+ Tahun	82.47	86.29	87.20	87.37	87.62	87.94

Sumber: Susenas 2013-2018, BPS

ke atas sekitar 94-95 orang sudah mampu membaca dan menulis. Sedangkan sisanya 5-6 orang berstatus buta huruf atau tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Perkembangan AMH dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin meningkat secara bertahap.

Secara umum, angka melek huruf penduduk laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Level AMH penduduk laki-laki di tahun 2018 sudah mencapai 97,09 persen. Sementara, level AMH penduduk perempuan sebesar 92,66 persen. Dalam beberapa tahun terakhir gap atau selisih AMH antara penduduk laki-laki dan perempuan terlihat semakin berkurang. Perbandingan AMH menurut wilayah menunjukkan bahwa AMH penduduk perkotaan cenderung lebih tinggi dari AMH penduduk perdesaan. Sementara, jika dikaji menurut kelompok usia maka akan terlihat lebih jelas penyebab relatif rendahnya AMH di DIY disebabkan oleh persoalan rendahnya AMH pada kelompok usia tua (45 tahun ke atas). Pada tahun 2018, AMH usia 45 tahun ke atas mencapai 87,94 persen. Sementara, AMH pada kelompok usia muda (15-44 tahun) sudah mendekati 100 persen, tepatnya

99,91 persen. Secara umum fenomena ini dipengaruhi oleh besarnya komposisi penduduk berusia tua akibat tingginya angka harapan hidup penduduk DIY. Di satu sisi hal ini menjadi sebuah kelebihan. Namun, di sisi yang lain memberi persoalan pada tingginya angka buta huruf, karena cukup banyak lansia yang statusnya buta huruf. Namun demikian, AMH penduduk berusia tua akan cenderung meningkat secara alamiah.

### Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Daya saing suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas SDM yang dimiliki sebagai salah satu modal dasar pembangunan bangsa. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas pengetahuan serta ketrampilan/keahlian yang tinggi. Semakin meningkat keterampilan/keahlian, maka semakin berkualitas modal yang dimiliki penduduk untuk bersaing dalam konstelasi tenaga kerja. Namun demikian, ijazah yang dimiliki terkadang bukan menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang selalu perlu dilatih dan

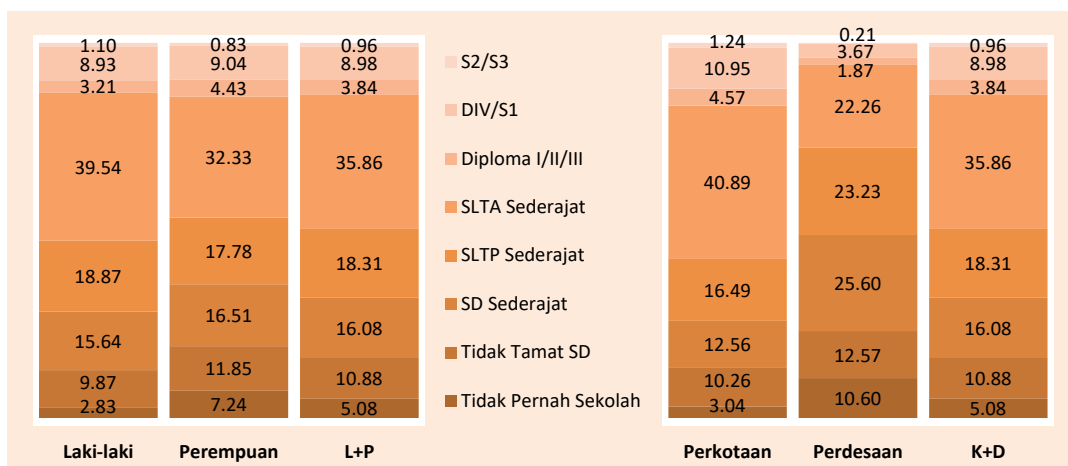
dipraktekkan dalam dunia kerja.

Komposisi penduduk berusia 15 tahun ke atas di DIY menurut ijazah tertinggi yang dimiliki pada kondisi Maret 2018 disajikan dalam Gambar 5.1. Secara umum, sebagian besar penduduk berusia kerja telah mengenyam pendidikan pada jenjang SLTA. Proporsi penduduk yang berijazah SLTA sederajat mencapai 35,86 persen. Komposisi terbesar berikutnya adalah penduduk yang berijazah SLTP sederajat dan SD sederajat dengan proporsi masing-masing mencapai 18,31 persen dan 16,08 persen. Penduduk yang berijazah diploma, sarjana, dan pasca sarjana tercatat sebesar 13,78 persen. Namun demikian, terlihat masih cukup besar proporsi penduduk yang tidak memiliki ijazah. Kelompok ini terdiri dari mereka yang berstatus tidak/belum tamat SD dan tidak/belum pernah sekolah. Proporsi masing-masing mencapai 5,08 persen dan 10,88 persen. Secara umum, penduduk yang tidak memiliki ijazah ini didominasi oleh penduduk berusia tua. Seiring dengan perkembangan waktu komposisi kelompok ini cenderung berkurang.

Dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, komposisi penduduk yang berijazah SLTA ke atas tercatat semakin meningkat. Sebaliknya, proporsi penduduk yang berijazah SLTP sederajat ke bawah semakin menurun. Hal ini menggambarkan adanya kenaikan level pendidikan penduduk akibat meningkatnya partisipasi sekolah terutama pada tingkat menengah dan tinggi. Di sisi yang lain, proporsi penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan belum/tidak tamat SD juga semakin berkurang. Hal ini juga menggambarkan adanya proses kenaikan level pendidikan penduduk akibat meningkatnya angka partisipasi pada jenjang pendidikan dasar dan berkurangnya populasi penduduk tua secara alamiah karena kematian.

Komposisi penduduk berusia kerja berdasarkan ijazah tertinggi dan jenis kelamin menunjukkan pola yang hampir sama. Baik laki-laki maupun perempuan didominasi oleh mereka yang berijazah SLTA ke atas. Proporsinya adalah 52,79 persen untuk laki-laki dan 46,62 persen untuk perempuan. Gap proporsi yang cukup besar ini menggambarkan masih adanya

**Gambar 5.1. Distribusi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Jenis Kelamin dan Wilayah, 2018 (Persen)**



Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2018, BPS

ketimpangan gender dalam pembangunan pendidikan di masa lampau, meskipun dalam perkembangannya nilai gapnya semakin mengecil.

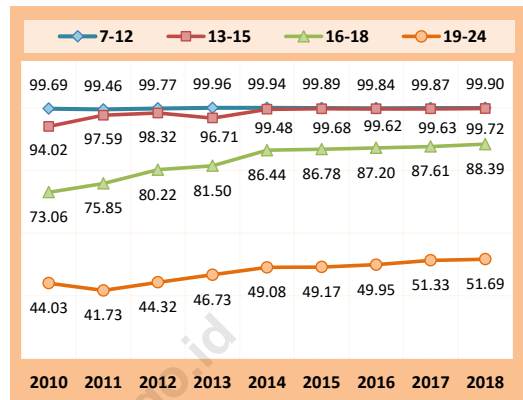
Komposisi penduduk berusia kerja menurut ijazah tertinggi dan wilayah terlihat cukup kontras. Di wilayah perkotaan, penduduk yang berijazah SLTA ke atas atau berpendidikan tinggi proporsinya mencapai 57,65 persen dan lebih mendominasi. Sementara, proporsi penduduk berijazah SLTA ke atas di wilayah perdesaan hanya tercatat sebesar 28 persen. Artinya, struktur penduduk di wilayah perdesaan lebih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah atau SLTP ke bawah. Gap yang cukup besar ini juga menggambarkan adanya ketimpangan dalam pembangunan pendidikan antar wilayah di DIY pada masa lalu. Berdasarkan perkembangan data dalam beberapa tahun terakhir gap atau selisih ini semakin mengecil.

**Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian pendidikan dari sisi proses. APS digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Perkembangan APS penduduk DIY pada semua kelompok usia selama satu dekade terakhir terlihat semakin meningkat secara bertahap. Secara umum, APS memiliki pola semakin menurun seiring

**Gambar 5.2. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia di DIY, 2010-2018 (Persen)**



Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2018, BPS

dengan peningkatan kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan (Tabel 5.2). Artinya, APS penduduk usia 7-12 tahun > usia 13-15 tahun > usia 16-18 tahun > usia 19-24 tahun. APS penduduk berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun sudah mendekati level 100 persen.

APS usia 7-12 tahun berada pada posisi 99,9 persen di tahun 2018. Artinya, masih ada sekitar 0,1 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang belum mulai mengikuti pendidikan formal karena terlambat masuk sekolah. Sementara, APS usia 13-15 tahun berada pada posisi 99,72 persen, artinya masih terdapat 0,28 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang statusnya sudah tidak bersekolah lagi atau putus sekolah karena berbagai alasan. Alasannya utamanya adalah faktor ekonomi seperti persoalan mahal biaya dan membantu ekonomi keluarga maupun alasan non ekonomi seperti kesulitan mengakses sekolah atau tidak mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

APS pada kelompok usia 16-18 tahun tercatat sebesar 88,4 persen, sementara APS kelompok usia 19-24 tahun tercatat



sebesar 51,7 persen. APS pada kelompok usia ini terlihat meningkat lebih cepat dalam satau dekade terakhir. Sementara, proporsi penduduk pada kedua kelompok ini yang statusnya sudah tidak bersekolah lagi atau putus sekolah masing-masing tercatat sebesar 11,61 persen untuk kelompok usia 16-18 tahun dan 48,17 persen untuk kelompok usia 19-24 tahun.

Relatif rendahnya APS pada kedua kelompok umur disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang paling berpengaruh adalah persoalan ekonomi, karena tidak semua biaya pendidikan di tingkat menengah dan tinggi dicover oleh pemerintah. Di samping itu, banyak juga penduduk pada kelompok usia tersebut yang sudah mulai masuk dalam pasar tenaga kerja (sebagai angkatan kerja) untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Sementara, alasan non ekonomis sangat terkait dengan kesulitan untuk mengakses sarana pendidikan tingkat menengah dan tinggi, merasa tidak mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar, serta cara pandang penduduk mengenai biaya dan manfaat yang diperoleh dari pendidikan yang dianggap belum setimpal.

Perbandingan APS menurut jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Perbedaan terlihat pada kelompok usia 16-18 atau pendidikan menengah dan kelompok usia 19-24 tahun atau pendidikan tinggi, dimana partisipasi sekolah penduduk perempuan sudah melebihi partisipasi sekolah penduduk laki-laki. Artinya, ketimpangan gender dalam memperoleh akses pendidikan sampai level menengah sudah tidak terjadi. Sementara, perbandingan APS menurut wilayah menunjukkan bahwa APS pada semua kelompok umur di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi

**Tabel 5.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Wilayah di DIY, 2018 (Persen)**

Jenis Kelamin/ Wilayah	Kelompok Usia					
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-24	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Jenis Kelamin	L	99.87	99.83	86.79	50.53	80.43
	P	99.93	99.59	90.15	52.84	80.51
	L+P	99.90	99.72	88.39	51.69	80.47
Wilayah	K	99.95	99.88	90.07	57.74	81.78
	D	99.76	99.26	83.64	22.14	76.13
	K+D	99.90	99.72	88.39	51.69	80.47

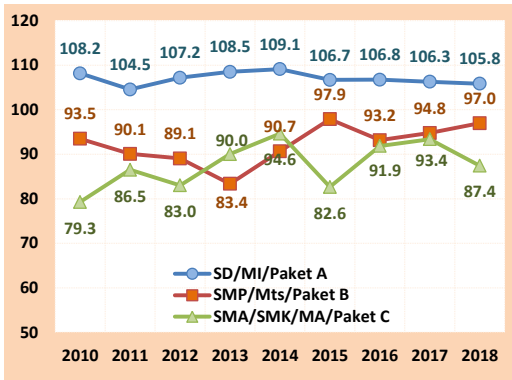
Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2018, BPS

dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun gap partisipasi sekolah terlihat sangat rendah. Namun, pada kelompok usia 16-18 gap partisipasi sekolah mencapai 6,34 persen dan pada kelompok usia 19-24 persen gapnya mencapai 35,6 persen. Hal ini menggambarkan adanya ketimpangan partisipasi sekolah antar wilayah terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

**Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) dan Partisipasi Sekolah Murni (APM)**

Indikator partisipasi sekolah yang lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia

Gambar 5.3. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) menurut Jenjang di DIY, 2010-2018 (Persen)



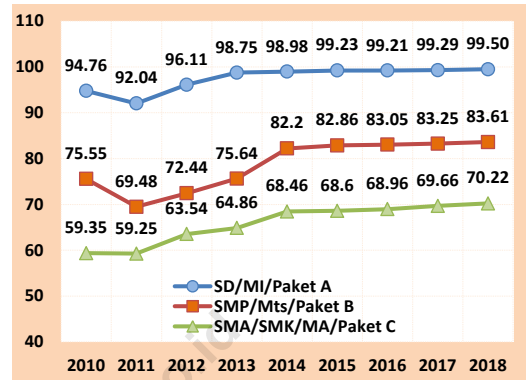
Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2010-2018, BPS

sekolah di masing-masing jenjang pendidikan terkait.

Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Hasil Susenas 2010-2018 menunjukkan bahwa APK di DIY untuk tingkat pendidikan SD selalu berada di atas 100 persen. Hal ini berarti penduduk yang bersekolah pada jenjang SD tidak hanya penduduk yang berusia pendidikan SD (7-12 tahun) saja. Tetapi, juga mencakup penduduk yang berusia di atas 12 tahun akibat terlambat masuk sekolah dan kasus tinggal kelas atau penduduk berusia di bawah 7 tahun karena masuk sekolah pada terlalu awal/dini. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa penduduk usia 7-12 tahun sudah bersekolah semua, karena APK tidak dapat mencerminkan besaran anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah.

APK SLTP sederajat pada kondisi Maret 2018 tercatat sebesar 97 persen. Hal ini berarti jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SLTP proporsinya hanya 97 persen dari jumlah penduduk pada kelompok usia SLTP.

Gambar 5.4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) menurut Jenjang di DIY, 2010-2018 (Persen)



Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2010-2018, BPS

Kemungkinan terdapat penduduk berusia SLTP yang masih menempuh pendidikan di jenjang SD, karena kasus terlambat sekolah dan tinggal kelas atau sudah bersekolah pada jenjang SLTA karena masuk sekolah terlalu muda.

Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung menggunakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan atau mengakses fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Jika seluruh penduduk yang berusia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK karena nilai APK juga mencakup penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Hasil Susenas 2018, menunjukkan

bahwa nilai APM semakin menurun sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Artinya,  $APM_{SD} < APM_{SLTP} < APM_{SLTA}$ . APM SD penduduk DIY pada tahun 2018 mencapai 99,5 persen. Angka ini menggambarkan besarnya proporsi penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SD. Artinya, masih ada 0,5 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SD karena terlambat masuk sekolah atau sudah bersekolah di jenjang SLTP. Perkembangan APM SD selama satu dekade terakhir sudah berada pada level mendekati 100 persen, artinya sudah mendekati kondisi ideal.

APM SLTP pada kondisi Maret 2018 tercatat sebesar 83,6 persen. Angka ini menggambarkan proporsi penduduk berusia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SLTP. Artinya, masih ada 16,4 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang statusnya tidak bersekolah pada jenjang SLTP. Jika dikaji lebih mendalam, maka tercatat sebanyak 8,2 persen penduduk berusia 13-15 tahun masih bersekolah pada jenjang SD karena kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah dan 7,9 persen sudah bersekolah pada jenjang SLTA karena terlalu cepat masuk sekolah. Sementara, sisanya sebanyak 0,28 persen berstatus belum pernah bersekolah dan sudah tidak bersekolah lagi atau putus sekolah. Perkembangan APM SLTP selama satu dekade terakhir terlihat semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya proses perbaikan kualitas kegiatan belajar mengajar di DIY.

APM SLTA tercatat pada level 70,2 persen dan angka ini meningkat secara bertahap dalam satu dekade terakhir. Angka 70,2 persen ini menggambarkan proporsi penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SLTA. Artinya, masih ada 29,8 persen penduduk

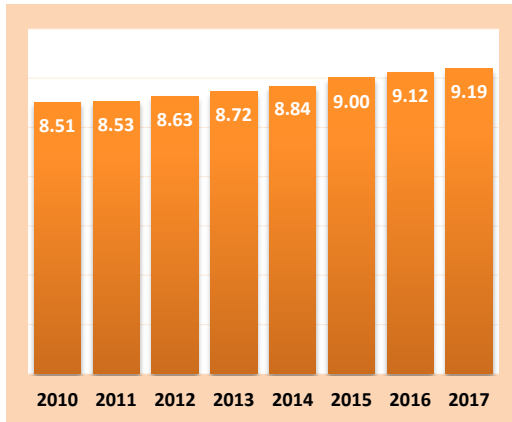
berusia 16-18 tahun yang sedang tidak bersekolah pada jenjang SLTA. Rinciannya adalah 14,4 persen masih bersekolah pada jenjang SLTP karena kasus terlambat masuk atau tinggal kelas dan 7,4 persen sudah bersekolah pada jenjang perguruan tinggi. Sementara, 7 persen yang lainnya berstatus putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan sekolah karena berbagai alasan baik motif ekonomi maupun non ekonomi. Perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan penyebab tingginya angka putus sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun agar proporsinya bisa dikurangi dari waktu ke waktu.

Perbandingan menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa APM perempuan cenderung lebih tinggi dari laki-laki pada semua jenjang pendidikan. Artinya, penduduk perempuan lebih tepat waktu dalam menempuh pendidikan sesuai dengan kelompok usianya. Sementara, perbandingan menurut wilayah menunjukkan bahwa APM penduduk perkotaan cenderung lebih tinggi dari perdesaan pada semua jenjang pendidikan. Artinya, penduduk perkotaan lebih tepat waktu dalam bersekolah dibandingkan dengan penduduk perdesaan.

### **Rata-rata Lama Sekolah**

Indikator pendidikan yang dapat menggambarkan kualitas pendidikan dari sisi capaian adalah rata-rata lama sekolah penduduk. Indikator ini dihitung menggunakan referensi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Asumsinya adalah kelompok penduduk ini telah menyelesaikan masa pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah penduduk menggambarkan stok modal manusia yang semakin meningkat. Harapannya adalah akan mampu meningkatkan kualitas dan keterampilan penduduk berusia kerja

**Gambar 5.5. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk DIY, 2010-2018 (Tahun)**



Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2010-2018, BPS

yang mendorong kenaikan produktivitas dan pada akhirnya akan mengangkat kesejahteraan penduduk.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja di DIY selama periode 2010-2018 terlihat semakin meningkat secara bertahap. Capaian pada tahun 2017 berada pada level 9,19 tahun. Artinya, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas adalah 9 tahun atau setara dengan tamat SLTP. Secara umum, hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas manusia dari sisi pendidikan. Dibandingkan dengan provinsi lainnya, capaian rata-rata lama sekolah penduduk DIY berada pada kelompok tertinggi.

### Infrastruktur Pendidikan

Ketersediaan sarana dan infrastruktur pendidikan menjadi kekuatan awal dalam membangun kualitas SDM. Ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif akan mempengaruhi efektifitas dan kualitas proses belajar mengajar dan pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Ketersediaan fasilitas sekolah, guru, dan

kelas yang ideal dengan jumlah siswa akan memacu kualitas keluaran yang maksimal. Sebaliknya, ketersediaan fasilitas yang tidak mencukupi akan memberikan kualitas hasil didik yang berada di bawah standar. Tingkat pemerataan dan perluasan akses pendidikan dapat diukur menggunakan indikator rasio murid-guru dan rasio murid-kelas. Kecukupan fasilitas pendidikan yang tersebar secara merata akan mendorong peningkatan APS dan APM.

Tabel 5.3 menyajikan rasio beban kerja guru serta rata-rata kepadatan kelas pada setiap jenjang pendidikan. Secara umum, rasio murid-guru pada jenjang pendidikan SD, SLTP, maupun SLTA di wilayah DIY masih berada dalam taraf ideal. Artinya, masih memenuhi persyaratan bagi seorang guru untuk bisa mengawasi dan memberi perhatian kepada murid, serta menjaga mutu pengajaran tetap berjalan dengan baik. Demikian pula dengan kapasitas kelas pada setiap jenjang pendidikan, masih memenuhi taraf ideal untuk menampung jumlah peserta didik atau tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal. Namun demikian, ukuran tersebut bersifat rata-rata dan belum mencerminkan sebaran sarana kelas dan tenaga pengajar antarwilayah.

Pada tahun ajaran 2017/2018 rasio murid-guru pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK masing-masing tercatat sebesar 15, 13, 10, dan 10. Angka sebesar 15 pada level SD memiliki makna rata-rata seorang guru pada tingkat SD memiliki beban untuk mengawasi dan memberi pengajaran kepada 14 orang peserta didik. Angka rasio murid-guru semakin menurun seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, rasio-murid-guru relatif stabil atau tidak mengalami perubahan secara

Tabel 5.3. Perkembangan Rasio Murid-Kelas dan Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan di DIY, 2011/2012-2017/2018

Tahun	Rasio Murid-Kelas				Rasio Murid-Guru			
	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2011/2012	18	28	27	29	13	11	9	10
2012/2013	21	29	26	27	13	12	9	10
2013/2014	21	27	26	26	13	12	9	9
2014/2015	21	29	29	26	14	12	9	9
2015/2016	21	28	25	30	14	13	10	9
2016/2017 <sup>1)</sup>	21	28	26	29	15	13	10	10
2017/2018	21	28	26	29	15	13	10	10

Sumber: diolah dari data Disdikpora DIY

nyata. Sebagai catatan, rasio murid-guru pada jenjang SMA/MA dan SMK masih bersifat agregat dan belum mencerminkan rasio yang sesuai dengan jurusan dan mata pelajaran yang diampu.

Sementara, rasio murid-kelas pada tiap jenjang pendidikan juga masih berada dalam taraf ideal yakni 30 orang per kelas.

Pada tahun ajaran 2015/2016, angkanya sebesar 21, 28, 26, dan 29 murid per kelas untuk masing-masing jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio murid kelas ini juga tidak mengalami perubahan secara nyata.

Bab **M**



Indikator  
Angkatan Kerja



# Indikator Angkatan Kerja

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS merujuk pada rekomendasi dari *International Labor Organization* (ILO). Penduduk berusia produktif atau berusia kerja (15 tahun ke atas) dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan aktivitas utamanya yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang berstatus bekerja dan pengangguran. Sementara, bukan angkatan kerja mencakup penduduk yang statusnya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Pertumbuhan angkatan kerja secara alamiah memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian, pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru berjalan lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja yang tersedia mampu diserap oleh pasar tenaga kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini memicu persoalan ketenagakerjaan yang serius seperti pengangguran, persoalan sektor informal, setengah pengangguran, tingkat upah, kualitas hidup pekerja, dan lainnya. Tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran merupakan pemborosan sumber daya manusia yang menjadi beban keluarga dan masyarakat, menjadi sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan tingkat kriminal, serta dapat menghambat kinerja pembangunan dalam jangka panjang.

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan meliputi penciptaan lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai indikator angkatan kerja di DIY. Beberapa indikator yang disajikan mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta karakteristik penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, jumlah jam kerja, maupun status dalam pekerjaan utama.

## Komposisi Penduduk Usia Kerja

Berdasarkan hasil Sakernas bulan Februari 2018, jumlah penduduk berusia kerja di DIY tercatat sebanyak 2,97 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil Sakernas Agustus 2017, jumlah

Sasaran utama pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah meningkatkan penciptaan kesempatan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja.



Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di DIY menurut Aktivitas, 2010-2018 (000 jiwa)

Aktivitas	2016		2017		2018
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>2 097</b>	<b>2 099</b>	<b>2 116</b>	<b>2 117</b>	<b>2 142</b>
Bekerja	2 038	2 042	2 056	2 053	2 076
Pengangguran	59	57	60	64	66
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>807</b>	<b>818</b>	<b>823</b>	<b>843</b>	<b>824</b>
Sekolah	265	273	261	267	254
Mengurus RT	400	431	457	472	481
Lainnya	142	114	105	104	90
<b>Jumlah</b>	<b>2 904</b>	<b>2 918</b>	<b>2 939</b>	<b>2 960</b>	<b>2 966</b>

Sumber: Sakernas 2016-2018, BPS DIY

penduduk berusia kerja meningkat sebanyak 0,21 persen. Sementara, jika dibandingkan dengan Sakernas Februari 2017 jumlahnya sebesar 0,93 persen.

Komposisi angkatan kerja berdasarkan Sakernas Februari 2018 tercatat sebanyak 2,14 juta jiwa. Rinciannya adalah 2,08 juta jiwa berstatus bekerja dan 66 ribu jiwa berstatus menganggur. Kelompok bukan angkatan kerja tercatat sebanyak 824 ribu jiwa dengan rincian berstatus sekolah 254 ribu jiwa, mengurus rumah tangga 481 jiwa, dan lainnya 90 ribu jiwa.

### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur menggunakan proporsi jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) yang masuk dalam pasar kerja, baik berstatus bekerja maupun penganggur. Indikator ini disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memperlihatkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi serta menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu kegiatan perekonomian.

Tabel 6.2. Perkembangan TPAK DIY menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2010-2018 (Persen)

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin			Wilayah		
	L	P	L+P	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Feb'10	80.18	62.65	71.41	67.01	77.99	71.41
Ags'10	78.62	61.35	69.76	66.96	73.84	69.76
Feb'11	81.17	65.08	72.93	71.50	75.78	72.93
Ags'11	81.67	59.62	70.39	67.98	75.19	70.39
Feb'12	80.84	62.17	71.29	68.72	76.42	71.29
Ags'12	80.84	62.62	71.52	68.01	78.52	71.52
Feb'13	79.72	60.73	70.01	67.09	75.85	70.01
Ags'13	77.95	61.01	69.29	66.03	75.80	69.29
Feb'14	77.70	66.24	71.84	69.06	77.39	71.84
Ags'14	80.93	61.60	71.05	67.65	77.85	71.05
Feb'15	83.95	62.72	73.10	71.95	76.20	73.10
Ags'15	79.95	57.30	68.38	66.95	71.77	68.38
Feb'16	81.33	63.45	72.21	68.55	81.09	72.21
Ags'16	82.24	62.10	71.96	70.12	76.44	71.96
Feb'17	81.07	63.29	72.00	69.87	77.37	72.00
Ags'17	80.72	62.69	71.52	69.86	75.72	71.52
Feb'18	80.90	63.87	72.21	69.65	78.89	72.21

Sumber: Sakernas 2010-2018, BPS DIY

TPAK dihitung dan disajikan secara berkala pada dua titik, yakni bulan Februari dan Agustus setiap tahun. Perkembangan Perkembangan TPAK DIY selama periode 2010-2018 berfluktuasi pada level 68-73 persen. Secara umum, TPAK pada kondisi bulan Agustus cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bulan Februari. Hal ini disebabkan oleh siklus musiman budidaya tanaman pangan terutama padi yang mencapai puncak selama subround I (Januari-April) setiap tahun. Selama masa tersebut kesempatan kerja di sektor pertanian akan mengalami peningkatan.

TPAK DIY pada kondisi bulan Februari 2016 tercatat sebesar 72,21 persen. Angka ini menggambarkan besarnya penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik berstatus bekerja maupun

pengangguran. Level TPAK bulan Februari 2018 ini tercatat sedikit meningkat jika dibandingkan dengan TPAK kondisi bulan Agustus 2017 yang mencapai 71,52 persen maupun TPAK Februari 2016 yang mencapai 72,0 persen. Secara umum, peningkatan TPAK ini didorong oleh peningkatan TPAK penduduk perempuan terutama di wilayah perdesaan. Namun demikian, penurunan maupun peningkatan TPAK belum secara langsung menggambarkan kondisi baik atau buruknya kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. Peningkatan TPAK tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, apakah dipengaruhi oleh tingkat pengangguran atau oleh tingkat penyerapan tenaga kerja (penduduk yang berstatus bekerja) selama kurun waktu tersebut.

Pola perkembangan TPAK menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi dari perempuan. TPAK laki-laki selama periode 2010-2018 berfluktuasi pada kisaran 77-84 persen. Sementara, TPAK perempuan berada pada kisaran 57-64 persen. Fenomena ini mengindikasikan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian lebih tinggi atau lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Hal ini terjadi karena pengaruh faktor budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam tradisi masyarakat Jawa, sebagian besar aktivitas domestik untuk mengurus rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh perempuan. Sementara, kewajiban mencari nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab laki-laki. Dampaknya, secara proporsional jumlah perempuan yang masuk dalam angkatan kerja cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Perbandingan TPAK menurut wilayah menunjukkan ada kecenderungan TPAK perdesaan selalu lebih tinggi dari

perkotaan. TPAK perdesaan berfluktuasi pada level 71-81 persen, sementara TPAK perkotaan berfluktuasi pada level 66-72 persen. Lebih rendahnya TPAK perkotaan berkaitan dengan adanya kecenderungan penduduk perkotaan yang lebih memilih untuk menyelesaikan masa pendidikan sampai jenjang yang setinggi-tingginya sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Mereka juga lebih selektif dalam memilih bidang pekerjaan yang sesuai keterampilan dan pendidikan yang dimiliki. Sementara, penduduk perdesaan memiliki lama bersekolah yang relatif lebih pendek. Mereka merasa sudah cukup untuk menyelesaikan jenjang pendidikan dasar atau menengah kemudian masuk pasar tenaga kerja untuk membantu ekonomi keluarga, meskipun statusnya hanya sebagai pekerja keluarga atau bekerja di sektor informal. Konsekuensinya, jumlah jam kerjanya relatif pendek dan produktivitas pekerjaanya juga lebih rendah.

Lebih rendahnya TPAK perkotaan juga dipengaruhi oleh partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Keterlibatan perempuan di daerah perdesaan pada kegiatan perekonomian khususnya di sektor pertanian terlihat lebih masif. Sementara, penduduk perempuan di daerah perkotaan cenderung memilih pekerjaan domestik untuk mengurus dan mengelola rumah tangga.

Pola TPAK menurut kelompok umur memiliki pola seperti huruf "U terbalik". Artinya, level TPAK rendah pada kelompok usia 15-19 tahun karena umumnya masih berpartisipasi sekolah. TPAK semakin meningkat hingga level tertinggi pada kelompok usia 40-54 tahun. Pada kelompok usia berikutnya, TPAK kembali menurun seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang mulai memasuki masa pensiun.

### Komposisi Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

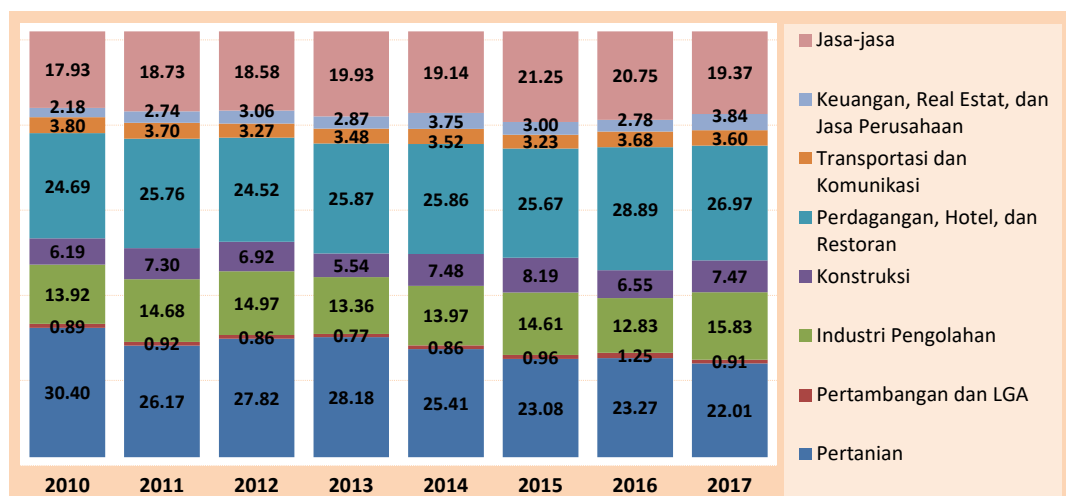
Distribusi penduduk bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran lapangan usaha mana saja yang dominan dalam menyerap tenaga kerja.

Pasar tenaga kerja di DIY sampai tahun 2018 didominasi oleh lapangan usaha pada empat sektor, yakni pertanian; industri pengolahan; perdagangan, hotel, dan restoran; dan jasa-jasa. Sektor pertanian pada awal masa pembangunan memiliki peranan paling dominan dalam menyerap angkatan kerja, terutama di kawasan perdesaan. Namun, seiring dengan proses pembangunan andil tersebut secara berangsur-angsur mengalami penurunan dan mulai tergantikan oleh lapangan usaha sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian yang semakin menurun dari 30,4 persen pada tahun 2010 menjadi 22,01 persen di tahun 2017.

Secara umum, penurunan penduduk yang bekerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh laju pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Kondisi ini juga diperparah oleh derasnya laju konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan pemukiman, industri, maupun infrastruktur lainnya. Selain itu, rendahnya tingkat upah pekerja pertanian dan tingkat pengembalian usaha yang lebih rendah dari sektor lain juga berpengaruh terhadap rendahnya minat angkatan kerja untuk masuk ke sektor pertanian. Fenomena yang terjadi adalah terjadi migrasi pekerja dari sektor pertanian menuju sektor lainnya.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran sejak tahun 2014 sudah mulai menggantikan peranan sektor pertanian dalam menyerap angkatan kerja di DIY. Kontribusi lapangan usaha ini terus meningkat secara nyata. Pada bulan Agustus 2010, sektor ini mampu menyerap 24,69 persen angkatan kerja dan meningkat menjadi 26,97 persen pada tahun 2017. Kondisi yang hampir sama juga terjadi

Gambar 6.1. Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Lapangan Usaha, 2010-2017 (Persen)



Sumber: Sakernas bulan Agustus 2010-2017, BPS DIY

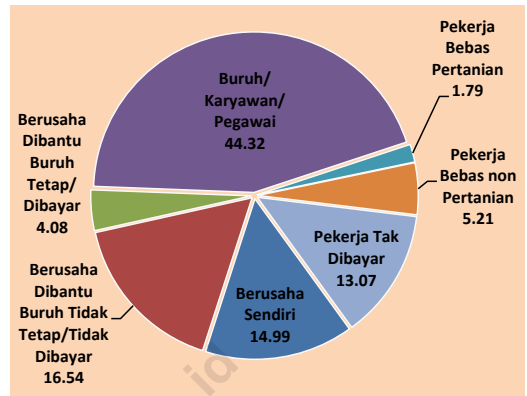
pada lapangan usaha di sektor jasa-jasa. Kontribusi dalam menyerap angkatan kerja yang dimiliki oleh lapangan usaha ini mengalami peningkatan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan. Lapangan usaha industri pengolahan memiliki kontribusi menyerap angkatan kerja yang berfluktuasi antara 12-15 persen selama periode 2010-2017. Pada tahun 2017, kontribusi sektor industri pengolahan tercatat sebesar 15,83 persen dan terlihat sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara, empat lapangan usaha yang lainnya, yakni pertambangan, listrik, gas dan air bersih; konstruksi; angkutan dan komunikasi; dan keuangan memiliki kontribusi menyerap angkatan kerja yang berfluktuasi di bawah 10 persen.

**Komposisi Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama**

Indikator untuk melihat gambaran tentang status/kedudukan pekerja dalam aktivitas pekerjaan yang dijalani adalah distribusi pekerja menurut status pekerjaan utama. Berdasarkan status dalam pekerjaan utama dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar penduduk bekerja di DIY berstatus sebagai buruh/karyawan. Proporsi pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai pada kondisi Februari 2018 mencapai 44,32 persen. Proporsi ini tercatat sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun Agustus 2017.

Komposisi terbesar berikutnya adalah penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar dan berstatus berusaha sendiri. Pada kondisi Februari 2018, proporsi yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar mencapai 16,54 persen dan sedikit menurun dibandingkan dengan

Gambar 6.2. Distribusi Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di DIY, 2018 (%)



Sumber: Sakernas bulan Februari 2018, BPS DIY

Februari dan Agustus 2017. Proporsi pekerja yang berstatus berusaha sendiri mencapai 14,99 persen dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sementara, proporsi penduduk yang bersatus berusaha dibantu buruh tetap hanya sebesar 4,08 persen dan relatif stabil dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Fenomena ini menggambarkan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang cenderung menurun dan mereka lebih tertarik untuk masuk pasar tenaga kerja dengan status sebagai buruh/pekerja/karyawan dibayar.

Proporsi penduduk bekerja yang berstatus sebagai pekerja bebas/lepas di sektor pertanian dan non pertanian masing-masing sebesar 1,79 persen dan 5,21 persen. Pekerja bebas non pertanian didominasi oleh pekerja pada sektor konstruksi. Sementara, proporsi pekerja bebas di sektor pertanian proporsinya semakin menurun. Secara kasar, penurunan proporsi pekerja bebas di sektor pertanian menggambarkan kondisi sektor pertanian yang semakin jenuh untuk menampung kelebihan angkatan kerja karena lambatnya peningkatan produktivitas dan derasnya arus konversi lahan pertanian. Akibatnya, terjadi perpindahan status dari pekerja

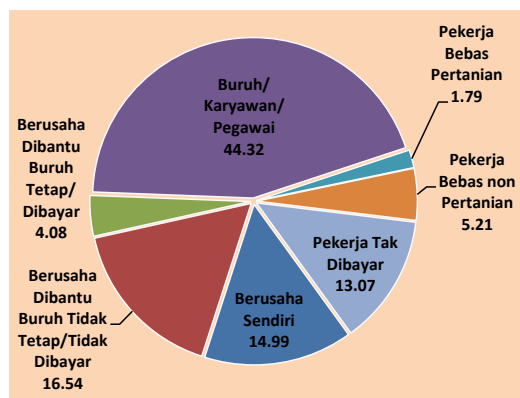
bebas di sektor pertanian menjadi pekerja lepas di sektor lainnya atau berubah menjadi pekerja tetap/buruh/pegawai. Komposisi pekerja tak dibayar dalam beberapa tahun terakhir tercatat semakin menurun hingga level 13,1 persen di bulan Februari 2018.

### Komposisi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan

Komposisi penduduk bekerja yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) dan tinggi (SLTA ke atas) di DIY hampir seimbang. Pada kondisi Februari 2018, pekerja yang berpendidikan SLTP ke bawah tercatat sebesar 46,6 persen. Sementara, pekerja yang berpendidikan SLTA ke atas mencapai 53,4 persen.

Perkembangan pekerja yang berpendidikan SLTA ke atas dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas pendidikan penduduk bekerja. Jika lebih dirinci, proporsi penduduk bekerja yang berpendidikan SD ke bawah masih cukup besar (13,8%). Sebagian besar dari kelompok ini merupakan pekerja berusia tua dan umumnya terdapat di kawasan perdesaan pada lapangan usaha pertanian. Komposisi pekerja berpendidikan SLTA dan

Gambar 6.3. Distribusi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi di DIY, 2018 (%)



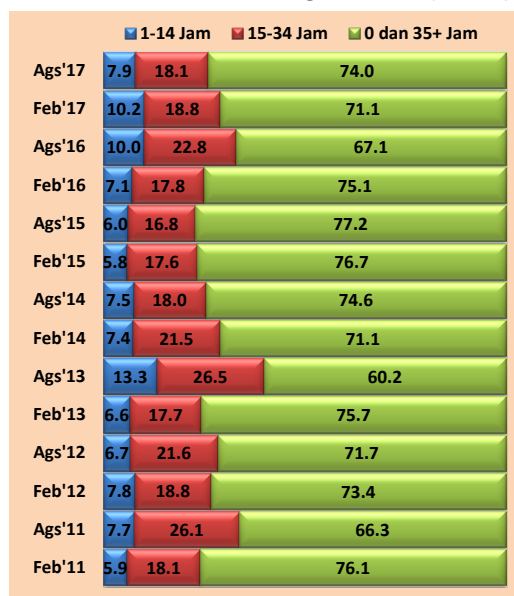
Sumber: Sakernas bulan Februari 2018, BPS DIY

diploma/universitas terlihat cukup dominan dan cenderung meningkat. Pada kondisi Februari 2018, proporsi keduanya mencapai 36,3 persen dan 17,1 persen. Berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk wanita lebih dominan pada jenjang pendidikan SD ke bawah dan jenjang akademi/universitas. Sementara, pada jenjang menengah (SLTP/SLTA) proporsi pekerja laki-laki terlihat lebih dominan.

### Komposisi Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu

Isu ketenagakerjaan yang cukup menarik untuk dikaji adalah komposisi pekerja menurut jumlah jam kerja selama satu minggu. Struktur penduduk bekerja di DIY menurut jumlah jam kerja selama seminggu terlihat cukup dinamis. Komposisi penduduk yang memiliki jam kerja di atas 35 jam per minggu atau bekerja secara penuh terlihat mendominasi. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2018, proporsi pekerja

Gambar 6.4. Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu, Februari 2011-Agustus 2017 (Persen)

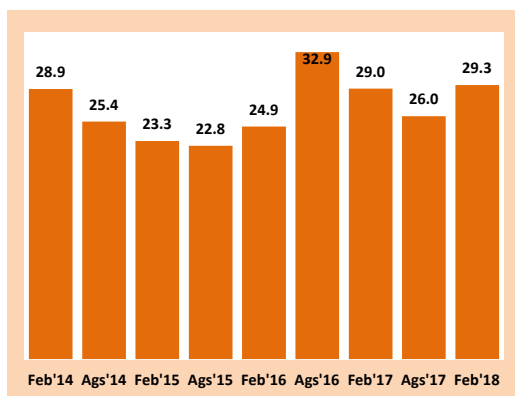


Sumber: Sakernas 2011-2017, BPS DIY

penuh tercatat mencapai 70,7 persen dan sedikit menurun jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2017 yang mencapai 74,0 persen. Secara umum, pekerja penuh di daerah perkotaan proporsinya lebih besar dibandingkan dengan pekerja penuh di daerah perdesaan. Hal ini terjadi karena jenis pekerjaan formal sebagian besar terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan jenis kelamin proporsi laki-laki yang berstatus pekerja penuh juga lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang bekerja penuh.

Proporsi pekerja tak penuh atau yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam dalam seminggu) selama periode 2014-2018 berfluktuasi antara 23-33 persen. Jika lebih dirinci, maka masih terdapat 7,9 persen penduduk bekerja yang memiliki jam kerja 1-14 jam seminggu dibulan Agustus 2017. Proporsi pekerja tak penuh juga bisa dinci menjadi setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Setengah pengangguran jika jika masih mencari pekerjaan atau mau bekerja/menerima pekerjaan jika ada tawaran pekerjaan lain. Sementara, pekerja paruh waktu jika statusnya tidak mencari pekerjaan lain. Pada kondisi Februari 2018, proporsi pekerja tak

Gambar 6.5. Perkembangan Proporsi Pekerja Tak Penuh di DIY, 2014-2018 (Persen)



Sumber: Sakernas Februari 2014-2018, BPS DIY

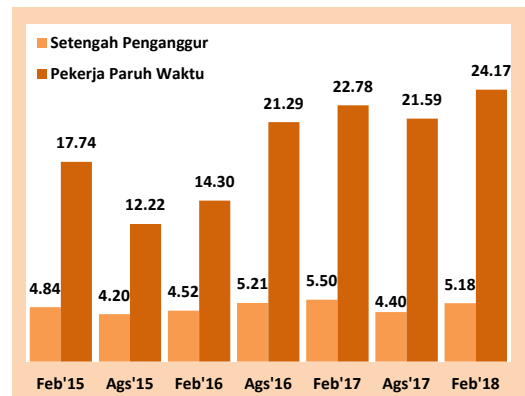
penuh tercatat sebesar 29,3 persen dan relatif sama dengan kondisi Februari 2017.

### Komposisi Pekerja Paruh Waktu dan Setengah Pengangguran

Komposisi pekerja tak penuh yang termasuk dalam kategori setengah penganggur pada kondisi Februari 2018 proporsinya mencapai 5,18 persen. Proporsi tingkat setengah pengangguran ini sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi Agustus 2017, namun sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2017. Secara umum, tingkat setengah pengangguran di perkotaan lebih tinggi dari perdesaan. Artinya, para pekerja di perkotaan memiliki mobilitas yang lebih tinggi untuk mencari pekerjaan tambahan atau baru dengan upah yang lebih tinggi sesuai harapan. Sementara, setengah penganggur perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Proporsi pekerja paruh waktu pada kondisi Februari 2018 mencapai 24,17 persen. Angka ini meningkat secara nyata dalam lima tahun terakhir. Proporsi pekerja paruh waktu di perdesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. Alasannya mereka lebih pasif untuk tidak mencari

Gambar 6.6. Proporsi Setengah Penganggur dan Pekerja Paruh Waktu di DIY, 2015-2018



Sumber: Sakernas Februari 2015-2018, BPS DIY

pekerjaan tambahan atau pekerjaan baru dibandingkan dengan penduduk perkotaan.

### Tingkat Pengangguran Terbuka

Menganggur adalah kondisi seseorang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha. Termasuk dalam kategori menganggur adalah penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau putus asa (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*). Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya penganggur dengan jumlah angkatan kerja atau proporsi penganggur terhadap angkatan kerja. Peningkatan TPT menggambarkan adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau menggambarkan kecepatan laju pertumbuhan kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Perkembangan TPT DIY selama periode 2010-2018 memiliki kecenderungan yang semakin menurun dengan level yang berfluktuasi antara 2,72 persen sampai 6,02 persen. TPT DIY pada kondisi bulan Februari 2018 tercatat sebesar 3,06 persen. Secara umum, angka tersebut memberi gambaran bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3 orang yang statusnya menganggur. Dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 2017 dan Februari 2017, TPT bulan Februari 2016 terlihat sedikit meningkat. Fluktuasi perubahan TPT antar periode sangat terkait dengan kondisi perekonomian DIY secara makro, terutama laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian melambat atau

mengalami resesi dan daya beli menurun, maka TPT cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami ekspansi dan daya beli penduduk meningkat, maka TPT cenderung menurun.

Perkembangan TPT menurut wilayah baik perkotaan dan perdesaan menunjukkan pola yang hampir sama. Namun, terdapat kecenderungan TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perdesaan. Pada kondisi Maret 2018 TPT perdesaan tercatat sebesar 1,06 persen dan TPT perkotaan sebesar 3,93 persen. Meskipun demikian, gap atau selisih antara kedua wilayah terlihat semakin mengecil dari tahun ke tahun. Secara kasar, fenomena relatif rendahnya TPT perdesaan menunjukkan bahwa

Tabel 6.3. Perkembangan TPT DIY menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2010-2018 (Persen)

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin			Wilayah		
	L	P	L+P	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Feb'10	7.10	4.63	6.02	7.42	4.21	6.02
Ags'10	6.19	5.08	5.69	6.97	4.01	5.69
Feb'11	6.27	4.64	5.53	5.86	4.90	5.53
Ags'11	4.14	4.55	4.32	5.13	2.86	4.32
Feb'12	4.91	2.76	3.95	4.84	2.36	3.95
Ags'12	3.96	3.74	3.86	4.73	2.37	3.86
Feb'13	3.22	4.37	3.73	4.45	2.47	3.73
Ags'13	3.59	2.81	3.24	3.93	2.04	3.24
Feb'14	2.67	1.60	2.16	2.68	1.24	2.16
Ags'14	3.88	2.65	3.33	4.00	2.17	3.33
Feb'15	5.23	2.59	4.07	5.30	0.95	4.07
Ags'15	3.72	4.54	4.07	4.55	3.02	4.07
Feb'16	3.56	1.90	2.81	3.54	1.32	2.81
Ags'16	3.68	1.50	2.72	2.79	2.55	2.72
Feb'17	2.86	2.81	2.84	3.56	1.20	2.84
Ags'17	3.46	2.48	3.02	3.61	1.66	3.02
Feb'18	2.88	3.28	3.06	3.93	1.06	3.06

Sumber: Sakernas 2010-2018, BPS DIY

angkatan kerja di daerah perdesaan lebih mudah masuk dalam pasar kerja. Hal ini terjadi karena pada umumnya mereka kurang selektif dalam menentukan jenis pekerjaan dibanding angkatan kerja perkotaan. Artinya, mereka akan menerima jenis pekerjaan apa saja termasuk bekerja di sektor informal, bekerja pada lapangan usaha di sektor pertanian, bahkan meski statusnya hanya sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Fenomena migrasi angkatan kerja baru pada kelompok terdidik dari daerah perdesaan menuju daerah perkotaan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan upah yang diharapkan juga memberi pengaruh terhadap perbedaan level TPT di kedua wilayah. Sementara, angkatan kerja baru

di daerah perkotaan lebih selektif dalam memilih lapangan usaha dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan maupun tingkat upah yang diharapkan. Lamanya waktu dalam mencocokkan jenis pekerjaan inilah yang mendorong TPT daerah perkotaan menjadi lebih tinggi, khususnya jenis pengangguran yang bersifat friksional.

Perbandingan TPT menurut jenis kelamin selama periode 2010-2018 menunjukkan pola yang lebih dinamis dan lebih berfluktuasi. Secara umum, TPT laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan yang semakin menurun selama periode tersebut. Pada bulan Februari 2018, level TPT penduduk perempuan tercatat sebesar 3,28 persen dan lebih tinggi dari TPT laki-laki yang sebesar 2,88 persen.



# Persoalan Pokok Ketenagakerjaan adalah Rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingginya Pengangguran



TPAK DIY bulan Februari 2018  
sebesar **72,21 %**

“ Proporsi penduduk yang terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja kondisi Februari 2018 mencapai 72,21 persen dan laki-laki lebih dominan “



TPAK Laki-laki **80,9%**



TPAK Perempuan **63,9%**

TPT DIY  
Feb 2018  
**3,06%**



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan



Bab **VII**



Indikator  
Konsumsi Penduduk



# Indikator Konsumsi Penduduk

Salah satu ukuran ekonomi yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara kuantitatif adalah level pendapatan yang diterima rumah tangga. Semakin tinggi level pendapatan menggambarkan kesejahteraan yang semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah pendapatan menggambarkan kesejahteraan yang semakin rendah. Namun demikian, dalam operasional di lapangan untuk mendapatkan data pendapatan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Kesadaran dan keterbukaan rumah tangga selaku responden/narasumber untuk memberikan informasi data pendapatan yang sebenarnya masih kurang. Akibatnya, data pendapatan rumah tangga seringkali *underestimate*. Oleh karena itu, digunakan pendekatan pengeluaran atau konsumsi (*consumption approach*) untuk mengukur taraf pendapatan rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga atau penduduk menjadi salah satu variabel sosial ekonomi yang sangat penting. Indikator turunannya adalah konsumsi perkapita penduduk. Perbandingan level konsumsi perkapita antarwilayah bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk antarwilayah. Demikian pula pertumbuhan konsumsi perkapita antarwaktu, akan menggambarkan adanya peningkatan atau penurunan kesejahteraan penduduk secara umum. Pola konsumsi penduduk sangat rentan dipengaruhi oleh faktor tingkat harga relatif, perubahan harga (inflasi/deflasi) komoditas yang dikonsumsi, faktor budaya, dan perilaku lingkungan. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat. Indikator pola konsumsi dapat diukur menggunakan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk komoditas makanan dan non makanan. Berdasarkan komposisi tersebut, dapat diukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

## Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk

Berdasarkan hasil Susenas Bulan Maret 2010-2018, nilai nominal pengeluaran perkapita penduduk DIY tercatat semakin meningkat. Pengeluaran perkapita dicatat dalam bentuk nilai nominal (atas dasar harga pasar yang berlaku) dan belum menggambarkan perubahan secara riil karena belum dikoreksi

Pola konsumsi penduduk antarwilayah mampu menggambarkan perbandingan tingkat kesejahteraan secara rata-rata, sementara perubahan konsumsi antarwaktu menggambarkan peningkatan atau penurunan kesejahteraan.

dengan unsur perubahan harga (inflasi). Nilai pengeluaran perkapita nominal penduduk DIY pada tahun 2010 berada pada level Rp554,- ribu. Nilai pengeluaran ini terus meningkat hingga ke level Rp1.303,- ribu di tahun 2018. Peningkatan pendapatan perkapita nominal ini secara kasar menggambarkan kesejahteraan penduduk DIY yang semakin membaik. Syaratnya adalah peningkatan pendapatan perkapita ini dinikmati oleh semua lapisan penduduk secara merata. Selama periode 2010-2018 pendapatan perkapita nominal penduduk DIY tumbuh sebesar 11 persen per tahun.

Perbandingan menurut wilayah menunjukkan level pengeluaran perkapita di wilayah perkotaan tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada kondisi Maret 2018, pengeluaran perkapita penduduk perkotaan tercatat mencapai Rp1,47,-juta. Seentara, pengeluaran perkapita penduduk perdesaan mencapai Rp840,-ribu. Perbedaan level ini menggambarkan kesejahteraan penduduk perkotaan yang secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan kesejahteraan penduduk

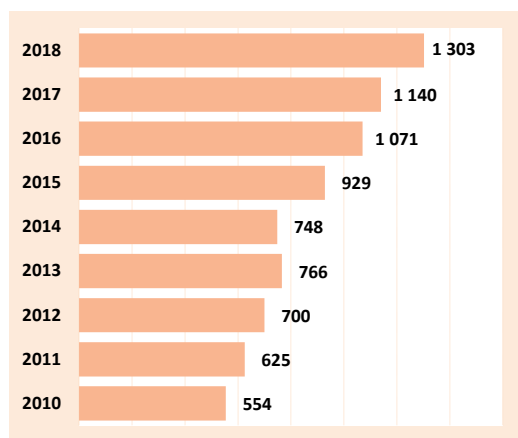
perdesaan. Kondisi ini menuntut peran pemerintah untuk lebih fokus dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk di kawasan perdesaan melalui kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi ke daerah pinggiran dan perdesaan.

### Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni komoditas makanan dan komoditas bukan makanan. Hukum Engel menyatakan bahwa semakin tinggi level pendapatan yang diterima oleh penduduk atau rumah tangga, maka akan semakin besar proporsi pengeluaran untuk kelompok non makanan. Sebaliknya, proporsi pengeluaran untuk kelompok makanan akan cenderung menurun.

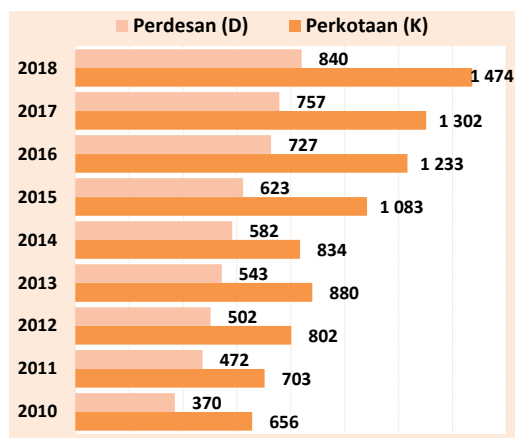
Secara umum, selama delapan tahun terakhir komposisi pengeluaran penduduk DIY sudah didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas non makanan. Komposisi pengeluaran untuk komoditas non makanan pada tahun 2018 mencapai 59,5 persen. Komposisi ini cenderung meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Sementara,

Gambar 7.1. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Penduduk DIY, 2010-2018 (000 Rp)



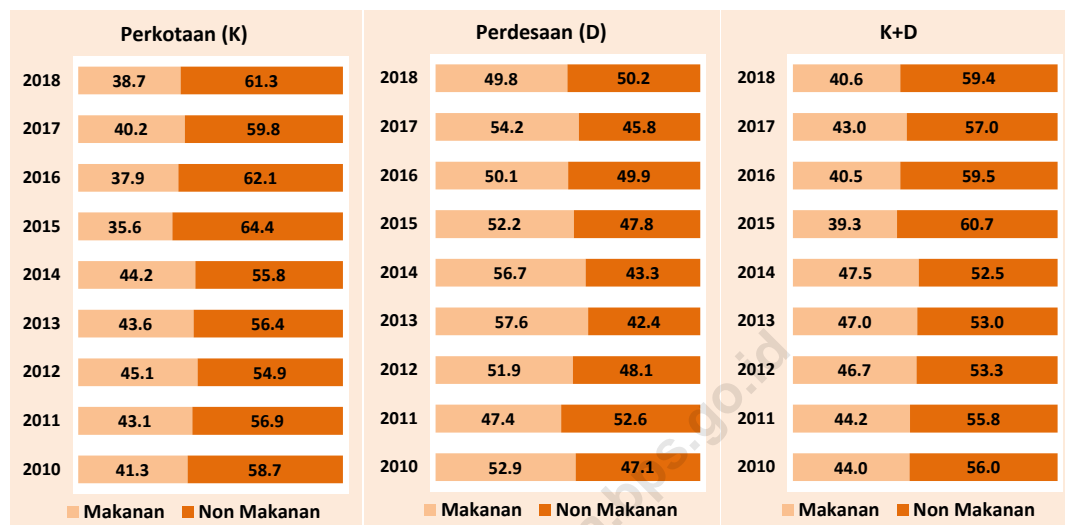
Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2010-2018, BPS DIY

Gambar 7.2. Pengeluaran Perkapita menurut Wilayah di DIY, 2010-2018 (000 Rp)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2010-2018, BPS DIY

Gambar 7.3. Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan menurut Wilayah di DIY , 2010-2018 (Persen)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2010-2018, BPS DIY

proporsi pengeluaran untuk komoditas makanan hanya tercatat sebesar 40,6 persen. Komposisi pengeluaran kelompok makanan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Fenomena ini secara kasar menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk DIY yang semakin membaik.

Komposisi pengeluaran perkapita non makanan di wilayah perkotaan DIY juga terlihat lebih dominan selama periode 2010-2018. Proporsi pengeluaran perkapita non makanan di wilayah perkotaan mencapai 61,3 persen pada bulan Maret 2018. Sementara, pengeluaran perkapita makanan proporsinya hanya sebesar 38,7 persen dan cenderung menurun. Komposisi pengeluaran perkapita di daerah perdesaan masih relatif berfluktuasi dan besarnya hampir berimbang antara kelompok makanan dan non makanan. Kadang-kadang kelompok makanan lebih dominan, namun di saat yang lain konsumsi kelompok makanan lebih dominan. Pada kondisi Maret 2018, proporsi pengeluaran

makanan mencapai 49,8 persen dan pengeluaran non makanan mencapai 50,2 persen.

Pola konsumsi penduduk juga bisa dikaji berdasarkan golongan pengeluaran penduduk yang dikelompokkan menurut desil (kelompok 10 persen populasi yang telah diurutkan pengeluarannya). Berdasarkan pengolahan hasil Susenas Maret 2018, terlihat bahwa nilai rata-rata pengeluaran perkapita kelompok makanan dan proporsinya cenderung menurun seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran atau desil. Artinya, pengeluaran perkapita makanan penduduk pada kelompok 10 persen terbawah memiliki rata-rata terendah (Rp210,-ribu) namun memiliki proporsi pengeluaran makanan yang tertinggi (65,4 persen).

Sementara, rata-rata pengeluaran perkapita kelompok non makanan tercatat semakin meningkat seiring dengan peningkatan kelompok pengeluaran penduduk (desil). Demikian pula dengan komposisinya, juga terlihat semakin

**Tabel 7.1. Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Desil dan Kelompok di DIY, 2010-2018**

Desil	Makanan		Non Makanan		Jumlah
	Rata-rata	%	Rata-rata	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	210 173	(65.36)	111 412	(34.64)	321 585
2	282 032	(63.87)	159 513	(36.13)	441 545
3	327 680	(61.76)	202 916	(38.24)	530 596
4	372 850	(58.32)	266 462	(41.68)	639 313
5	426 582	(55.38)	343 760	(44.62)	770 343
6	502 144	(52.15)	460 776	(47.85)	962 920
7	596 135	(49.59)	606 037	(50.41)	1 202 171
8	670 277	(43.45)	872 505	(56.55)	1 542 782
9	864 869	(38.75)	1 367 190	(61.25)	2 232 059
10	1 039 337	(23.67)	3 351 564	(76.33)	4 390 901
<b>Jml</b>	<b>529 012</b>	<b>(40.61)</b>	<b>773 649</b>	<b>(59.39)</b>	<b>1 302 661</b>

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

meningkat. Nilai pengeluaran perkapita non makanan pada desil kesatu tercatat sebesar Rp111,- ribu dengan proporsi sebesar 34,6 persen. Sementara, nilai pengeluaran perkapita non makanan pada desil kesepuluh tercatat sebesar Rp3,35,- juta dan memiliki andil sebesar 76,3 persen.

### Komposisi Pengeluaran Perkapita Kelompok Makanan dan non Makanan

Andil konsumsi kelompok makanan terhadap total pengeluaran perkapita penduduk sebulan terlihat semakin menurun hingga level 40 persen. Konsumsi perkapita menurut jenis komoditas kelompok makanan selama periode 2014-2018 mempunyai pola yang hampir serupa. Meskipun demikian, besaran/ proporsi setiap kelompok komoditas memiliki proporsi yang berfluktuasi antar tahun.

Pengeluaran perkapita kelompok makanan yang terbesar digunakan untuk konsumsi komoditas makanan dan minuman jadi. Proporsi selama tahun 2014-2018 berkisar antara 14-18 persen terhadap

total konsumsi perkapita penduduk dalam sebulan. Tingginya konsumsi komoditas makanan dan minuman jadi didorong oleh konsumsi penduduk perkotaan, terutama yang mereka berstatus indekost/sewa/kontrak seperti mahasiswa dan para pelajar. Umumnya mereka tidak melakukan aktivitas memasak sendiri dan lebih memilih membeli makanan dan minuman jadi. Selain itu, peningkatan proporsi penduduk pada kelas pendapatan menengah ke atas juga memiliki andil cukup besar terhadap konsumsi makanan dan minuman jadi.

Konsumsi untuk kelompok padi-padian memiliki proporsi cenderung menurun dari waktu ke waktu, akibat perubahan orientasi konsumsi menuju makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2018, andil kelompok padi-padian tercatat sebesar 3,8 persen terhadap total konsumsi perkapita sebulan. Andil konsumsi terbesar berikutnya adalah kelompok komoditas telur dan susu, sayur-sayuran, buah-buahan, serta rokok dan tembakau dengan proporsi antara 2 sampai 4 persen. Sementara, proporsi untuk konsumsi kelompok komoditas lainnya bervariasi dengan level di bawah 2 persen dari total konsumsi sebulan penduduk DIY.

Komposisi pengeluaran perkapita kelompok bukan makanan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 proporsinya mencapai 59,39 persen. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran non makanan didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga. Besarnya proporsi kelompok ini bervariasi antara 19-27 persen dan cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komposisi pengeluaran terbesar berikutnya adalah pengeluaran untuk kelompok aneka barang dan jasa (termasuk pendidikan dan kesehatan). Jika lebih dirinci, maka

Tabel 7.2. Komposisi Konsumsi Perkapita menurut Komoditas di DIY, 2014-2018 (%)

Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Padi-Padian	6.04	5.01	4.43	4.14	3.83
Umbi-Umbian	0.33	0.26	0.33	0.33	0.28
Ikan	1.60	1.49	1.56	1.80	1.66
Daging	2.06	1.82	2.02	2.19	1.78
Telur dan Susu	3.31	3.08	3.14	3.02	2.94
Sayur-Sayuran	3.23	2.28	2.63	3.39	2.75
Kacang-Kacangan	1.62	1.20	1.18	1.01	0.98
Buah-Buahan	2.78	2.26	2.02	2.22	2.47
Minyak dan Kelapa	1.43	1.13	1.04	1.07	0.89
Bahan Minuman	1.94	1.52	1.6	1.67	1.46
Bumbu-Bumbuan	0.66	0.57	0.61	0.63	0.61
Konsumsi Lainnya	0.94	0.82	0.76	0.85	0.72
Makanan Jadi	17.75	14.28	15.31	17.17	17.30
Rokok	3.82	3.58	3.90	3.52	2.94
<b>Makanan</b>	<b>47.51</b>	<b>39.3</b>	<b>40.52</b>	<b>43.00</b>	<b>40.61</b>
Perumahan	19.61	26.69	27.17	23.90	24.61
Pendidikan <sup>1</sup>	-	-	-	6.06	3.76
Kesehatan <sup>2</sup>	-	-	-	4.18	5.64
Aneka Barang Jasa	22.25	17.8	17.44	5.76	7.00
Pakaian, Alas Kaki	2.67	2.84	2.88	2.67	2.58
Barang tahan lama	3.89	8.18	6.52	8.92	10.26
Pajak dan Asuransi	1.68	3.19	3.08	3.81	3.52
Pesta dan Upacara	2.38	2.00	2.39	1.70	2.03
<b>Non Makanan</b>	<b>52.49</b>	<b>60.69</b>	<b>59.48</b>	<b>57.00</b>	<b>59.39</b>

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2014-2018, BPS DIY

Cat: <sup>1</sup> Pengeluaran pendidikan dan kesehatan tahun 2014-2016 masih tergabung dalam aneka barang dan jasa

pengeluaran untuk kelompok pendidikan memiliki andil 3,76 persen dan kelompok kesehatan sebesar 5,64 persen. Andil pengeluaran untuk barang tahan lama terlihat semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan proporsi sebesar 10,26 persen pada tahun 2018. Ketika pendapatan meningkat, maka konsumsi penduduk terhadap barang tahan lama seperti elektronik, meubelair, handphone, perabot, perhiasan, dan lainnya juga akan semakin meningkat. Sementara, pengeluaran untuk kelompok yang lainnya (pakaian, pajak, dan pesta) bervariasi dengan andil di bawah 4 persen.

## Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata energi atau kalori yang dikonsumsi oleh penduduk DIY selama periode 2012-2018 berfluktuasi antara 1.854 kkal sampai 2.254 kkal perkapita

Tabel 7.3. Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Sehari menurut Wilayah di DIY, 2012-2018 (Persen)

Tahun	Energi (kkal)			Protein (gram)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	1 861	1 842	1 854	56,71	50,70	54,69
2013	2 000	1 992	1 998	64,66	55,83	61,67
2014	2 029	1 987	2 015	65,56	54,95	61,94
2015	1 939	1 940	1 940	60,08	52,33	57,48
2016	2 070	2 050	2 063	64,54	55,68	67,71
2017	2 259	2 243	2 254	72,76	62,73	69,78
2018	2 251	2 151	2 224	73,20	62,02	70,18

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2012-2018, BPS DIY



sehari. Jika mengacu pada standar kecukupan kebutuhan minimum energi yang sebesar 2.150 kkal per kapita sehari, maka rata-rata konsumsi energi penduduk DIY mulai tahun 2017 sudah berada di atas standar yang ditentukan. Rata-rata energi yang dikonsumsi penduduk pada tahun 2018 sebesar 2.224 kkal sehari dan sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 2.254 kkal sehari.

Secara umum, konsumsi energi perkapita sehari penduduk di wilayah perdesaan DIY sampai dengan tahun 2018 selalu lebih rendah dari konsumsi energi penduduk perkotaan, kecuali di tahun 2015. Konsumsi energi perkapita penduduk perkotaan selama 2018 tercatat sebesar 2.251 kkal sehari. Sementara, konsumsi energi penduduk perdesaan sebesar 2.151 kkal sehari. Perbedaan level konsumsi energi ini dipengaruhi oleh kuantitas komoditas makanan yang dikonsumsi oleh penduduk perkotaan yang lebih tinggi. Selain itu, jenis komoditas makanan yang dikonsumsi penduduk perkotaan juga lebih bervariasi dibandingkan dengan konsumsi penduduk perdesaan.

Sumber utama energi yang dikonsumsi oleh penduduk DIY sebagian besar berasal dari kelompok padi-padian dan makanan jadi. Sumber energi dari kelompok makanan jadi cenderung meningkat, sementara kelompok padi-padian cenderung menurun. Hal ini menggambarkan adanya perubahan pola konsumsi penduduk akibat meningkatnya tingkat pendapatan penduduk maupun perubahan gaya hidup. Hal ini selaras dengan perkembangan aktivitas kuliner dan restoran yang terlihat semakin meningkat. Pada kondisi Maret 2018, rata-rata konsumsi energi perkapita sehari dari kelompok makanan jadi mencapai 756 kkal dan memberi sumbangan sebesar 34

persen. Sementara, konsumsi energi dari komoditas padi-padian mencapai 674 kkal dan memberi andil sebesar 30,3 persen terhadap total konsumsi energi. Jenis komoditas padi-padian yang paling besar sumbangannya adalah beras. Sumber energi terbesar berikutnya berasal dari kelompok kelompok minyak dan kelapa dengan andil 10,06 persen. Kelompok komoditas yang lainnya memberi andil konsumsi energi dengan besaran yang bervariasi kurang dari 4 persen. Beberapa kelompok makanan mengalami kenaikan konsumsi energi diantaranya adalah ikan, telur, sayuran, dan buah-buahan.

Konsumsi protein penduduk DIY selama periode 2012-2018 mengalami kecenderungan yang semakin meningkat secara berfluktuasi. Konsumsi protein perkapita penduduk DIY sejak tahun 2013 sudah melebihi standar minimum yang ditentukan oleh Permenkes RI yakni 57 gram sehari. Bahkan, pada tahun 2018 konsumsi protein perkapita sudah berada di level 70 gram sehari.

Berdasarkan wilayah, konsumsi protein perkapita penduduk perkotaan selama tujuh tahun terakhir tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Hal ini terjadi karena konsumsi kelompok makanan yang menjadi sumber protein penduduk perkotaan sudah lebih bervariasi dibandingkan dengan konsumsi penduduk perdesaan. Konsumsi protein perkapita sehari penduduk perkotaan pada tahun 2018 mencapai 73,2 gram sehari. Sementara, konsumsi penduduk perdesaan mencapai 62,02 gram sehari. Angka ini memberi gambaran bahwa konsumsi protein di perkotaan sudah melebihi angka kecukupan minimum yang ditentukan yakni 57 gram sehari sejak tahun 2013. Sementara, konsumsi protein perkapita sehari penduduk perdesaan sudah melebihi

**Tabel 7.4. Konsumsi Energi Perkapita Sehari (kkal) menurut Kelompok di DIY, 2016-2018**

Kelompok Makanan	2016		2017		2018	
	kkal	%	kkal	%	kkal	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Padi-Padian	740	35.9	724	32.1	674	30.3
Umbi-Umbian	37	1.8	42	1.9	27	1.2
Ikan	22	1.1	25	1.1	25	1.1
Daging	59	2.9	76	3.4	63	2.9
Telur dan Susu	78	3.8	71	3.2	80	3.6
Sayur-Sayuran	39	1.9	39	1.7	40	1.8
Kacang-Kacangan	65	3.2	72	3.2	70	3.1
Buah-Buahan	41	2.0	63	2.8	65	2.9
Minyak & Kelapa	229	11.1	229	10.2	236	10.6
Bahan Minuman	125	6.1	119	5.3	123	5.5
Bumbu-Bumbuan	10	0.5	9	0.4	8	0.4
Lainnya	53	2.6	61	2.7	55	2.5
Makanan Jadi	567	27.5	723	32.1	756	34.0
Jumlah	2 063	100	2 254	100	2 224	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2016-2018, BPS DIY

angka kecukupan minimum protein yang ditentukan sejak tahun 2017.

Sumber utama protein yang dikonsumsi penduduk DIY berasal dari kelompok makanan dan minuman jadi dan kelompok padi-padian. Rata-rata konsumsi protein perkapita kelompok makanan dan minuman jadi pada tahun 2018 sebesar 29,09 gram sehari atau memberi andil sebesar 41,5 persen terhadap total konsumsi protein. Konsumsi protein dari sumber makanan jadi memiliki kecenderungan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara, rata-rata konsumsi protein perkapita dari kelompok padi-padian tercatat sebesar 15,88 gram atau memberi andil 22,6 persen terhadap total konsumsi protein. Konsumsi protein dari kelompok padi-padian cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 7.5. Konsumsi Protein Perkapita Sehari (Gram) menurut Kelompok di DIY, 2016-2018**

Kelompok Makanan	2016		2017		2018	
	Gram	%	Gram	%	Gram	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Padi-Padian	17.43	28.2	17.04	24.4	15.88	22.6
Umbi-Umbian	0.34	0.6	0.36	0.5	0.26	0.4
Ikan	3.52	5.7	3.70	5.3	3.78	5.4
Daging	3.57	5.8	4.64	6.7	4.08	5.8
Telur dan Susu	4.19	6.8	3.96	5.7	4.42	6.3
Sayur-Sayuran	2.61	4.2	2.50	3.6	2.43	3.5
Kacang-Kacangan	6.32	10.2	6.96	10.0	6.85	9.8
Buah-Buahan	0.41	0.7	0.63	0.9	0.67	1.0
Minyak & Kelapa	0.32	0.5	0.27	0.4	0.29	0.4
Bahan Minuman	0.89	1.4	0.90	1.3	1.00	1.4
Bumbu-Bumbuan	0.41	0.7	0.37	0.5	0.34	0.5
Lainnya	1.1	1.8	1.18	1.7	1.08	1.5
Makanan Jadi	20.6	33.4	27.28	39.1	29.09	41.5
Jumlah	61.71	100	69.78	100	70.18	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2016-2018, BPS DIY

Sumber terbesar berikutnya berasal dari konsumsi kelompok kacang-kacangan dengan nilai konsumsi 6,85 gram atau memberi andil 9,8 persen dan kelompok telur dan susu sebesar 4,42 gram atau 6,3 persen. Konsumsi protein dari kedua kelompok ini tercatat semakin meningkat. Andil konsumsi protein perkapita dari kelompok makanan yang lainnya bervariasi di bawah 6 persen. Selama tahun 2018, konsumsi perkapita sebagian besar kelompok makanan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan konsumsi protein tertinggi terjadi pada kelompok umbi-umbian dan bumbu-bumbuan. Sementara, konsumsi protein dari kelompok buah-buahan, minyak dan kelapa, dan bahan minuman tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015.

# PENDUDUK MISKIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SECARA PERSENTASE SEMAKIN MENURUN, NAMUN LEVELNYA MASIH LEBIH TINGGI DARI RATA-RATA NASIONAL

jumlah penduduk miskin di wilayah DIY berkurang sebanyak 111 ribu jiwa sejak periode Maret 2010 sampai September 2017. Sementara, persentase penduduk miskin (P0) berkurang sebanyak 4,5 poin persen.



**Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)**      **Persentase Penduduk Miskin (Persen)**



Bab VIII



Indikator  
Perumahan dan  
Pemukiman



# Indikator

## Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan permukiman menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar, selain pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Perumahan dalam sekup yang lebih sempit didefinisikan sebagai hunian tempat tinggal mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, serta pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan penduduk akan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, tenang, dan nyaman. Perumahan dalam sekup dan konteks yang lebih luas dimaknai sebagai permukiman, yaitu kumpulan rumah baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil dari upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan fasilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 disebutkan bahwa arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan perumahan, air minum, dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk pada kelompok 40 persen berpendapatan terendah. Sasaran pembangunan perumahan dan pemukiman tersebut di antaranya adalah terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga dari anggaran pemerintah dalam menurunkan akumulasi kekurangan tempat tinggal, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi 5 juta rumah tangga pada tahun 2019.

Rumah selain sebagai tempat tinggal atau hunian, juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga. Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal, fungsi rumah telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan status sosial pemiliknya. Sementara itu sebagai sarana pembinaan keluarga, rumah diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang maksimal, yaitu tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam RPJMN 2015-2019 meliputi penyediaan perumahan, air minum, dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan untuk meningkatkan standar hidup penduduk pada kelompok 40 persen berpendapatan terendah.

Pembangunan perumahan dan pemukiman memerlukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi secara periodik. Ketersediaan data terkait perumahan yang berkesinambungan sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan perumahan, sehingga dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pemenuhan pengadaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Secara berkala, BPS telah melakukan pengumpulan data terkait dengan kondisi dan fasilitas tempat tinggal atau rumah melalui pendekatan rumah tangga dalam kegiatan Susenas.

### Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Kesejahteraan penduduk bisa dilihat dari indikator status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Rumah tangga yang berpenghasilan relatif tinggi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memiliki bangunan tempat tinggal sendiri dibandingkan dengan rumah tangga yang berpenghasilan lebih rendah.

**Tabel 8.1. Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di DIY, 2013-2018 (Persen)**

Tahun	Status Kepemilikan Rumah Tinggal				
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Rumah Dinas	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	76.88	13.90	7.52	1.52	0.19
2014	74.97	15.48	9.00	0.27	0.28
2015	76.99	13.58	8.88	0.43	0.12
2016	77.40	14.07	7.92	0.45	0.16
2017	75.26	13.57	10.65	0.45	0.06
2018	76.54	13.71	8.99	0.45	0.31

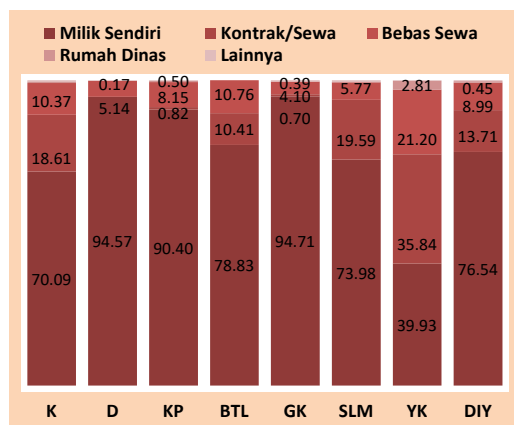
Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2013-2018, BPS DIY

Dalam kegiatan Susenas, status kepemilikan bangunan tempat tinggal dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: milik sendiri, sewa/kontrak, bebas sewa, dinas, dan lainnya. Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, proporsi rumah tangga di DIY yang menempati tempat tinggal milik sendiri sebesar 76,5 persen. Sisanya sebanyak 23,5 persen menempati rumah bukan milik sendiri. Jika lebih dirinci, maka proporsi yang menempati rumah secara kontrak/sewa sebesar 13,71 persen, berstatus bebas sewa sekitar 9 persen persen, menempati rumah dinas 0,45 persen, dan 0,31 persen lainnya.

Perkembangan selama enam tahun terakhir menunjukkan lebih dari 75 persen rumah tangga di DIY telah menempati rumah milik sendiri. Polanya terlihat cukup berfluktuasi. Sementara, persentase rumah tangga yang menempati status rumah

**Gambar 8.1. Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal dan Wilayah di DIY, 2018 (Persen)**



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

bukan milik sendiri berkisar antara 14-15 persen. Berdasarkan Susenas 2018 juga bisa diketahui bahwa sebesar 13,3 persen rumah tangga di DIY yang anggota rumah tangganya tercatat memiliki rumah lain selain bangunan rumah yang ditempati.

Jika dikaji menurut wilayah tempat tinggal maka polanya terlihat lebih bervariasi. Secara proporsional, rumah tangga di wilayah perdesaan yang menempati rumah milik sendiri relatif lebih besar dari rumah tangga di perkotaan. Hal ini terkait dengan nilai tanah dan bangunan di wilayah perkotaan yang relatif lebih tinggi. Solusinya, cukup banyak rumah tangga terutama yang statusnya migran yang menempati rumah secara sewa atau kontrak. Pola yang bervariasi juga terlihat berdasarkan perbandingan menurut kabupaten/kota. Kepemilikan tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul didominasi oleh rumah milik sendiri. Sementara, di wilayah Kota Yogyakarta proporsi rumah tangga yang menempati rumah sendiri dan secara sewa/kontrak hampir seimbang.

**Kondisi Bangunan Tempat Tinggal**

Kualitas perumahan atau tempat tinggal penduduk bisa dilihat dari kondisi bangunan secara fisik. Beberapa aspek yang mencerminkan kondisi fisik tempat tinggal diantaranya adalah jenis dan luas lantai, jenis dinding, jenis atap, jumlah ruang tidur, dan lainnya. Semakin baik kualitas fisik rumah mencerminkan kualitas kesejahteraan penduduk yang semakin membaik.

**Jenis Lantai Terluas dan Luas Lantai**

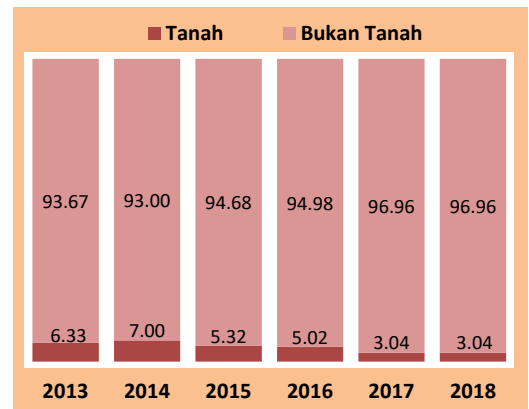
Jenis lantai yang ditempati rumah tangga memiliki relasi dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi ekonomi rumah tangga atau semakin

sejahtera, maka kondisi lantai rumah yang ditempati juga akan semakin berkualitas. Meskipun demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi preferensi rumah tangga dalam memilih jenis lantai tempat tinggal, seperti faktor budaya, kesadaran tentang rumah yang sehat, gaya hidup, dan lainnya.

Jenis lantai terluas dari bangunan tempat tinggal dalam kegiatan Susenas dikategorikan menjadi beberapa jenis. Tingkatan atau kualitas lantai yang paling baik adalah lantai yang terbuat dari marmer/granit, diikuti oleh keramik, ubin/tegel/teraso, papan berkualitas tinggi, dan semen/bata merah. Sementara, jenis lantai yang lainnya seperti bambu, kayu/papan kualitas rendah, dan tanah merepresentasikan lantai dengan kualitas yang lebih rendah. Bahkan, rumah tangga yang menempati bangunan dengan lantai terluas dari tanah dianggap belum menempati rumah yang layak huni.

Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2013-2018, sebagian besar rumah tangga di DIY telah menempati rumah dengan jenis lantai terluas bukan tanah. Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan

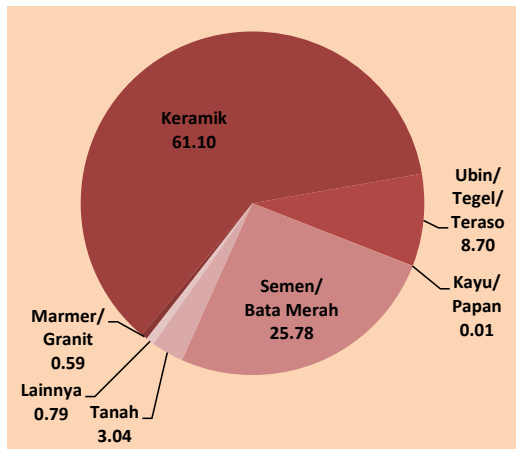
**Gambar 8.2. Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Bangunan Terluas di DIY, 2013-2018 (Persen)**



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2013-2018, BPS DIY



Gambar 8.3. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal di DIY, 2018 (Persen)

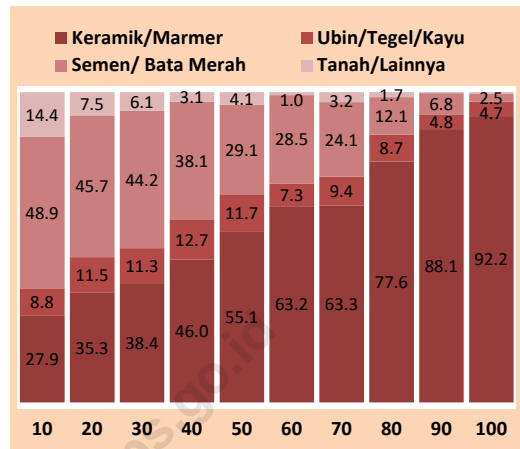


Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

jenis lantai terluas dari tanah pada kondisi Maret 2018 hanya sebesar 3,04 persen. Selama enam tahun terakhir, proporsi ini semakin menurun secara nyata. Secara umum, hal ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas rumah yang menjadi tempat tinggal penduduk DIY.

Jika lebih dirinci, maka sebagian besar rumah tangga di DIY pada kondisi Maret 2018 menempati rumah dengan lantai terluas dari keramik. Proporsinya mencapai 61,1 persen. Komposisi terbesar berikutnya adalah rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis lantai terluas dari semen/bata merah dan ubin/tegel dengan proporsi masing-masing sebesar 25,78 persen dan 8,70 persen. Data tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas rumah tangga di DIY telah menempati tempat tinggal dengan jenis lantai yang layak. Sementara, rumah tangga yang menempati lantai yang belum layak yakni lantai tanah proporsinya tercatat sebesar 3,04 persen. Sebagian besar rumah tangga tersebut terdapat di kawasan perdesaan, terutama di Gunungkidul dan Kulon Progo.

Gambar 8.4. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal dan Desil Pengeluaran di DIY, 2018 (Persen)

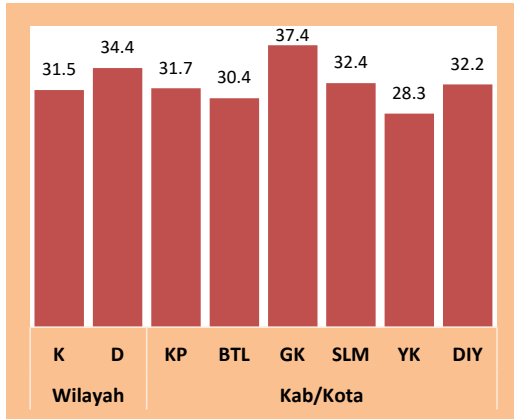


Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

Relasi antara kesejahteraan penduduk atau rumah tangga dengan jenis lantai disajikan dalam Gambar 8.4. Proporsi rumah tangga dengan jenis lantai terluas dari keramik/marmor terlihat semakin membesar seiring dengan kenaikan desil pengeluaran. Pada desil kesatu (kelompok 10 persen penduduk berpengeluaran terendah) proporsinya sebesar 27,9 persen. Pada desil kesepuluh (kelompok 10 persen pengeluaran tertinggi) proporsinya sebesar 92,2 persen. Sebaliknya, proporsi rumah tangga dengan jenis lantai terluas dari semen/bata merah terlihat semakin menurun seiring dengan kenaikan desil pengeluaran.

Selain menggunakan variabel jenis lantai terluas, kualitas tempat tinggal juga bisa dikaji menggunakan variabel luas lantai perkapita. Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2018, mayoritas rumah tangga di DIY telah menempati bangunan dengan luas lantai perkapita di atas 10 m<sup>2</sup>. Proporsinya mendekati 90 persen. Sementara, proporsi rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari 10 m<sup>2</sup> tercatat sekitar 10

**Gambar 8.5. Rata-rata Luas Lantai Perkapita Menurut Wilayah di DIY, 2018 (m<sup>2</sup>)**



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

persen. Profil rumah tangga tersebut pada umumnya merupakan rumah tangga tunggal, tinggal di kawasan urban, berstatus mahasiswa/pekerja migran, dan tinggal secara indekost atau menyewa satu kamar dengan luas lantai kurang dari 10 m<sup>2</sup>. Secara rata-rata luas lantai perkapita tempat tinggal pada kondisi Maret 2018 tercatat sebesar 32 m<sup>2</sup>. Rumah tangga di kawasan perdesaan memiliki rata-rata luas lantai perkapita yang lebih tinggi dari rumah tangga di perkotaan. Luas lantai perkapita tertinggi tercatat di Gunungkidul sebesar 37 m<sup>2</sup>.

### Jenis Dinding Bangunan Terluas

Jenis dinding terluas dari bangunan yang ditempati oleh rumah tangga juga menggambarkan derajat kesejahteraan penduduk secara umum. Jenis dinding bangunan tempat tinggal bisa terbuat dari tembok, plesteran, kayu, anyaman bambu, batang kayu, bambu, dan lainnya. Kualitas dinding yang baik dari sisi kesehatan dan kenyamanan adalah dinding yang terbuat dari tembok.

Hasil Susenas bulan Maret 2016-2018 menggambarkan sebagian besar rumah

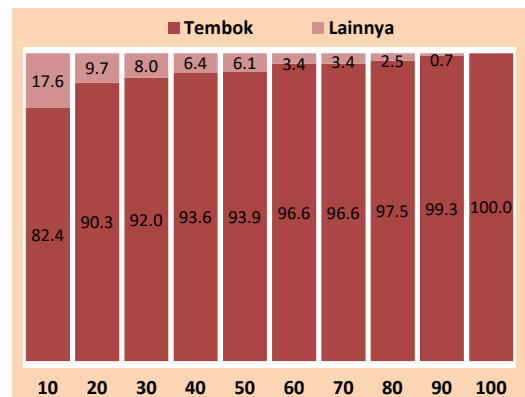
**Tabel 8.2. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Dinding Terluas, 2016-2018 (Persen)**

Tahun	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Tembok	91.98	94.01	94.70
Plesteran	0.22	0.20	0.06
Kayu	2.61	2.47	2.64
Anyaman Bambu	4.14	2.88	2.43
Bambu	0.56	0.00	0.03
Lainnya	0.48	0.44	0.15
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2013-2018, BPS DIY

tangga di DIY telah menempati bangunan dengan jenis dinding terluas dari tembok. Proporsinya mencapai 94,7 persen dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Secara umum, angka tersebut menggambarkan mayoritas rumah tangga telah menempati bangunan yang sudah layak. Sementara, rumah tangga yang menempati bangunan dengan jenis dinding terluas selain tembok pada didominasi oleh anyaman bambu dan kayu dengan proporsi masing-masing sebesar 2,64 persen dan 2,43 persen. Sebagian besar rumah tangga dengan jenis dinding ini terdapat di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.

**Gambar 8.6. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Dinding dan Desil, 2018 (Persen)**



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

Berdasarkan kelompok pengeluaran (desil), proporsi rumah tangga yang menempati bangunan dengan jenis dinding tembok semakin meningkat seiring dengan peningkatan desil pengeluaran. Rumah tangga pada kelompok pengeluaran 20% tertinggi hampir semuanya menempati bangunan dengan jenis dinding dari tembok. Sementara, pada kelompok pengeluaran 10% terendah masih terdapat 17,6 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis dinding bukan tembok. Namun demikian, variabel jenis dinding terlihat kurang sensitif menggambarkan perbedaan kesejahteraan antar rumah tangga, karena proporsi pada semua kelompok pengeluaran didominasi oleh jenis dinding tembok dengan proporsi di atas 82 persen.

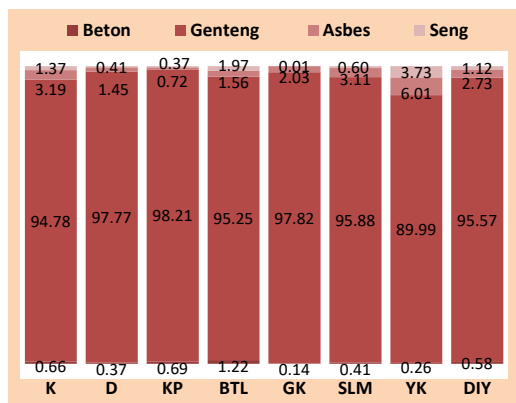
### Jenis Atap Terluas

Tingkat kesehatan dan kenyamanan hunian tempat tinggal juga sangat ditentukan oleh pemilihan jenis atap bangunan. Jenis atap bangunan tempat tinggal bisa merepresentasikan status sosial rumah tangga. Artinya, semakin baik kesejahteraan rumah tangga akan dicerminkan oleh jenis atap yang semakin

berkualitas. Namun, faktor budaya dan karakteristik wilayah juga ikut berpengaruh terhadap pemilihan jenis atap. Jenis atap terluas dari bangunan secara berjenjang dikategorikan menjadi beton, genteng keramik, genteng metal, genteng tanah liat, asbes, seng, bambu, kayu/sirap, jerami/ ijuk/ rumbia, dan lainnya.

Sampai dengan kondisi Maret 2018, sebagian besar rumah tangga di DIY telah menempati bangunan dengan jenis atap terluas dari genteng tanah liat. Proporsinya di atas 95 persen dari total rumah tangga. Artinya, sebagian besar rumah tangga telah menempati bangunan yang cukup layak dari sisi jenis atap. Sementara, proporsi rumah tangga dengan jenis dinding terluas yang lain terlihat bervariasi di bawah 4 persen. Secara umum, tidak ada perbedaan yang mencolok terkait dengan jenis atap terluas antarwilayah perkotaan dan perdesaan serta antar kabupaten/kota. Berdasarkan kelompok pengeluaran (desil), distribusi rumah tangga menurut jenis atap terluas juga tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Artinya, variabel jenis atap hampir sama dengan jenis dinding kurang sensitif menggambarkan perbedaan karakteristik kesejahteraan rumah tangga.

Gambar 8.7. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Atap Terluas dan Wilayah, 2018

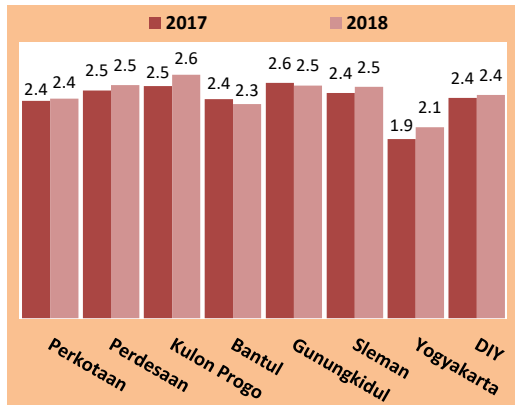


Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

### Rata-rata Jumlah Ruang Tidur

Jumlah ruang tidur yang dimiliki rumah tangga juga bisa menjadi ukuran kelayakan tempat tinggal. Berdasarkan Susenas Maret 2017-2018, setiap rumah tangga di DIY rata-rata memiliki ruang tidur antara 2-3 unit. Secara umum, rata-rata jumlah ruang tidur di kawasan perkotaan lebih rendah dari kawasan perdesaan. Sementara, rata-rata jumlah ruang tidur tertinggi menurut kabupaten/kota tercatat di Kulon Progo dan Gunungkidul dan terendah tercatat di Kota Yogyakarta. Perbedaan rata-rata jumlah ruang tidur antar wilayah ini terkait dengan

Gambar 8.8. Rata-rata Jumlah Ruang Tidur menurut Wilayah di DIY, 2017-2018 (unit)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2017-2018, BPS DIY

rata-rata jumlah ART maupun luas bangunan tempat tinggal di masing-masing wilayah.

### Fasilitas dan Sarana Pendukung

Selain kondisi fisik tempat tinggal, kualitas rumah sebagai proksi kesejahteraan rumah tangga juga bisa dilihat dari fasilitas dan sarana pendukung yang tersedia. Beberapa sarana dan fasilitas pokok yang dapat dikaji mencakup sumber penerangan, air bersih, MCK dan sanitasi, bahan bakar memasak, dan lainnya.

### Sumber Penerangan

Sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga merupakan salah satu aspek yang merepresentasikan kesejahteraan rumah tangga. Secara garis besar, sumber penerangan yang digunakan rumah tangga dikategorikan menjadi beberapa jenis, yakni listrik PLN (dengan meteran dan tanpa meteran), listrik non PLN, dan sumber lainnya seperti petromak, sentir, dan sebagainya. Secara umum, listrik merupakan sumber penerangan yang lebih baik dibandingkan dengan sumber penerangan lainnya atau non listrik. Alasannya adalah penggunaan listrik lebih praktis, murah, efisien, modern, dan

Tabel 8.3. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Penerangan, 2013-2018 (Persen)

Tahun	Sumber Penerangan				Jumlah
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	99.62	0.00	0.28	0.15	100
2014	99.58	0.00	0.08	0.28	100
2015	99.70	0.12	0.18	0.00	100
2016	99.61	0.32	0.07	0.00	100
2017	99.88	0.02	0.10	0.00	100
2018	99.92	0.00	0.08	0.00	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2013-2018, BPS DIY

ramah lingkungan. Rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik terutama dari sumber PLN dengan meteran dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang menggunakan sumber lainnya.

Potret sumber penerangan rumah tangga bisa dikaji menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan data hasil survei rumah tangga Susenas. Pendekatan kedua menggunakan data jumlah sambungan dan konsumsi listrik rumah tangga menggunakan data sekunder dari PLN. Kedua pendekatan menghasilkan indikator yang berbeda.

Berdasarkan hasil Susenas dalam beberapa tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama sudah mendekati level 100 persen. Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik PLN pada kondisi Maret 2018 tercatat sebanyak 99,92 persen. Sementara, sisanya sebanyak 0,08 persen menggunakan penerangan bukan listrik.

Jika lebih dirinci, maka sebanyak 93,2 persen rumah tangga di DIY sudah

menggunakan sumber listrik PLN dengan meteran sendiri. Sisanya, sebanyak 6,71 persen rumah tangga menggunakan listrik PLN tanpa meteran atau dengan menyalur listrik dari rumah tangga lain.

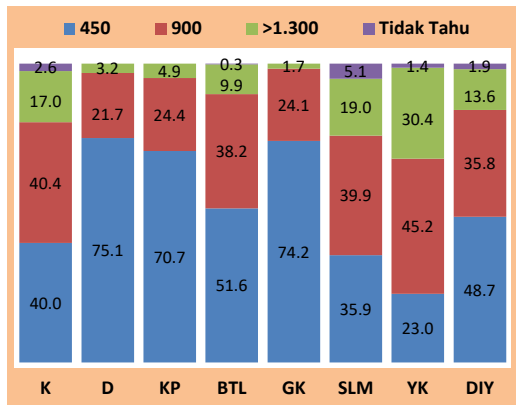
Distribusi rumah tangga di DIY yang menggunakan listrik PLN dengan meteran menurut daya yang terpasang (watt) pada kondisi Maret 2018 didominasi oleh kelompok 450 watt dan 900 watt. Proporsi kedua kelompok masing-masing tercatat sebesar 48,7 persen dan 35,8 persen. Sementara, 13,86 persen rumah tangga menggunakan listrik dengan daya terpasang 1.300 watt ke atas dan 1,9 persen rumah tangga tidak tahu besarnya daya listrik terpasang. Pada umumnya, rumah tangga yang tidak tahu besarnya daya listrik terpasang berstatus bukan sebagai pemilik rumah atau hanya penghuni sewa/kontrak/indekost.

Berdasarkan wilayah terlihat bahwa mayoritas rumah tangga di wilayah perdesaan menggunakan listrik dengan daya 450 watt, sementara mayoritas rumah tangga perkotaan menggunakan daya listrik lebih besar dari 450 watt. Proporsi rumah tangga di Kabupaten Sleman dan

Yogyakarta yang menggunakan daya listrik terpasang 450 watt tercatat sebesar 35,9 persen dan 23 persen. Sementara, rumah tangga di tiga kabupaten lainnya mayoritas masih menggunakan listrik dengan daya terpasang 450 watt. Secara umum, hal ini memberi gambaran perbedaan level kesejahteraan penduduk antarwilayah di DIY.

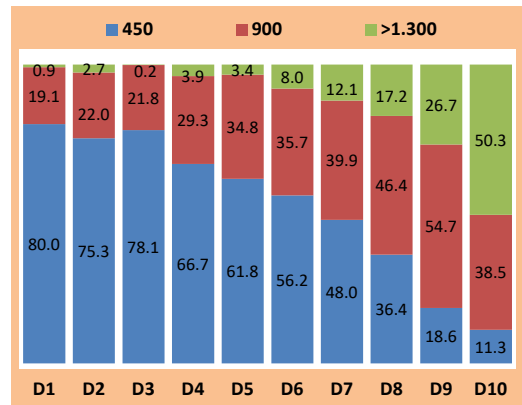
Distribusi rumah tangga berdasarkan desil pengeluaran dan daya listrik yang terpasang menunjukkan hubungan positif. Artinya, semakin tinggi desil pengeluaran dari rumah tangga maka daya listrik yang digunakan juga semakin besar. Hal ini terkait dengan tuntutan kebutuhan rumah tangga pada kelompok menengah ke atas yang banyak menggunakan barang-barang elektronik. Barang-barang tersebut membutuhkan suplai listrik dalam jumlah yang lebih besar, sehingga daya listrik yang digunakan adalah 900 watt ke atas. Di samping itu, kebijakan pemerintah juga menentukan bahwa pengguna utama listrik dengan daya 450 watt adalah kalangan rumah tangga tidak mampu. Pada umumnya, mereka berada pada kelompok desil pengeluaran kesatu sampai keempat

Gambar 8.9. Distribusi Rumah Tangga menurut Wilayah dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2018 (%)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

Gambar 8.10. Distribusi Rumah Tangga menurut Desil Pengeluaran dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2018 (%)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

atau 40% penduduk berpendapatan terendah.

Sementara, berdasarkan data sekunder dari PLN, konsumen rumah tangga masih mendominasi jumlah pelanggan PT PLN Yogyakarta. Jumlah konsumen rumah tangga pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.137.733 pelanggan atau sebesar 91,28 persen dari total seluruh konsumen PLN. Jumlah konsumen rumah tangga menunjukkan peningkatan setiap tahun. Tahun 2017 jumlah pengguna listrik rumah tangga tumbuh 5,05 persen dibandingkan tahun 2016. Total konsumsi listrik oleh rumah tangga selama tahun 2017 mencapai 2.724,48 juta kwh dan memiliki pangsa 53,14 persen terhadap total listrik yang terjual. Rata-rata konsumsi listrik per konsumen rumah tangga mencapai 2.395 kwh setahun.

**Sumber Air Minum Rumah Tangga**

Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya. menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi kesehatan. Air bersih yang digunakan rumah tangga sebagai sumber air minum maupun memasak menjadi aspek yang sangat penting dalam menopang kualitas kesehatan penduduk. Air yang digunakan oleh rumah tangga untuk minum dan memasak bisa berasal dari beberapa sumber. Air minum dan air untuk memasak yang termasuk dalam kategori bersih dan sehat bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Khusus untuk sumber bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter. Sementara, sumber yang lainnya seperti sumur tak terlindung, mata

air tak terlindung apir permukaan (sungai, danau, waduk, rawa, kolam, irigasi), air hujan dan lainnya termasuk dalam kategori sumber air yang kurang memenuhi kaidah bersih dan sehat.

Penggunaan sumber air bersih untuk minum dan memasak oleh rumah tangga DIY selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 90,57 persen rumah tangga telah menggunakan air dari sumber yang bersih dan sehat untuk minum. Sementara, 88,78 persen rumah tangga telah menggunakan air bersih untuk memasak dan 89,02 persen menggunakan air bersih untuk mandi, mencuci, dan lainnya (MCK).

Sumber air yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga untuk minum selama enam tahun terakhir berasal dari sumur dan mata air terlindung. Proporsinya mencapai 38,2 persen dari total rumah tangga pada kondisi Maret 2018 dan polanya cenderung menurun. Proporsi terbesar berikutnya adalah air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa, dan leding. Proporsi ketiganya masing-masing

**Tabel 8.4. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Air Minum Utama, 2013-2018 (%)**

Sumber Air Minum	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Air Kemasan/Isi Ulang	18.0	21.3	22.3	22.9	25.1	25.2
Leding	8.9	8.8	11.5	10.2	9.1	12.9
Pompa	6.7	7.4	8.6	11.4	12.1	14.8
Sumur/Mata Air Terlindung	57.1	53.1	49.9	46.1	43.9	38.2
Sumur/Mata Air Tidak Terlindung	6.0	5.8	3.4	5.0	5.8	5.2
Lainnya	3.4	3.6	4.4	4.5	4.0	3.7
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2013-2018, BPS DIY

sebesar 25,2 persen, 148 persen, dan 12,9 persen. Proporsi rumah tangga yang menggunakan ketiga sumber air tersebut memiliki pola yang semakin meningkat. Sementara, proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber dari sumur/mata air tak terlindungi dan lainnya (air permukaan dan air hujan) masing-masing sebesar 5,3 persen dan 3,7 persen. Proporsi dari kedua sumber tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pola perubahan distribusi rumah tangga menurut sumber air minum tersebut secara kasar menggambarkan adanya perbaikan kualitas kesejahteraan rumah tangga.

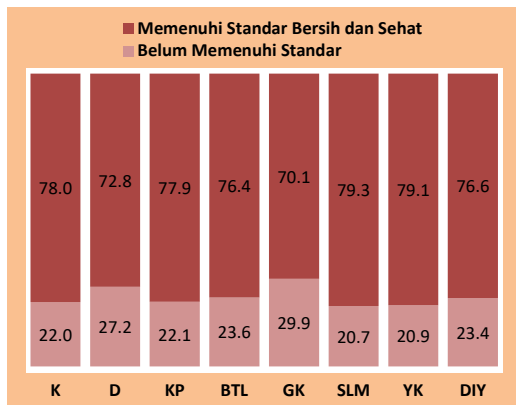
Distribusi rumah tangga berdasarkan air minum yang memenuhi standar bersih dan sehat disajikan dalam Gambar 8.11. Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air yang telah memenuhi standar bersih dan sehat di DIY pada kondisi Maret 2018 mencapai 76,6 persen. Secara umum, proporsi rumah tangga yang telah mengkonsumsi air minum sesuai standar di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dari wilayah perdesaan. Kondisi tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di kawasan perkotaan yang

lebih baik dari rumah tangga di perdesaan. Sementara, proporsi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta juga tercatat lebih tinggi dari kabupaten lainnya. Artinya, kesejahteraan rumah tangga di kedua wilayah lebih baik dari tiga kabupaten lainnya di DIY.

Selain untuk kebutuhan minum, air bersih juga digunakan untuk kegiatan memasak, mandi, mencuci dan lainnya. Sumber air untuk kegiatan tersebut berasal dari sumur, sumur pompa, dan. Proporsi rumah tangga dengan ketiga sumber air tersebut masing-masing sebesar 44,98 persen, 26,16 persen, dan 16,23 persen. Rumah tangga yang menggunakan air dari sumber mata air/ sumur tak terlindungi, air permukaan (danau, rawa, sungai, kolam, irigasi), air hujan, dan lainnya untuk memasak dan MCK jumlahnya juga masih cukup besar yakni sekitar 10 persen.

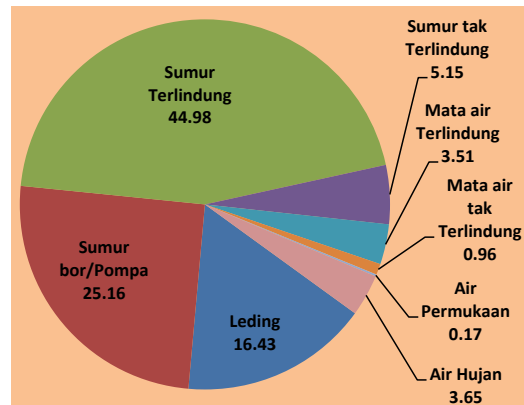
Berdasarkan cara, mayoritas rumah tangga memperoleh air minum tanpa membeli. Proporsi pada Maret 2018 mencapai 63 persen. Sisanya, sebanyak 27 persen rumah tangga memperoleh air minum dengan membeli baik secara

Gambar 8.11. Distribusi Rumah Tangga menurut Wilayah dan Jenis Sumber Air di DIY, 2018 (%)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

Gambar 8.12. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Air untuk Memasak, Mandi, Cuci, dan Lainnya, 2018 (%)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

berlangganan maupun eceran. Tingkat kemudahan untuk mengakses air bersih di daerah perkotaan relatif lebih mudah dibandingkan dengan perdesaan. Bahkan, terdapat beberapa wilayah perdesaan di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo yang sering mengalami kesulitan mengakses air bersih ketika musim kemarau.

**Tempat Pembuangan Air Besar**

Kualitas tempat tinggal juga ditentukan oleh fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan air besar. Fasilitas tempat pembuangan air besar rumah tangga yang layak secara kesehatan atau memenuhi syarat sanitasi bisa dilihat dari aspek kepemilikan fasilitas, jenis kloset yang digunakan, dan tempat pembuangan akhir kotoran/tinja. Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi faktor yang memengaruhi kualitas sanitasi dan sangat diperlukan agar perilaku hidup sehat pada level rumah tangga bisa terjamin.

Berdasarkan hasil Susenas 2016-2018, sebagian besar rumah tangga di DIY telah memiliki fasilitas buang air besar dan digunakan sendiri maupun bersama. Proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas dan digunakan sendiri

oleh ARTnya tercatat semakin meningkat hingga 80,58 persen pada kondisi Maret 2018. Peningkatan proporsi ini secara tidak langsung menggambarkan aspek kesejahteraan rumah tangga yang semakin membaik. Proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas dan digunakan bersama dengan ART dari rumah tangga lain tercatat semakin menurun hingga 15,95 persen. Sementara, proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas milik umum tercatat sebesar 0,94 persen dan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar sebesar 2,52 persen.

Tempat pembuangan akhir tinja dari sebagian besar rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar di DIY sampai tahun 2018 adalah tanki septik. Proporsinya sebesar 86,03 persen dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi terbesar berikutnya adalah rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja jaringan IPAL sebesar 6,16 persen dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kedua jenis tempat pembuangan akhir tinja ini lebih memenuhi syarat kesehatan. Sisanya adalah rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di lubang tanah atau kebun sebesar 5,77 persen; di

**Tabel 8.5. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Fasilitas Buang Air Besar, 2016-2018 (%)**

Fasilitas buang Air Besar	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Ada dan Digunakan Sendiri	77.26	80.55	80.58
Ada dan Digunakan Bersama	19.51	16.30	15.95
Ada, di MCK Umum	1.26	0.68	0.94
Ada, Tidak Digunakan	0.10	0.00	0.01
Tidak Ada Fasilitas	1.88	2.46	2.52
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2016-2018, BPS DIY

**Tabel 8.6. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Fasilitas Buang Air Besar, 2016-2018 (%)**

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki Septik	78.69	85.97	86.03
IPAL	8.37	6.38	6.16
Kolam/Sawah Sungai/Danau/Laut	3.46	1.63	1.81
Lubang Tanah/Kebun	8.64	6.02	5.77
Lainnya	0.84	0.00	0.23
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2016-2018, BPS DIY



sawah/ kolam/sungai dengan proporsi 1,81 persen; dan 0,23 persen lainnya. Ketiga jenis tempat pembuangan akhir tinja ini belum memenuhi standar kesehatan dan sanitasi. Berdasarkan wilayah, sebagian besar rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di bawah standar sanitasi terdapat di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.

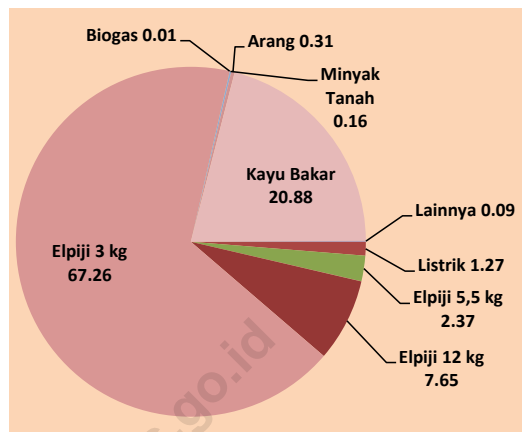
Jenis kloset yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar di DIY adalah jenis leher angsa. Proporsi pada bulan Maret 2018 mencapai 98 persen. Namun, rumah tangga yang menggunakan kloset jenis cemplung/cubluk juga masih cukup banyak, yakni sekitar 2 persen. Semakin besar proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar jenis leher angsa mengindikasikan kesadaran masyarakat tentang sanitasi dan kesehatan yang semakin meningkat. Jenis leher angsa dianggap sebagai jenis pembuangan air besar yang paling sehat, karena di bawahnya terdapat saluran berbentuk huruf “U” untuk menampung air sehingga bau tinja tidak bisa keluar. Perkembangan dalam empat tahun terakhir proporsi penggunaan kloset jenis leher angsa terlihat semakin meningkat.

**Bahan Bakar Utama untuk Memasak**

Karakteristik kesejahteraan penduduk atau rumah tangga juga bisa dikaji berdasarkan jenis bahan bakar utama untuk memasak. Semakin sejahtera rumah tangga, maka kecenderungan untuk berpindah ke bahan bakar yang lebih praktis, efisien, dan ramah lingkungan juga semakin membesar.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, proporsi rumah tangga di DIY yang melakukan aktivitas memasak mencapai

**Gambar 8.13. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2018 (%)**



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

94,65 persen. Sisanya, sebesar 5,35 persen rumah tangga tidak melakukan aktivitas memasak. Jenis bahan bakar utama yang digunakan mayoritas rumah tangga untuk memasak adalah elpiji. Rumah tangga yang menggunakan elpiji untuk memasak mencapai 77,3 persen dengan rincian elpiji 3 kg 67,3 persen, elpiji 12 kg 7,6 persen, dan elpiji 5,5 kg 2,4 persen. Proporsi terbesar berikutnya adalah rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebesar 20,9 persen. Proporsi rumah tangga pengguna bahan bakar yang lainnya bervariasi di bawah 2 persen. Pada umumnya, pengguna kayu bakar tinggal di kawasan perdesaan, terutama di Gunungkidul dan Kulon Progo yang masih memiliki suplai kayu bakar melimpah dan relatif murah. Rumah tangga pengguna kayu bakar juga sangat dominan pada desil pengeluaran kesatu sampai ketiga. Sementara, penggunaan bahan bakar elpiji sangat dominan pada desil pengeluaran kesembilan dan kesepuluh dengan proporsi mencapai 97 persen.

Bab IX



<https://yogyakarta.bps.go.id>

Indikator  
Kemiskinan dan  
Ketimpangan



# Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan menjadi tolok ukur utama kesejahteraan penduduk, semakin tinggi kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan yang semakin memburuk dan semakin rendah kemiskinan mencerminkan kesejahteraan yang semakin membaik. Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan menjadi fokus pertama dari tujuan pembangunan millennium (MDG's) yang dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Sasaran yang ingin dicapai adalah mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di semua tempat. Fakta ini menyiratkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk diatasi dan ditanggulangi.

Gambaran mengenai kondisi kemiskinan, perkembangan, sebaran, dan kedalamannya dapat dikaji menggunakan beberapa indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan yang lazim digunakan adalah ukuran Foster, Greer, Thorbecke (FGT) yang membagi ukuran kemiskinan menjadi tiga, yakni persentase penduduk miskin ( $P_0$ ), Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ), dan indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ).

## Pengukuran Kemiskinan Dan Perkembangan Garis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kultural. Dengan kata lain kemiskinan bersifat multidimensional. Namun demikian, metode pengukuran kemiskinan yang digunakan di banyak negara termasuk Indonesia masih bertumpu pada pendekatan moneter atau ekonomi yang menggunakan basis pendapatan atau pengeluaran. Konsep kemiskinan yang digunakan di Indonesia adalah pendekatan pengeluaran yang dikenal dengan pendekatan kebutuhan dasar minimum (*basic needs approach*). Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang yang mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita sehari ditambah dengan kebutuhan non makanan yang mendasar (pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya). Ukuran ini yang disebut dengan garis kemiskinan. Seseorang akan dikatakan miskin apabila memiliki pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung dalam bentuk absolut berdasarkan survei pengeluaran rumah tangga (Susenas) modul konsumsi.

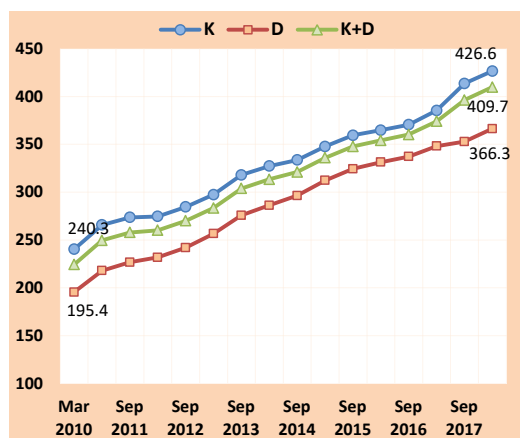
Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di semua tempat menjadi salah satu butir tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sementara, ukuran kemiskinan diestimasi menggunakan data Susenas kor yang dikumpulkan secara berkala di bulan Maret dan September.

Perkembangan garis kemiskinan DIY selama periode 2010-2018 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Peningkatan ini terjadi seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga atau inflasi dan perubahan pola konsumsi penduduk. Nilai nominal garis kemiskinan pada kondisi Maret 2006 tercatat sebesar Rp224,- ribu per kapita sebulan. Nilai nominal ini terus meningkat menjadi Rp410,- ribu pada kondisi bulan Maret 2018. Secara umum, garis kemiskinan DIY tercatat selalu lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional. Faktor ini menjadi salah satu penyebab level kemiskinan DIY yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional, karena ukuran kemiskinan sangat sensitif terhadap garis kemiskinan yang digunakan.

Level garis kemiskinan di wilayah perkotaan selama periode 2010-2018 tercatat selalu lebih tinggi dari wilayah perdesaan. Perbedaan garis kemiskinan

**Gambar 9.1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah di DIY, 2010-2018**



Sumber: Diolah dari Susenas 2010-2018, BPS DIY

antarwilayah tersebut terkait dengan pola konsumsi penduduk perkotaan yang cenderung lebih bervariasi dari penduduk perdesaan. Persoalan kuantitas atau frekuensi konsumsi dan jenis komoditas yang dikonsumsi juga turut memberi pengaruh terhadap perbedaan level garis kemiskinan. Selain itu, perbedaan tingkat pendapatan perkapita antarwilayah yang cukup tinggi dan faktor sosial budaya juga menjadi penyebab perbedaan pola konsumsi antar wilayah. Perkembangan nilai nominal garis kemiskinan di wilayah perkotaan maupun perdesaan menunjukkan pola yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan harga barang dan jasa.

### Perkembangan Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin (*Head Count* atau disingkat HC) di DIY selama periode 2010-2018 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Namun demikian, polanya terlihat cukup berfluktuasi. Pada kondisi Maret tahun 2010, jumlah penduduk miskin di DIY tercatat sebanyak 577,3 ribu jiwa dengan persentase (*Head Count Index* atau HCI) sebesar 16,83 persen. Secara bertahap, jumlah penduduk miskin maupun persentasenya semakin menurun hingga mencapai 460,1 ribu jiwa atau sebesar 12,13 persen di bulan Maret 2018.

Berdasarkan data *series* selama periode 2010-2018, jumlah penduduk miskin di DIY tercatat beberapa kali mengalami peningkatan yakni pada kondisi September 2011, Maret 2014, Maret 2015, dan Maret 2016. Peningkatan ini terjadi akibat kenaikan harga yang cukup tinggi terutama berkaitan dengan kenaikan harga bahan makanan, bahan bakar, dan energi. Kenaikan harga ini berimplikasi pada kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga lainnya, sehingga

**Tabel 9.1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah di DIY, 2010-2018**

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	000 Jiwa	P <sub>0</sub> (%)	000 Jiwa	P <sub>0</sub> (%)	000 Jiwa	P <sub>0</sub> (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2010	308.4	13.98	268.9	21.95	577.3	16.83
Mar 2011	304.3	13.16	256.6	21.82	560.9	16.08
Sep 2011	298.9	12.88	265.3	22.57	564.2	16.14
Mar 2012	305.9	13.13	259.4	21.76	565.3	16.05
Sep 2012	306.5	13.10	255.6	21.29	562.1	15.88
Mar 2013	315.5	13.43	234.7	19.29	550.2	15.43
Sep 2013	325.5	13.73	209.7	17.62	535.2	15.03
Mar 2014	333.0	13.81	211.8	17.36	544.9	15.00
Sep 2014	324.4	13.36	208.2	16.88	532.6	14.55
Mar 2015	329.7	13.43	220.6	17.85	550.2	14.91
Sep 2015	292.6	11.93	192.9	15.62	485.6	13.16
Mar 2016	297.7	11.79	197.2	16.63	494.9	13.34
Sep 2016	301.3	11.68	187.6	16.27	488.8	13.10
Mar 2017	309.0	11.72	179.5	16.11	488.5	13.02
Sep 2017	298.4	11.00	167.9	15.86	466.3	12.36
Mar 2018	305.2	11.03	154.9	15.12	460.1	12.13

Sumber: Diolah dari Susenas 2010-2018, BPS DIY

garis kemiskinan juga meningkat dan secara otomatis jumlah penduduk miskin (jiwa) maupun persentasenya juga meningkat.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat selalu lebih tinggi dari perkotaan selama lebih dari satu dekade terakhir. Hal ini terlihat dari persentase penduduk miskin perdesaan levelnya yang selalu lebih tinggi dari perkotaan. Meskipun demikian, dari sisi jumlah penduduk miskin (jiwa) daerah perkotaan sudah melampaui daerah perdesaan sejak tahun 2005 akibat pengaruh klasifikasi status wilayah *urban/rural*. Perkembangan kemiskinan di daerah perkotaan tercatat semakin menurun secara

bertahap dari 13,98 persen atau 308,4 ribu jiwa di bulan Maret 2010 menjadi 11,03 persen atau 305,2 ribu jiwa di bulan Maret 2018. Kemiskinan di wilayah perkotaan terlihat meningkat di bulan Maret 2012-Maret 2014, Maret 2017, dan Maret 2018.

Tingkat kemiskinan di daerah perdesaan juga tercatat semakin menurun secara bertahap dari 268,9 ribu jiwa atau 21,95 persen pada kondisi bulan Maret 2010 menjadi 154,9 ribu jiwa atau 15,12 persen pada bulan Maret 2018. Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan terlihat meningkat pada kondisi bulan September 2011, Maret 2015, dan Maret 2016. Namun, dalam dua tahun terakhir kemiskinan perdesaan terlihat menurun secara nyata.

### Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan tidak sekedar mencakup urusan jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, persoalan juga menyangkut dimensi kedalaman (*poverty gap index*) dan keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Secara sederhana, indeks kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Sementara, indeks keparahan kemiskinan (P2) menyatakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman dan keparahan menunjukkan persoalan kemiskinan yang semakin kronis.

Berdasarkan data *series* selama Maret 2010 sampai Maret 2018, terdapat kecenderungan penurunan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan baik secara rata-rata maupun di wilayah perkotaan dan perdesaan. Penurunan ini menjadi sinyal yang

**Tabel 9.2. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2010-2018**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )			Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2010	2,27	3,89	2,85	0,56	1,02	0,73
Mar 2011	1,93	3,67	2,51	0,50	0,93	0,65
Sep 2011	1,93	3,54	2,48	0,48	0,81	0,59
Mar 2012	3,56	3,29	3,47	1,32	0,79	1,14
Sep 2012	2,29	4,07	2,89	0,58	1,09	0,75
Mar 2013	2,08	3,02	2,40	0,50	0,63	0,55
Sep 2013	2,18	2,03	2,13	0,52	0,34	0,46
Mar 2014	2,22	2,11	2,19	0,53	0,40	0,48
Sep 2014	2,03	2,98	2,35	0,52	0,79	0,61
Mar 2015	2,55	3,70	2,93	0,71	1,09	0,83
Sep 2015	2,19	2,57	2,32	0,60	0,68	0,63
Mar 2016	1,78	3,41	2,30	0,38	1,05	0,59
Sep 2016	1,26	2,83	1,75	0,22	0,67	0,36
Mar 2017	2,15	2,29	2,19	0,58	0,47	0,55
Sep 2017	1,79	2,86	2,09	0,39	0,64	0,46
Mar 2018	1,91	2,48	2,07	0,47	0,59	0,50

Sumber: Diolah dari Susenas 2010-2018, BPS DIY

mengembirakan bagi pengentasan kemiskinan, meskipun dari sisi pola terlihat cukup berfluktuasi.

Nilai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DIY pada bulan kondisi Maret 2018 masing-masing sebesar 2,07 dan 0,50. Indeks kedalaman sedikit menurun dibandingkan dengan kondisi September 2018. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada kondisi Maret 2018 semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara, indeks keparahan tercatat sedikit meningkat. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin sedikit melebar.

Selama periode 2010-2018, indeks

kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di daerah perdesaan tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Tetapi, pada kondisi bulan Maret 2012, September 2013 dan Maret 2014 nilai kedua indeks di daerah perdesaan justru lebih rendah. Pada kondisi Maret 2018 indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan daerah perkotaan tercatat sebesar 1,91 dan 0,47. Kedua indeks tersebut lebih meningkat dibandingkan dengan kondisi September 2017.

Nilai kedua indeks di daerah perdesaan tercatat sebesar 2,48 dan 0,59. Kedua indeks tersebut tercatat sedikit menurun dibandingkan dengan kondisi September 2017. Secara umum, lebih tingginya nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah perdesaan menggambarkan persoalan kemiskinan di perdesaan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan daerah perkotaan.

### Sebaran Penduduk Miskin menurut Kabupaten/ Kota

Distribusi penduduk miskin menurut wilayah kabupaten/kota di DIY menunjukkan pola yang tidak merata. Ketidakmerataan ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin (HC) maupun persentasenya (HCI) yang sangat bervariasi antar wilayah. Berdasarkan jumlah, sebaran penduduk miskin tahun 2016-2017 sebagian besar terdapat di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Jumlah penduduk miskin di kedua kabupaten tercatat sebesar 139,67 ribu dan 135,74 ribu jiwa pada kondisi tahun 2017. Sementara, populasi penduduk miskin yang terendah terdapat di Kota Yogyakarta sebesar 32,20 ribu jiwa.

Berdasarkan ukuran persentase ( $P_0$ ), maka Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul menjadi dua daerah yang

Tabel 9.3. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Indeks Kedalaman dan Keperahan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Wilayah di DIY, 2016-2017

Kabupaten/ Kota	2016					2017				
	GK (Rp)	HC (000 Jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp)	HC (000 Jiwa)	P0	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulon Progo	297 353	84.34	20.30	3.55	1.00	312 403	84.17	20.03	2.79	0.64
Bantul	332 057	142.76	14.55	2.02	0.41	347 476	139.67	14.07	2.21	0.56
Gunungkidul	264 637	139.15	19.34	4.16	1.30	277 261	135.74	18.65	3.36	0.79
Sleman	334 406	96.63	8.21	1.36	0.34	351 331	96.75	8.13	1.23	0.28
Yogyakarta	401 193	32.06	7.70	1.05	0.19	423 815	32.20	7.64	1.58	0.48
<b>DIY</b>	<b>354 084</b>	<b>494.94</b>	<b>13.34</b>	<b>2.30</b>	<b>0.59</b>	<b>374 009</b>	<b>488.53</b>	<b>13.02</b>	<b>2.19</b>	<b>0.55</b>

Sumber: Diolah dari Susenas 2016-2017, BPS DIY

memiliki level kemiskinan tertinggi di DIY. Persentase penduduk miskin di kedua kabupaten pada kondisi Maret 2017 tercatat sebesar 20,03 persen dan 18,65 persen. Sementara, Kota Yogyakarta dengan persentase penduduk miskin 7,64 persen dan Kabupaten Sleman 8,13 persen menjadi dua daerah dengan persentase penduduk miskin terendah di DIY.

Secara umum, perbedaan level kemiskinan antarwilayah tersebut merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk antarwilayah yang cukup heterogen. Perbedaan kondisi geografis, struktur ekonomi, kualitas infrastruktur publik terutama sarana pendidikan, sarana kesehatan serta infrastruktur perekonomian seperti pasar, baik dari sisi ketersediaan maupun kemudahan dalam mengakses menjadi penjelas perbedaan kualitas kesejahteraan masyarakat yang cukup mencolok tersebut. Perkembangan kemiskinan di kabupaten/kota selama lima tahun terakhir secara umum menunjukkan pola yang menurun. Penurunan dari sisi jumlah yang terbesar terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Sementara, penurunan dari sisi persentase yang terbesar terjadi di Kabupaten Kulon Progo.

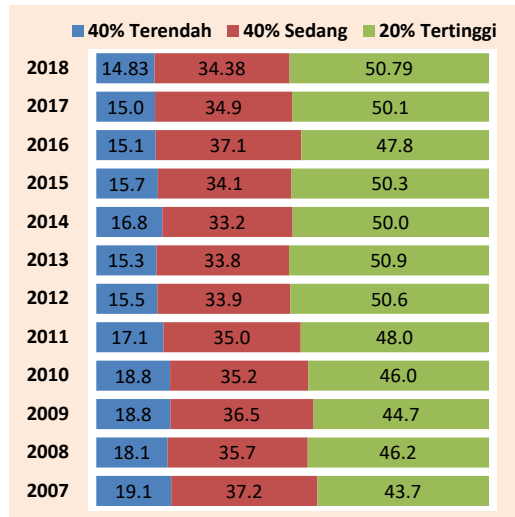
### Perkembangan Distribusi Pendapatan

Kebijakan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi di satu sisi berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan penduduk secara rata-rata. Namun, di sisi lain juga membawa persoalan berupa peningkatan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena distribusi aset dan *skill* yang tidak tersebar secara merata antarpenduduk. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh juga sangat bervariasi sesuai dengan kepemilikan aset dan keterampilan yang dimiliki. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan antarpenduduk (distribusi ukuran) adalah ukuran Bank Dunia, Gini Rasio, indeks Theil, Ukuran Desil, dan lainnya.

Berdasarkan data Susenas pada bulan Maret tahun 2007-2018, distribusi pendapatan penduduk yang diproksi dengan pendekatan pengeluaran perkapita menunjukkan pola yang semakin tidak merata atau semakin timpang. Pada kondisi Maret 2018, 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah memiliki *share* pengeluaran sebesar 14,83 persen dari total pengeluaran penduduk DIY. Angka ini terlihat semakin menurun jika dibandingkan



Gambar 9.2. Perkembangan Distribusi Pengeluaran menurut Kelompok Pendapatan Penduduk di DIY, 2007-2018 (Persen)

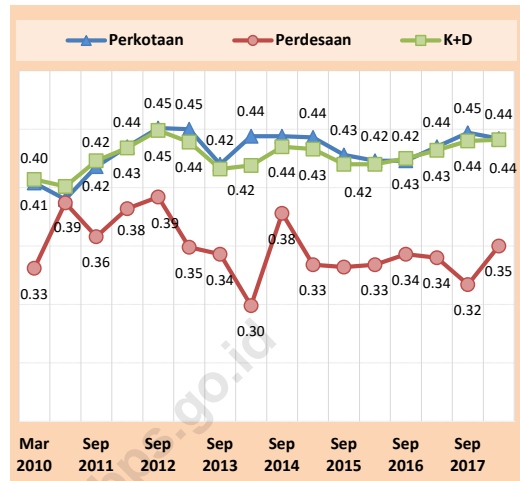


Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2007-2018, BPS DIY

dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada kondisi Maret 2007, *share* pengeluaran kelompok 40 persen berpendapatan terendah tercatat sebesar 19,1 persen dari total pengeluaran penduduk. Sebaliknya, penduduk pada golongan pendapatan 20 persen tertinggi memiliki porsi pengeluaran sebesar 50,79 persen. Porsi ini jauh meningkat dibandingkan dengan kondisi Maret 2007 yang mencapai 43,7 persen dari total pengeluaran penduduk DIY. Jika dihitung menggunakan rasio Kuznets maka total pengeluaran 20% penduduk berpendapatan tertinggi besarnya 3,4 kali lipat pengeluaran 40 % penduduk pada golongan berpendapatan terendah. Rasio Kuznets bulan Maret 2018 ini jauh meningkat dibandingkan dengan kondisi Maret 2007 yang sebesar 2,3 kali. Secara umum, beberapa ukuran tersebut mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk yang semakin melebar.

Fenomena adanya ketimpangan pendapatan antarpenduduk yang cukup lebar diperjelas oleh nilai koefisien

Gambar 9.3. Perkembangan Indeks Gini menurut Wilayah di DIY, 2010-2018 (Persen)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2010-2018, BPS DIY

Gini pada bulan Maret 2018 yang mencapai 0,44 atau berada pada kategori ketimpangan moderat. Perkembangan indeks Gini selama periode 2010-2018 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat secara berfluktuasi. Kecenderungan peningkatan nilai indeks Gini menggambarkan distribusi pendapatan antarpenduduk yang bergerak semakin tidak merata. Kondisi distribusi pengeluaran di daerah perdesaan tercatat lebih merata jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Sementara, jika dibandingkan dengan level nasional, maka nilai indeks Gini DIY selalu terlihat lebih tinggi atau kondisi distribusi pendapatannya lebih timpang.



# Indikator Sosial Lainnya



# Indikator Sosial Lainnya

Kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat juga diindikasikan oleh meningkatnya aktivitas pariwisata, kemudahan mengakses informasi dan komunikasi, tingkat keamanan, rendahnya tingkat kejahatan, serta kemudahan dalam mengakses kehidupan spiritual.

Tingkat kesejahteraan penduduk juga bisa dikaji dari aspek sosial yang lain. Peningkatan kesejahteraan penduduk akan ditandai dan diikuti oleh meningkatnya beberapa aktivitas seperti perjalanan dan kegiatan pariwisata, kemudahan dalam mengakses media informasi dan komunikasi, tingkat keamanan yang membaik, tingkat kejahatan yang menurun, dan kemudahan dalam mengakses kehidupan spiritual. Aktivitas wisata yang merupakan bentuk kebutuhan tersier penduduk. Semakin tinggi kesejahteraan seseorang, maka akan semakin tinggi pula peluangnya untuk memenuhi kebutuhan non primer, termasuk kebutuhan berwisata. Di sisi yang lain, tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah juga bisa dipengaruhi dan ditentukan oleh tingkat kunjungan wisatawan dari daerah lain. Semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan dapat memberi dampak penambahan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui belanja yang dikeluarkan oleh para wisatawan.

Akses terhadap media informasi dan komunikasi merupakan basis perkembangan pengetahuan seseorang. Berbagai informasi dapat mengubah pandangan dan cara hidup ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, kepemilikan sarana beserta kemudahan dalam mengakses media informasi juga bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang. Ukuran kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari kegiatan non ekonomi yang menyangkut kebutuhan spiritual seperti keagamaan. Waktu yang dimiliki tidak semata-mata untuk kegiatan mencari nafkah, tetapi juga harus bisa meluangkan waktu untuk kegiatan keagamaan. Khususnya pada masyarakat muslim, tingkat kesejahteraan secara umum bisa dilihat dari peningkatan jumlah jamaah haji dari waktu ke waktu.

## Pariwisata dan Perjalanan

Pariwisata merupakan industri yang digerakkan oleh permintaan atau dihidupi oleh wisatawan dan supplainya disediakan oleh kegiatan sektoral terutama lapangan usaha akomodasi, makan dan minum, transportasi, jasa, dan lainnya. DIY dikenal menjadi salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang banyak memiliki potensi baik wisata alam maupun budaya, baik wisata yang bersifat masal maupun minat khusus. Kegiatan pariwisata

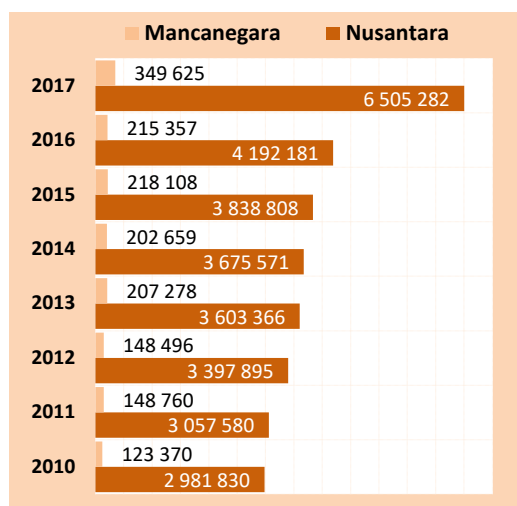
di DIY senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan eksistensinya, dengan harapan dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas pariwisata adalah jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara. Jumlah wisatawan yang berkunjung bisa diukur dengan pendekatan jumlah wisatawan yang menginap di hotel dan akomodasi lain di wilayah DIY atau berdasarkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke setiap destinasi wisata di wilayah DIY.

Secara umum, perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya terlihat semakin meningkat. Jumlah wisatawan yang menginap selama tahun 2017 tercatat sebanyak 6,85 juta orang. Komposisinya terdiri dari 6,5 juta wisatawan nusantara/domestik dan 349,6 ribu wisatawan asing atau mancanegara. Artinya, wisatawan nusantara sangat mendominasi dengan pangsa 96 persen. Selama tujuh tahun

terakhir, jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel dan akomodasi di DIY rata-rata tumbuh 12 persen per tahun. Pertumbuhan ini lebih dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan nusantara yang polanya cenderung meningkat. Sementara, perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara terlihat lebih berfluktuasi dan secara jumlah tidak dominan.

Secara umum, banyaknya wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang menginap di DIY selama tahun 2017 tumbuh sangat tinggi. Pertumbuhan total wisatawan tercatat sebesar 55,53 persen. Pertumbuhan ini tercatat paling tinggi dalam satu dekade terakhir. Bermunculannya kawasan wisata baru di beberapa lokasi dan meningkatnya jumlah hotel maupun kamar mendorong pertumbuhan wisatawan selama tahun 2017. Wisatawan nusantara mampu tumbuh 55,18 persen, sementara wisatawan asing tumbuh 62,5 persen setelah tahun sebelumnya tumbuh negatif. Berdasarkan negara asalnya, jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di

Gambar 10.1. Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2010-2017 (Orang)



Sumber: BPS DIY, 2010-2017

Tabel 10.1. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2011-2017 (Persen)

Tahun	Wisatawan Nusantara		Wisatawan Mancanegara		Pertumbuhan Total
	Pertumbuhan	Pangsa	Pertumbuhan	Pangsa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	2.54	95.36	20.58	4.64	3.26
2012	11.13	95.81	-0.18	4.19	10.61
2013	6.05	94.56	39.58	5.44	7.45
2014	2.00	94.77	-2.23	5.23	1.77
2015	4.44	94.62	7.62	5.38	4.61
2016	9.21	95.11	-1.26	4.89	8.64
2017	55.18	96.11	62.35	5.89	55.53

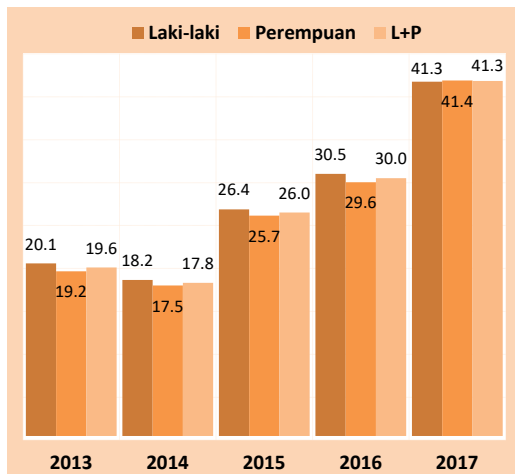
Sumber: BPS DIY, 2010-2017

hotel bintang dan non bintang pada tahun 2017 sebagian besar berasal dari negara Belanda, Jepang, dan Malaysia.

Aktivitas wisata penduduk domestik DIY dapat diukur menggunakan indikator perjalanan. Konsep perjalanan yang digunakan BPS dalam kegiatan Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan waktu referensi pencacahan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah, serta bersifat bukan perjalanan rutin. Perjalanan yang dicakup adalah bepergian ke obyek pariwisata atau menginap di akomodasi komersial atau menempuh jarak 100 km atau lebih secara pulang pergi.

Gambar 10.2 menyajikan perkembangan proporsi penduduk DIY yang melakukan kegiatan perjalanan selama 6 bulan terakhir waktu pencacahan hasil Susenas periode 2013-2017. Jumlah penduduk DIY yang melakukan kegiatan perjalanan pada tahun 2017 mencapai 41,3 persen. Proporsi ini meningkat secara nyata

**Gambar 10.2. Proporsi Penduduk DIY yang Melakukan Kegiatan Perjalanan Selama 6 Bulan Terakhir, 2013-2017**



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2013-2017, BPS DIY

dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Peningkatan proporsi ini menggambarkan mobilitas penduduk untuk aktivitas wisata yang semakin meningkat. Secara rata-rata, jumlah perjalanan yang dilakukan selama enam bulan terakhir adalah 2 kali perjalanan. Aktivitas perjalanan untuk tujuan tersebut membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga peningkatannya juga menggambarkan peningkatan belanja penduduk untuk kegiatan perjalanan khususnya wisata. Hal ini sekaligus menggambarkan peningkatan kesejahteraan penduduk. Secara umum, tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam hal kegiatan perjalanan.

Berdasarkan tujuan, sebagian besar perjalanan terakhir yang dilakukan oleh penduduk DIY selama tahun 2017 bertujuan untuk kegiatan berlibur/rekreasi. Tujuan terbesar berikutnya adalah mengunjungi teman/keluarga. Berdasarkan wilayah tujuan, lebih dari 90 persen perjalanan memiliki tujuan ke provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Sementara, perjalanan ke luar Pulau Jawa didominasi oleh tujuan ke Bali dan Nusa Tenggara.

### Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Kesejahteraan penduduk memiliki relasi dengan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai sumber. Semakin sejahtera penduduk, maka akan semakin mudah akses penduduk terhadap sumber informasi. Hal ini akan direpresentasikan oleh semakin besarnya proporsi penduduk yang bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dan mengakses informasi. Dalam era globalisasi, berbagai informasi yang ada di seluruh belahan dunia dapat diakses melalui berbagai media termasuk media elektronik. Seiring dengan

perkembangan kemajuan teknologi, maka rumah tangga sudah tidak hanya menggunakan PC (*personal Computer*) di rumah tangga untuk mengakses informasi. Masyarakat sudah mulai beralih menggunakan media lain seperti telepon seluler, tablet, dan berbagai media lainnya untuk mengakses berbagai kebutuhan informasi dan pengetahuan.

Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2017 dan 2018, proporsi penduduk DIY yang memiliki/menguasai dan menggunakan telepon seluler (HP) serta menggunakan komputer (PC)/laptop/tablet tercatat semakin meningkat. Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi pada proporsi penduduk yang mengakses internet. Tidak semua penduduk yang memiliki dan menggunakan sarana informasi dan komunikasi juga menggunakannya untuk mengakses internet. Proporsi penduduk yang mengakses internet hanya 55,5 persen

pada kondisi Maret 2018, sementara yang menggunakan HP sebesar 78,4 persen dan menggunakan komputer (PC)/laptop/tablet sebesar 29 persen.

Secara umum, proporsi penduduk yang memiliki atau menguasai dan menggunakan sarana informasi di wilayah perkotaan lebih besar dari wilayah perdesaan. Gapnya tercatat cukup besar, bahkan untuk proporsi yang mengakses internet gapnya mencapai 27 persen. Selisih angka ini menggambarkan banyak hal, mulai dari aspek kesejahteraan yang berbeda yang berpengaruh terhadap perbedaan pola, gaya hidup, dan kepemilikan sarana informasi dan komunikasi, ketersediaan infrastruktur penunjang, sampai tingkat kemudahan dalam mengakses sarana yang tersedia. Perbandingan menurut jenis kelamin tidak menunjukkan gap atau selisih yang cukup besar. Namun, secara umum proporsi penduduk laki-laki yang memiliki

**Tabel 10.2. Persentase Penduduk yang Memiliki dan Menggunakan Sarana Informasi Komunikasi serta Mengakses Internet Tiga Bulan Terakhir menurut Wilayah/Jenis Kelamin/Usia di DIY, 2017-2018**

Wilayah/Jenis Kelamin/Usia		Menggunakan Telepon Seluler		Memiliki Telepon Seluler/Nirkabel		Menggunakan Komputer/Laptop/Tablet		Mengakses Internet	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Wilayah	Perkotaan	78.1	81.4	70.1	72.3	33.6	34.6	53.2	62.8
	Perdesaan	65.7	70.5	55.3	57.5	12.8	14.1	26.9	35.8
	<b>K+D</b>	<b>74.4</b>	<b>78.4</b>	<b>65.7</b>	<b>68.3</b>	<b>27.4</b>	<b>29.0</b>	<b>45.4</b>	<b>55.5</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	77.4	81.4	70.6	72.3	29.1	30.8	48.3	58.2
	Perempuan	71.5	75.5	60.9	64.4	25.8	27.3	42.5	52.8
	<b>L+P</b>	<b>74.4</b>	<b>78.4</b>	<b>65.7</b>	<b>68.3</b>	<b>27.4</b>	<b>29.0</b>	<b>45.4</b>	<b>55.5</b>
Kelompok Usia	Usia 5-12	47.1	60.6	18.7	24.1	18.2	20.2	20.8	32.2
	Usia 13-15	89.0	93.4	79.3	81.4	63.3	68.2	82.4	85.6
	Usia 16-18	96.5	97.3	94.9	94.0	71.3	73.6	92.1	95.5
	Usia 19-24	98.2	98.3	97.7	96.8	61.4	60.3	92.3	95.4
	Usia 25-35	96.3	97.8	92.9	95.1	33.7	37.7	74.5	88.2
	Usia 36-64	74.9	78.6	66.8	70.0	16.4	17.2	29.1	41.9
	65+	26.4	29.6	19.8	22.3	1.3	1.6	2.5	6.0

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2017-2018, BPS DIY

dan menggunakan sarana informasi dan komunikasi serta mengakses internet tercatat lebih besar dari perempuan. Sementara, perbandingan menurut kelompok usia menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler terbesar terdapat pada kelompok usia 19-24 tahun dan 25-35 tahun.

Proporsi penggunaan komputer/laptop dan akses internet terbesar terdapat pada kelompok usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Penduduk pada usia muda (16-35 tahun) menjadi kelompok yang paling aktif dalam penggunaan media komunikasi dan informasi. Pada umumnya, mereka melakukan aktivitas mengakses internet untuk kebutuhan aktualisasi diri di media/ jejaring sosial seperti Facebook, WA, Twitter, Instagram, BBM, dan lainnya; sarana mencari berita dan informasi terkait kesempatan kerja, tugas sekolah/kampus; serta aktivitas hiburan.

Perkembangan proporsi penduduk DIY yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir referensi waktu pencacahan mengalami peningkatan secara signifikan. Jika pada kondisi Maret 2015 proporsinya

hanya sebesar 35 persen, maka pada kondisi Maret 2018 meningkat di atas 55 persen. Artinya, populasi penduduk DIY yang mengakses internet semakin bertambah dan terjadi peningkatan proporsi sebesar 20,5 persen selama tahun 2015-2018. Peningkatan yang tertinggi terjadi dalam rentang satu tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang berjalan sangat pesat dan tingkat harga sarana untuk mengakses informasi (*gadget*) yang semakin terjangkau.

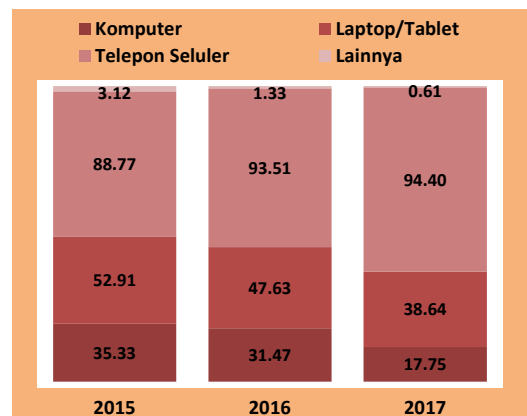
Secara kewilayahan, proporsi terbesar penduduk yang mengakses internet masih tercatat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Proporsi masing-masing sebesar 73,39 persen dan 65,87 persen penduduk. Besarnya populasi pengakses internet ini memiliki relasi positif dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat kesejahteraan tertinggi di DIY. Sementara, proporsi yang terendah tercatat di Gunungkidul sebesar 34,98 persen. Proporsi penduduk yang mengakses internet di semua wilayah memiliki kecenderungan yang semakin meningkat dan peningkatan terbesar tercatat di Bantul.

**Tabel 10.3. Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di DIY (Persen)**

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulon Progo	25.90	30.94	31.84	42.33
Bantul	33.45	36.09	44.29	55.95
Gunungkidul	18.54	19.05	26.12	34.98
Sleman	43.21	49.36	57.37	65.87
Yogyakarta	52.98	57.83	61.00	73.39
DIY	34.98	38.84	45.38	55.45

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2015-2018, BPS DIY

**Gambar10.3. Proporsi Penduduk yang Mengakses Internet menurut Jenis Media di DIY**



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2015-2017, BPS DIY



Media yang dapat digunakan untuk mengakses internet adalah desktop (PC), laptop, Tablet, Handphone, maupun media lainnya. Sampai dengan tahun 2018, penduduk yang mengakses internet sebagian besar menggunakan media telepon seluler (HP). Proporsinya mencapai 94,4 persen dari pengguna internet. Angka ini semakin bertambah setiap tahun. Sementara, penggunaan media PC, Laptop, dan lainnya cenderung menurun. Hal ini menggambarkan adanya perubahan pemanfaatan media untuk mengakses internet. Penggunaan handphone tidak lagi hanya untuk alat telepon atau SMS saja, namun sudah mulai berkembang untuk *browsing* internet dan media sosial. Keunggulan HP adalah bisa melakukan aktivitas secara *mobile* di semua tempat dengan catatan tidak ada kendala sinyal jaringan.

Sebagian besar pengguna internet di DIY mengakses internet di rumah sendiri. Proporsinya mencapai 97,36 persen dari total pengguna internet. Lokasi berikutnya adalah kantor/tempat kerja, tempat umum, dan secara bergerak (*mobile*). Berdasarkan jenis konten internet yang diakses, sebagian besar penduduk mengakses internet untuk media/jejaring sosial dan mendapatkan berita/informasi dengan proporsi masing-masing sebesar 89,9 persen dan 76,8 persen dari total mengakses internet. Penduduk yang menggunakan internet untuk hiburan, tugas sekolah, dan email proporsinya di bawah 30 persen. Sementara, penduduk yang menggunakan internet untuk kegiatan perdagangan/jual beli barang dan jasa serta aktifitas *e-banking* masih relatif rendah.

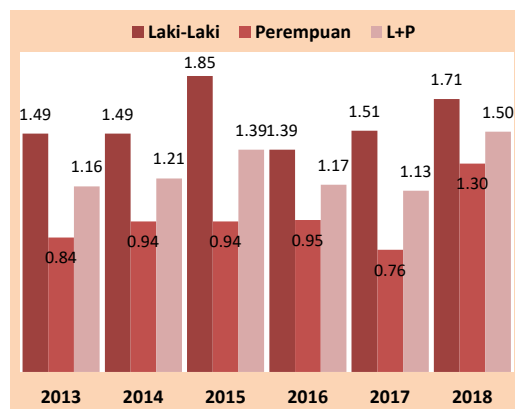
### Tindak Kejahatan

Tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah juga bisa digambarkan

oleh indikator tingkat keamanan maupun tindak kejahatan yang terjadi. Wilayah yang kurang aman dan rawan kejahatan akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak nyaman untuk tinggal di tempat tinggalnya sendiri. Hal ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut menurun. Peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sangat strategis. Namun, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sendiri juga sangat dibutuhkan.

Proporsi penduduk DIY yang menjadi korban kejahatan selama satu tahun terakhir dari referensi pencacahan periode 2013-2018 bervariasi antara 1-2 persen. Pada kondisi Maret 2018 proporsinya mencapai 1,5 persen. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017. Jenis kejahatan yang ditanyakan adalah pencurian, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih rentan menjadi korban kejahatan

**Gambar10.4. Proporsi Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin di DIY, 2013-2018 (%)**

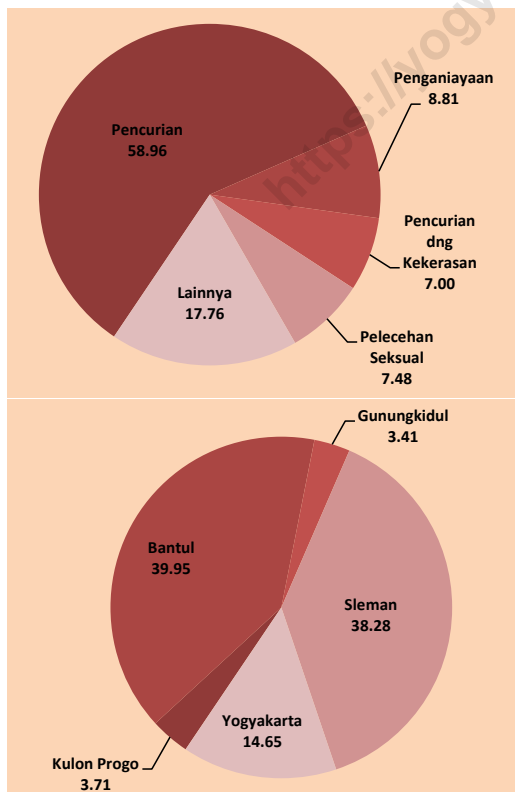


Sumber: diolah dari Susenas Maret 2013-2018, BPS DIY

dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2018, proporsi penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan tercatat sebesar 1,71 persen dan perempuan sebesar 1,3 persen. Berdasarkan wilayah, penduduk perkotaan lebih rentan menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan penduduk perdesaan.

Jenis kejahatan yang paling banyak dialami oleh penduduk DIY selama satu tahun terakhir dari referensi pencacahan pada kondisi Maret 2018 adalah kejahatan pencurian. Proporsinya mencapai 58,96 persen. Berikutnya adalah penganiayaan dengan proporsi 8,8 persen, serta

**Gambar10.5. Sebaran Kasus Kejahatan menurut Jenis dan Wilayah di DIY, 2018 (%)**



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

pelecehan seksual dengan proporsi 7,48 persen. Berdasarkan wilayah, kasus kejadian kejahatan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Bantul dan Sleman dengan proporsi masing-masing sebesar 39,95 persen dan 38,28 persen. Sebagian besar kejadian kejahatan terjadi di dalam rumah tempat tinggal, kecuali kejadian pelecehan seksual. Kejahatan pelecehan seksual lebih banyak terjadi di luar rumah tempat tinggal.

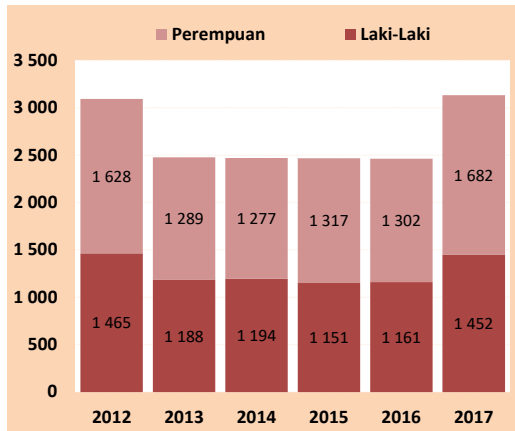
Salah satu tindakan yang diambil oleh korban kejahatan adalah melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Berdasarkan Susenas Maret 2018, banyaknya kejadian kejahatan di DIY yang dilaporkan ke kepolisian mencapai 29,75 persen. Inisiatif masyarakat untuk melakukan pelaporan terlihat semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 23,4 persen. Dari seluruh kejadian kejahatan yang dilaporkan selama tahun 2018, proporsi kejadian yang masih dalam penanganan pihak kepolisian mencapai 35,3 persen.

**Perkembangan Jumlah Jemaah Haji**

Pembangunan kehidupan beragama bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan pelayanan jemaah haji.

Perkembangan jumlah jemaah haji dari DIY selama enam tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Jumlah jemaah haji pada tahun 2012 tercatat sebanyak 3.093 orang terdiri dari 1.465 laki-laki dan 1.628 perempuan. Jumlah ini semakin menurun hingga 2.463 orang di tahun 2016 atau turun 5,5 persen setiap tahun selama periode 2012-2016. Penurunan jumlah ini

Gambar10.6. Jumlah Jamaah Haji Asal DIY menurut Jenis Kelamin, 2012-2017 (orang)

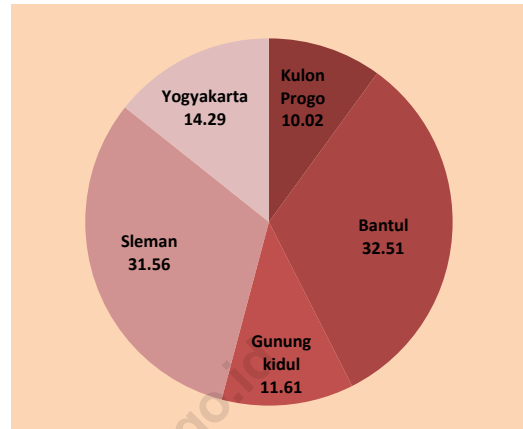


Sumber: Kanwil Kemenag DIY

dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian jumlah kuota haji akibat perluasan area di Masjidil Haram. Namun demikian, selama tahun 2017 jumlah jemaah haji kembali meningkat menjadi 3.134 jemaah akibat penambahan jumlah kuota. Komposisinya adalah 1.452 jemaah laki-laki dan 1.682 jemaah perempuan. Meskipun dari sisi kuota mengalami sedikit penurunan selama 2013-2016, kesejahteraan penduduk DIY secara umum semakin meningkat. Hal ini ditandai oleh fenomena meningkatnya daftar tunggu keberangkatan haji yang sudah melebihi 20 tahun. Artinya, minat umat Islam di DIY untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini semakin meningkat akibat perbaikan kesejahteraan.

Rasio jemaah haji per 100.000 penduduk pemeluk agama Islam pada tahun 2017 sebesar 94. Ini berarti bahwa dari setiap 100 ribu penduduk muslim DIY sekitar 94 orangnya menunaikan ibadah haji pada tahun 2017. Secara umum, jumlah jemaah haji perempuan tercatat masih lebih dominan dibandingkan jumlah jemaah haji laki-laki. Berdasarkan wilayah asal, jemaah haji DIY pada tahun 2017 didominasi oleh jemaah dari Kabupaten Bantul dan Sleman.

Gambar10.7. Sebaran Jamaah Haji DIY menurut Kabupaten/Kota Asal, 2017 (Persen)



Sumber: Kanwil Kemenag DIY

Proporsi jemaah haji dari kedua kabupaten tersebut masing-masing mencapai 32,51 persen dan 31,56 persen. Sementara, jemaah haji asal Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat memiliki proporsi yang terendah. Gambaran ini cukup selaras dengan tingkat kesejahteraan penduduk dari aspek yang lainnya.

Bab **XI**



<https://yogyakarta.bps.go.id>

Penutup



# Penutup

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Perkembangan capaian berbagai indikator ekonomi dan sosial yang semakin membaik secara umum menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk DIY secara rata-rata yang semakin meningkat.

Terdapat kecenderungan bahwa capaian berbagai indikator ekonomi maupun sosial yang menggambarkan aspek kesejahteraan penduduk di wilayah perkotaan masih lebih baik dari wilayah perdesaan.

Tingkat kesejahteraan penduduk terbaik menurut wilayah kabupaten/kota berdasarkan beberapa indikator dicapai Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman.

Perbandingan capaian beberapa indikator yang terkait dengan angkatan kerja, pendidikan, dan kesehatan menurut aspek gender menunjukkan bahwa laki-laki memiliki capaian yang lebih baik dari perempuan. Namun, dari sisi partisipasi sekolah sudah menuju ke arah kesetaraan.

Aspek yang menjadi kontradiksi adalah tingkat kemiskinan DIY yang levelnya masih tinggi dan penurunannya berjalan relatif lambat serta persoalan ketimpangan pendapatan antarpenduduk yang semakin melebar.

### Saran

Gap kesejahteraan penduduk antarwilayah perkotaan dan perdesaan serta antar kabupaten/kota harus dikurangi secara bertahap dengan lebih memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran.

Aspek kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang kontras dengan capaian indikator yang lain harus disikapi dengan kebijakan memberi peluang lebih besar kepada penduduk pada golongan pendapatan terendah untuk meningkatkan kapasitas melalui jalur pendidikan dengan mengakses sekolah sampai jenjang tertinggi serta mengurangi hambatan yang bersifat struktural agar mereka bisa masuk dan bersaing ke dalam pasar tenaga kerja formal.

Perkembangan capaian berbagai indikator ekonomi dan sosial yang semakin membaik secara umum menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk DIY secara rata-rata yang semakin meningkat.



## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2017. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2017*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2018*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. *Statistik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. *Statistik Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2018*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. *Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2018*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2017 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2017. *Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2018*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik dan UNFPA. 2014. *Proyeksi Penduduk Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tJG0gd19jloJ:www.bappenas.go.id/files/1513/5027/5926/arum\\_\\_20091015100705\\_\\_2301\\_\\_0.doc+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tJG0gd19jloJ:www.bappenas.go.id/files/1513/5027/5926/arum__20091015100705__2301__0.doc+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id)
- <http://duaanak.com/artikel/kependudukan-dalam-presfektif-pembangunan-ekonomi-guna-pembangunan-nasional/>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015, Jakarta “ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional*”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Mankiw, N.Gregory. 2007. *Makroekonomi*, (Edisi 6). Jakarta: Penerbit Erlangga
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 (Edisi 8). Jakarta: Erlangga.





# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://yogyakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul  
Telp. (0274) 4342234 (Hunting) Fax. (0274) 4342230  
Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id> E-mail: [bps3400@bps.go.id](mailto:bps3400@bps.go.id)

ISSN 2654-6655



9 772654 665003